



DISTRIBUSI PERDAGANGAN KOMODITI TEPUNG TERIGU INDONESIA 2014



**DISTRIBUSI PERDAGANGAN
KOMODITI TEPUNG TERIGU
INDONESIA 2014**



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data statistik yang diperlukan pemerintah dan masyarakat. Untuk mewujudkan amanat tersebut, BPS menyajikan publikasi hasil kegiatan Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi di 34 Provinsi Tahun 2014. Pemilihan komoditi yang diteliti didasarkan pada pertimbangan memiliki kontribusi output yang besar dalam pembentukan total output yang bersumber dari tabel *Input-Output (I-O)* 2005 dan bobot pada perhitungan inflasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut pada tahun 2014 ditetapkan 4 komoditi yang diteliti yaitu susu bubuk, minyak goreng, garam, dan tepung terigu.

Publikasi ini memuat kajian ringkas hasil penelitian rantai distribusi komoditi tepung terigu yang diteliti mulai dari tingkat produsen, pedagang besar, pedagang eceran sampai ke konsumen. Informasi yang disajikan adalah, Peta Sentra Produksi, Pola Distribusi Perdagangan dan Marjin Perdagangan dan Pengangkutan.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data dalam menyusun perencanaan dan kebijakan, baik oleh pemerintah, dunia usaha dan pengguna lainnya. Disamping itu, diharapkan publikasi ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan publikasi ini. Saran dan kritik sangat kami harapkan demi perbaikan publikasi di masa mendatang.

Jakarta, Oktober 2014

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia,



Dr. Ir. SASMITO HADI WIBOWO, M.Sc.
NIP. 195608051979031001

Survei Pola Distribusi 2014

ABSTRAKSI

Adanya disparitas harga yang tinggi antara harga di tingkat produsen dengan harga di tingkat konsumen serta kurangnya ketersediaan barang kebutuhan yang tidak cukup pada saat dibutuhkan terutama di kota-kota besar mengakibatkan adanya pola distribusi komoditas yang masih bermasalah. Selain itu kurang tersedianya alternatif pilihan, rasa kepuasan yang belum merata antara produsen, lembaga-lembaga usaha perdagangan (dalam tata niaga), dan konsumen juga menjadi masalah dalam distribusi barang.

Publikasi ini menganalisa distribusi perdagangan dalam negeri komoditi tepung terigu di 34 provinsi di Indonesia yang meliputi 126 kabupaten/kota. Dengan menggunakan metode survei pada sampel produsen dan sampel pedagang, dapat diperoleh informasi mengenai gambaran pola dan peta distribusi komoditi tepung terigu secara nasional maupun di setiap provinsi. Hasil survei menunjukkan bahwa pada umumnya fungsi usaha perdagangan di setiap provinsi mendapatkan pasokan tepung terigu dari wilayah kabupaten/kota di luar provinsi. Ketersediaan pasokan tepung terigu terpusat di provinsi-provinsi yang berada di Pulau Jawa, utamanya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Keywords: *Pola, Peta, Distribusi, Tepung Terigu, Marjin*

Survei Pola Distribusi 2014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAKSI	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Identifikasi Masalah	1
1.4 Tujuan	2
1.5 Cakupan Komoditi	2
1.6 Cakupan Wilayah	2
1.7 Metodologi	2
BAB II ULASAN RINGKAS.....	3
2.1 Gambaran Umum	5
2.2 Indonesia	7
2.3 Provinsi Aceh	9
2.4 Provinsi Sumatera Utara.....	10
2.5 Provinsi Sumatera Barat.....	12
2.6 Provinsi Riau	14
2.7 Provinsi Jambi.....	15
2.8 Provinsi Sumatera Selatan.....	17
2.9 Provinsi Bengkulu	19
2.10 Provinsi Lampung	20
2.11 Provinsi Bangka Belitung	22
2.12 Provinsi Kepulauan Riau	24
2.13 Provinsi DKI Jakarta	26
2.14 Provinsi Jawa Barat.....	28
2.15 Provinsi Jawa Tengah.....	30
2.16 Provinsi DI Yogyakarta.....	32
2.17 Provinsi Jawa Timur	34
2.18 Provinsi Banten.....	37
2.19 Provinsi Bali	39
2.20 Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	40
2.21 Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	42
2.22 Provinsi Kalimantan Barat	44
2.23 Provinsi Kalimantan Tengah	46
2.24 Provinsi Kalimantan Selatan	48
2.25 Provinsi Kalimantan Timur.....	50
2.26 Provinsi Kalimantan Utara	51
2.27 Provinsi Sulawesi Utara	53
2.28 Provinsi Sulawesi Tengah	55

2.29	Provinsi Sulawesi Selatan	56
2.30	Provinsi Sulawesi Tenggara	58
2.31	Provinsi Gorontalo.....	59
2.32	Provinsi Sulawesi Barat.....	61
2.33	Provinsi Maluku	62
2.34	Provinsi Maluku Utara	64
2.35	Provinsi Papua Barat.....	65
2.36	Provinsi Papua	67
BAB III KESIMPULAN		69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pola distribusi perdagangan menggambarkan rantai distribusi suatu barang mulai dari produsen hingga ke konsumen. Rantai ini mempunyai peran penting dalam perekonomian masyarakat, karena selain merupakan penghubung antara produsen dengan konsumen juga dapat memberikan nilai tambah bagi pelakunya. Rantai distribusi yang baik mampu menggerakkan suatu barang dari produsen ke konsumen dengan biaya yang serendah-rendahnya dan mampu memberikan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayarkan konsumen kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Pola distribusi tepung terigu saat ini diduga masih bermasalah, ada beberapa faktor perlu dikenali seperti: karakteristik pelaku perdagangan tepung terigu (produsen, pedagang besar, pengecer) faktor-faktor yang mempengaruhi pemasaran seperti kualitas tepung terigu, disparitas harga tepung terigu lokal antar wilayah pada 33 kota di Indonesia cukup besar dibandingkan disparitas harga tepung terigu impor, margin usaha, dan peran setiap kawasan sentra produksi dalam memasok pasar tepung terigu nasional. Sistem saluran pemasaran tepung terigu berkembang karena dipengaruhi oleh perilaku pedagang besar, pengecer maupun konsumen.

Untuk mengetahui di mana letak permasalahan tersebut dipandang perlu untuk dilakukan Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi. Pada tahun 2014 Badan Pusat Statistik (BPS) mengadakan Survei Pola Distribusi (Poldis) Perdagangan Beberapa Komoditi diantaranya tepung terigu. Kegiatan ini dilakukan karena hasilnya bisa digunakan untuk mendapatkan gambaran pola distribusi perdagangan dalam negeri dan dapat dibangun sistem distribusi perdagangan yang lebih baik.

Hasil Survei Poldis Perdagangan 2014 diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data tentang pola distribusi perdagangan untuk komoditi-komoditi terpilih dan sekaligus dapat digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan survei selanjutnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan Survei Poldis Perdagangan 2014 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
- c. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik
- d. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

1.3. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pola distribusi tepung terigu lokal dari tingkat produsen hingga ke konsumen akhir.
- b. Bagaimana pola penjualan tepung terigu lokal dan impor dari suatu wilayah ke wilayah lain.

1.4. Tujuan

Survei Poldis Perdagangan 2014 di 34 provinsi mempunyai tujuan, yaitu:

- Mendapatkan Pola Penjualan Produksi.
- Mendapatkan Pola Distribusi Perdagangan.
- Mendapatkan Peta Wilayah Penjualan Produksi.
- Mendapatkan Peta Wilayah Distribusi Perdagangan.
- Memperoleh data tentang margin perdagangan dan pengangkutan mulai tingkat pedagang besar sampai dengan pedagang eceran.

1.5. Cakupan Komoditi

Penentuan komoditi dalam survei ini adalah komoditi strategis, yaitu komoditi-komoditi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Komoditi yang dalam Survei Biaya Hidup paling banyak dikonsumsi masyarakat.
- Komoditi yang dalam pembentukan inflasi cukup berperan.
- Komoditi yang dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) mempunyai kontribusi cukup besar.
- Komoditi yang memiliki dampak cukup besar terhadap kebutuhan masyarakat.

1.6. Cakupan Wilayah

Cakupan wilayah survei meliputi 133 kabupaten/kota terdiri dari 33 ibukota provinsi dan 100 kabupaten/kota potensi komoditi terpilih dengan jumlah sampel sebanyak 3.500 perusahaan/usaha perdagangan dan produsen.

1.7 Metodologi

- Cakupan KBLI Komoditi Tepung terigu

Tabel 1
Jenis Kegiatan Usaha dan Kode KBLI Menurut Jenis Komoditi

No	Jenis Komoditi	KBLI 2009	KBLI 2005	Uraian KBLI 2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tepung Terigu	10617	15321	Industri tepung terigu
		46339	51220	Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya
			53220	
54220				
		47111	52111	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau di supermarket/minimarket
		47112	52112	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau bukan di supermarket/minimarket (tradisional)

b. Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang dibentuk meliputi kerangka sampel pedagang, dan kerangka sampel produsen komoditi non pertanian. Sedangkan untuk produsen tepung terigu tidak dibentuk kerangka sampel tetapi langsung dipilih secara *purposive* dengan kriteria yang memiliki jumlah produksi terbesar di wilayah tersebut.

Sedangkan pembentukan kerangka sampel pedagang berasal dari:

- 1) SE06-UMB kategori G, yaitu perusahaan perdagangan menengah dan besar hasil Sensus Ekonomi 2006 Sensus Sampel. Dari data tersebut bisa ditentukan fungsi kelembagaan perusahaan/usaha sebagai distributor, subdistributor, agen, subagen, pedagang grosir, pedagang pengumpul, eksportir, importir, dan pengecer dengan pendekatan berdasarkan hasil dari kuesioner SE06-UMB Distribusi Blok II.2 Rincian 6 (menurut asal barang) dan Rincian 8 (menurut penjualan barang). Sedangkan untuk perusahaan SE06-UMB yang *nonresponse*, tidak dapat dilakukan penentuan fungsi kelembagaan perusahaan/usaha.
- 2) Direktori perusahaan perdagangan dari asosiasi untuk perusahaan perdagangan.
- 3) Direktori perusahaan eksport impor
- 4) Perusahaan perdagangan kecil hasil Sensus Ekonomi 2006 Sensus Sampel yaitu SE06-UMK kategori G dengan nilai omset >500 juta rupiah.
- 5) Sumber Lain : berasal dari internet.

c. Metode Pemilihan Sampel

Metode pemilihan sampel dilakukan dengan memperhatikan komoditi utama yang diperdagangkan berdasarkan 7 komoditi terpilih. Untuk perusahaan yang bersumber dari SE06-UMB, seluruhnya diambil sebagai perusahaan sampel, sedangkan sisanya dipilih secara sistematis pada setiap komoditi. Jika jumlah perusahaan/usaha dalam kerangka sampel tidak mencukupi, maka seluruh perusahaan/usaha akan dicacah.

Survei Pola Distribusi 2014

BAB II ULASAN RINGKAS

2.1. Gambaran Umum

Tepung terigu adalah tepung yang berasal dari bulir gandum, dan digunakan sebagai bahan dasar pembuat kue, mie dan roti. Kata terigu dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Portugis, *trigo*, yang berarti "gandum".

Tepung terigu mengandung banyak zat pati, yaitu karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air. Tepung terigu juga mengandung protein dalam bentuk gluten, yang berperan dalam menentukan kekenyalan makanan yang terbuat dari bahan terigu. Tepung terigu juga berasal dari gandum, bedanya terigu berasal dari biji gandum yang dihaluskan, sedangkan tepung gandum utuh (*whole wheat flour*) berasal dari gandum beserta kulit arinya yang ditumbuk.

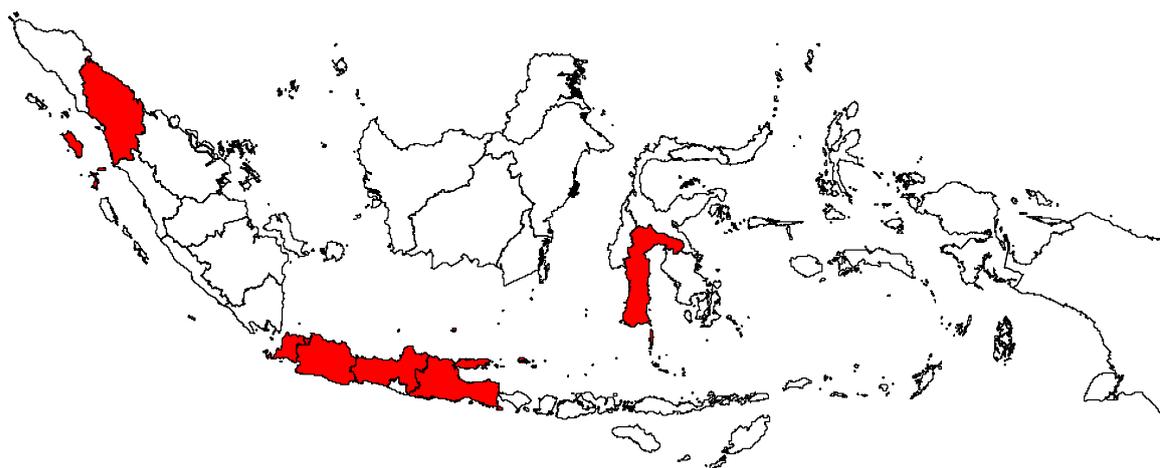
Makanan berbasis gandum atau tepung terigu telah menjadi makanan pokok banyak negara termasuk Indonesia. Ketersediaannya yang melimpah di pasaran dunia, proteinnya yang tinggi, harganya yang relatif tidak mahal dan pengolahannya yang praktis mudah telah menjadikan makanan berbasis tepung terigu merambah cepat ke berbagai negara. Negara-negara pengekspor gandum juga cukup banyak antara lain, Australia, Kanada, Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan India. Karakteristik tepung terigu mempunyai efek substitusi terhadap beras, dengan demikian dapat mengurangi tekanan terhadap konsumsi beras. Terlebih saat ini komoditi tersebut semakin mudah diperoleh dengan harga yang relatif murah. Kebutuhan tepung terigu domestik dipenuhi melalui produksi dari perusahaan-perusahaan pengolah biji gandum yang ada di Indonesia dan juga oleh tepung terigu impor.

Berdasarkan data dari APTINDO (Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia) konsumsi terigu nasional pada tahun 2012 sebesar 5,1 juta MT (metrik ton), tumbuh 8,93% dibanding tahun 2011. Pada tahun 2013 konsumsi terigu nasional tumbuh sebesar 3,3 persen atau sebesar 5,3 juta metrik ton, ekuivalen dengan gandum sekitar 7 juta MT. Saat ini total kapasitas giling dari keseluruhan produsen tepung terigu ± 9,7 juta Metrik Ton/thn.

Menurut APTINDO, saat ini pengguna tepung terigu nasional terdiri dari 3 (tiga) kategori besar yaitu kategori industri besar dan modern, kategori industri kecil dan menengah (UKM) dan rumah tangga (*household*). Pola pengadaan dan pendistribusian pangan tepung terigu yang terjadi pada era reformasi adalah mekanisme pasar (*market mechanism*), dimana produsen tepung terigu nasional harus mengelola perusahaan secara mandiri tanpa campur tangan Bulog (*fully self management*). Disamping itu, dalam rangka menjalankan pola mekanisme pasar, pemerintah membuka akses pasar bagi produsen baru baik lokal maupun asing, serta membuka keran impor dalam rangka memenuhi permintaan tepung terigu nasional.

2.1.1 Peta Sentra Produksi Tepung terigu

Berdasarkan dari data APTINDO jumlah industri terigu nasional yang menjadi anggota asosiasi sampai dengan tahun 2013 berjumlah 21 produsen. Terpusat di Pulau Jawa seperti Jakarta, Surabaya, Semarang Cilacap, Gresik, Tangerang, Sidoarjo, Cilegon, Cibitung, Bekasi, Mojokerto. Untuk di luar Pulau Jawa berada di Medan dan Makassar.



Gambar 1. Peta Sentra Produksi Tepung Terigu di Indonesia

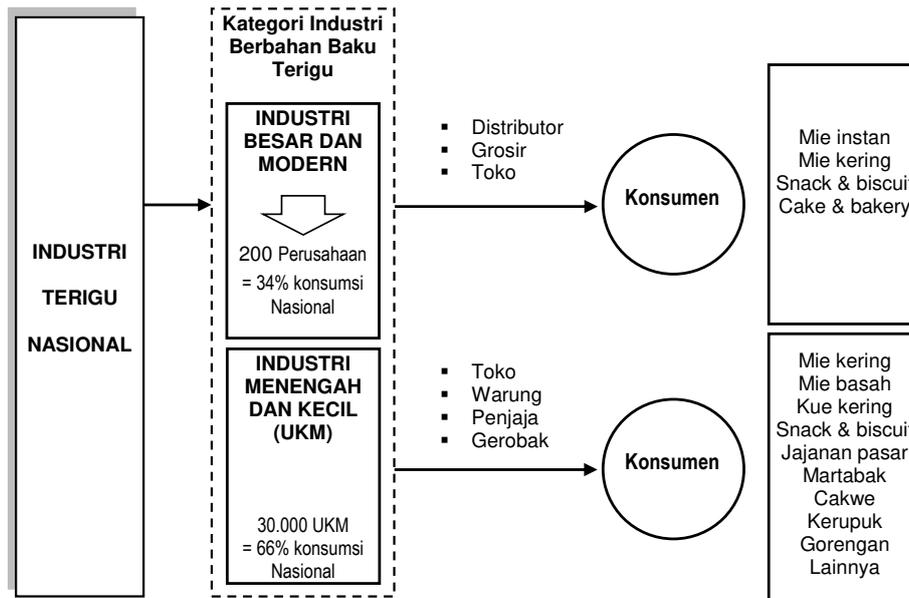
Tabel 2
Penjualan Tepung Terigu Nasional

Penjualan Terigu Nasional (000, MT)				
Tahun/Bulan	2010	2011	2012	2013
Jan	325,8	375,8	386,3	376,8
Feb	350,8	375,2	391,8	439,9
Mar	356,9	407	498,5	434
Apr	321,2	367,7	415,9	419,9
May	319,8	375,2	424,1	426,7
Jun	389,2	418,8	502,5	510
Jul	441,0	453,9	496,9	472,8
Aug	421,1	390,4	298,1	345,2
Sep	341,8	369,2	435,5	514,5
Oct	342,6	368,2	417,2	429,4
Nov	365,5	387,2	402	424,2
Dec	431,5	431,5	473,3	511
Total	4407,2	4720,1	5142,1	5304,4

Sumber: APTINDO

2.1.2 Struktur Pengguna Tepung Terigu

Saat ini tepung terigu telah digunakan sebagai bahan baku makanan yang digunakan secara luas baik untuk kepentingan industri dari skala kecil-tradisional, menengah hingga besar-modern, maupun untuk keperluan rumah tangga. Mayoritas (sekitar 66 persen) pengguna tepung terigu adalah industri kecil-tradisional, menengah (UKM) dan sisanya (sekitar 34 persen) industri besar-modern. Sebagian besar produksi tepung terigu nasional digunakan oleh industri kecil dan menengah (UKM) yang saat ini diperkirakan ada sebanyak 30.000 usaha. (sumber: APTINDO). Berikut disajikan struktur industri pengguna tepung terigu nasional.



Sumber: APTINDO

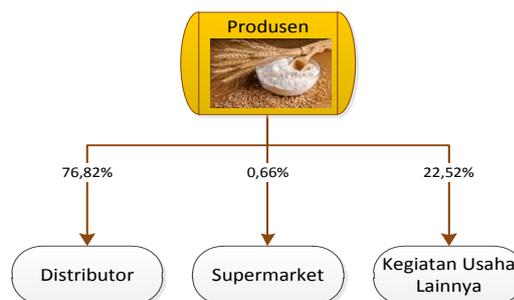
Gambar 2. Struktur Industri Pengguna Tepung Terigu Nasional

Dari hasil Survei Pola Distribusi Perdagangan Komoditi Tepung Terigu 2014 akan dipaparkan hasil pengamatan lapangan berupa peta penjualan produksi, peta distribusi perdagangan, pola penjualan produksi, pola distribusi perdagangan dan Marjin Perdagangan Pengangkutan di masing-masing Provinsi. Adanya keterbatasan sampel juga faktor *non response*, maka data peta penjualan produksi dan pola penjualan produksi untuk produsen tepung terigu yang masuk dalam anggota APTINDO tidak seluruhnya masuk dalam publikasi ini, yang masuk dari hasil survei ini adalah produsen tepung terigu di Jawa Barat dan Jawa Timur.

2.2 Indonesia

2.2.1 Pola Produksi

Dari hasil survei meliputi 131 Kabupaten/Kota di seluruh provinsi Indonesia diperoleh informasi bahwa produsen tepung terigu menjual hasil produksinya terbesar melalui distributor sebesar 76,82 persen, industri pengolahan sebesar 22,52 persen, dan sisanya ke supermarket/swalayan 0,66 persen. Pola penjualan produksi tepung terigu di Indonesia secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



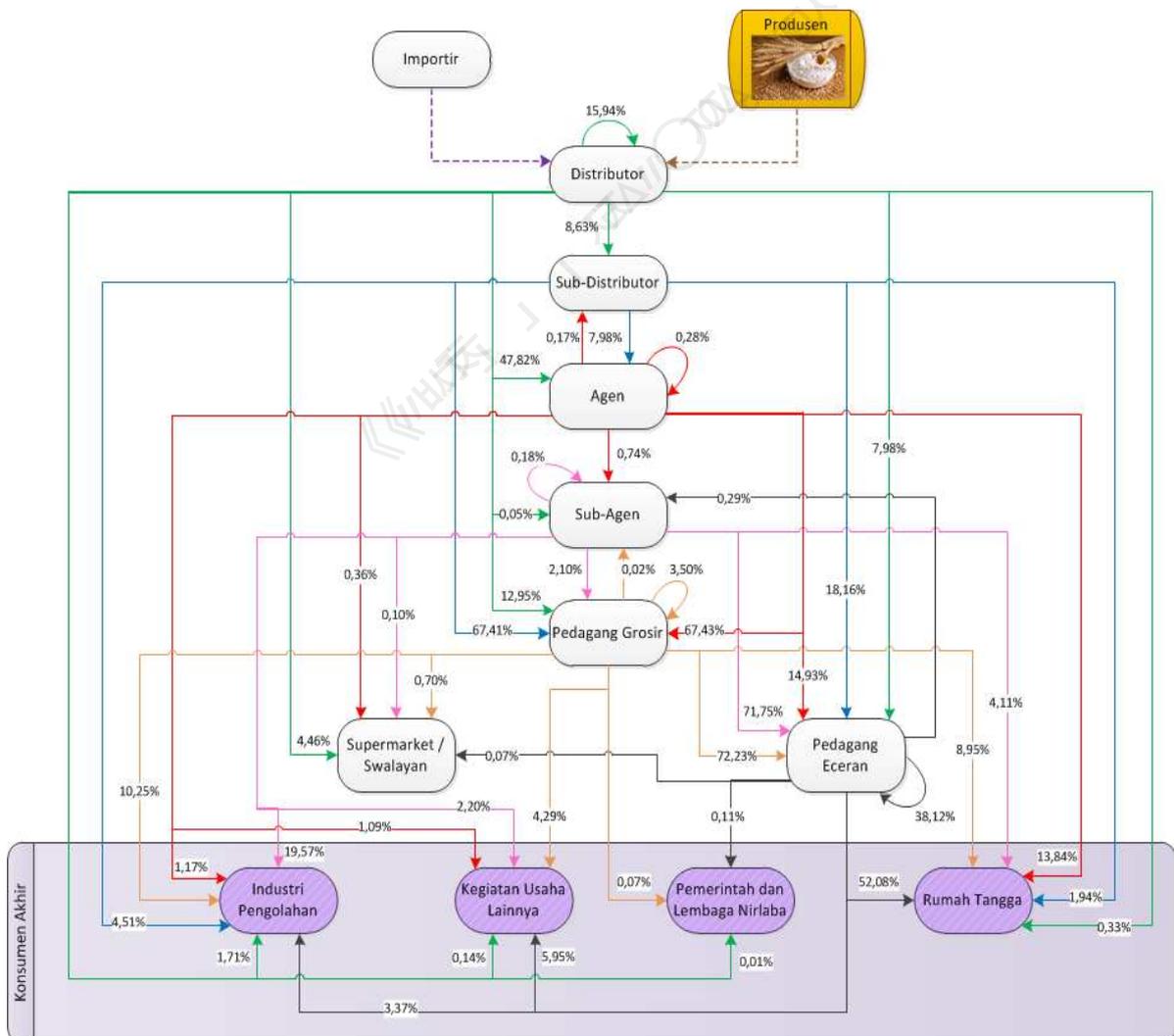
Gambar 3. Pola Penjualan Produksi Tepung Terigu di Indonesia

2.2.2 Pola Distribusi

Secara umum distribusi tepung terigu sebagai barang konsumsi melibatkan produsen, pedagang besar, pengecer, dan konsumen akhir dalam saluran distribusinya. Penjualannya menggunakan seluruh kelembagaan dalam perdagangan, hal ini menunjukkan agar pasokan tepung terigu selalu tersedia dimanapun dan kapanpun dibutuhkan. Para pedagang besar seperti distributor, sub distributor, agen, dan grosir mendapatkan pasokan sebagian besar dari produsen, sesama distributor, importir.

Produsen tepung terigu pada survei kali ini mendapat pasokan bahan baku gandum dari beberapa negara penghasil gandum seperti Australia, Canada, Amerika Serikat, India, dan Rusia. Komoditas tepung terigu ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap industri makanan seperti mie, biskuit, serta kegiatan usaha lainnya yang berbasis tepung terigu. Pola distribusi perdagangan tepung terigu di Indonesia menggunakan hampir seluruh kelembagaan dalam saluran pemasarannya.

Pola saluran distribusi perdagangan tepung terigu di Indonesia disajikan pada Gambar berikut:



Gambar 4. Pola Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Indonesia

2.2.3 Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Selengkapnya MPP tepung terigu di Provinsi Indonesia dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3.
Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Tepung Terigu di Indonesia

Uraian (1)	Pedagang Besar (PB) (2)	Pedagang Eceran (PE) (3)	PB+PE (4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	2.755.460	102.413	1.659.383
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	2.603.347	93.906	1.566.600
Rata-rata MPP(000 Rp)	152.113	8.506	92.783
Rasio Marjin (%)	5,84	9,06	5,92

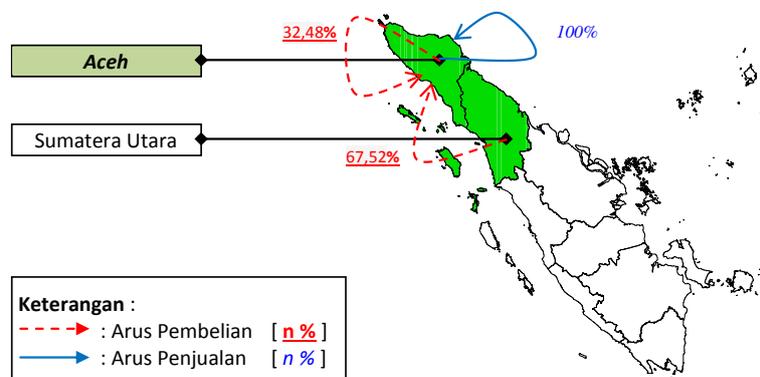
Pedagang besar dan pedagang eceran tepung terigu di Indonesia masing-masing mengambil keuntungan rata-rata sebesar 5,84 persen dan 9,06 persen dengan rata-rata MPP untuk pedagang besar mencapai Rp152,11 juta dan Rp8,51 juta untuk pedagang eceran. Sehingga, rata-rata MPP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp92,78 juta dengan rasio marjin sebesar 5,92 persen.

2.3. Provinsi Aceh

Wilayah cakupan survei di Provinsi Aceh yaitu Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, dan Kota Banda Aceh. Sebanyak 10 sampel pedagang tepung terigu yang berada di seluruh wilayah cakupan survei.

2.3.1 Peta Distribusi

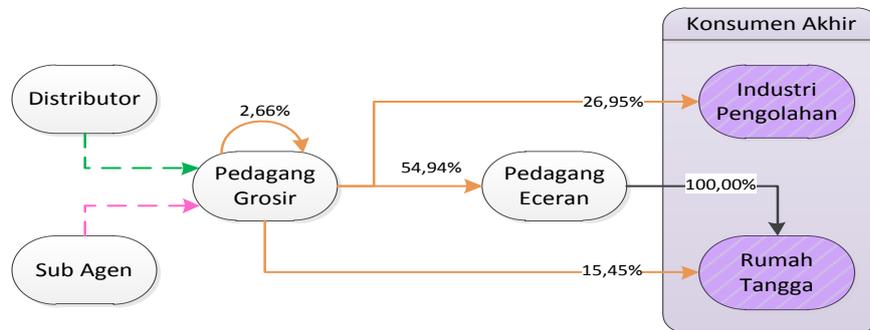
Distribusi perdagangan komoditi tepung terigu di Provinsi Aceh ditunjukkan pada gambar peta distribusi perdagangan di bawah. Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa sebagian besar pasokan tepung terigu berasal dari Sumatera Utara, yaitu sebesar 67,52 persen. Sisanya, dari dalam Provinsi Aceh sebesar 32,48 persen. Tepung terigu tersebut selanjutnya dijual seluruhnya ke dalam Provinsi Aceh sendiri. Selengkapnya peta distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Aceh dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Peta Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Aceh

2.3.2 Pola Distribusi

Pola saluran distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Aceh disajikan pada Gambar berikut ini:



Gambar 6. Pola Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Aceh

Jalur distribusi perdagangan komoditas tepung terigu di Provinsi Aceh dimulai dari pedagang grosir yang mendapat pasokan dari distributor dan sub agen, kemudian dijual lagi dengan persentase terbesar ke pedagang eceran (54,94%), sisanya ke industri pengolahan, rumah tangga dan sesama pedagang grosir. Pedagang di tingkat eceran menjual seluruhnya ke rumah tangga.

2.3.3 Marjin Perdagangan dan Pengangkutan

Pedagang besar dan pedagang eceran tepung terigu di Provinsi Aceh masing-masing mengambil keuntungan rata-rata sebesar 2,13 persen dan 14,29 persen dengan rata-rata MPP untuk pedagang besar mencapai Rp7,76 juta dan Rp3,24 juta untuk pedagang eceran. Sehingga, rata-rata MPP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp7,31 juta dengan rasio marjin sebesar 2,21 persen. Selengkapnya MPP tepung terigu di Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Tepung terigu di Provinsi Aceh

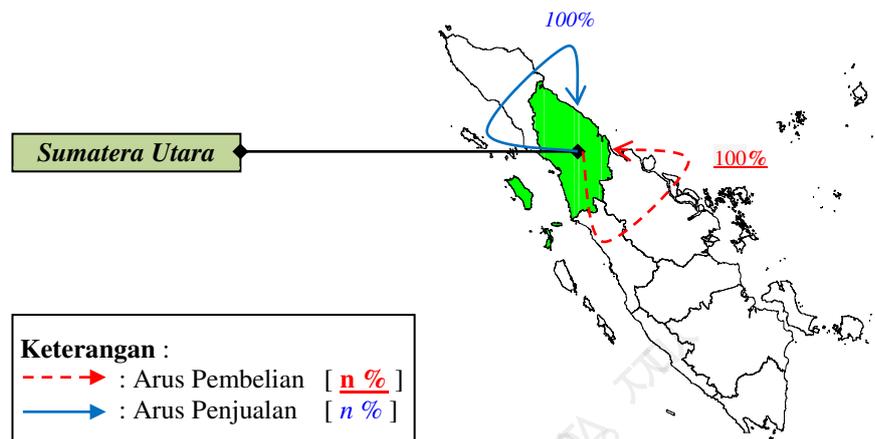
Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	372.587	25.920	337.920
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	364.822	22.680	330.608
Rata-rata MPP (000 Rp)	7.765	3.240	7.312
Rasio Marjin (%)	2,13	14,29	2,21

2.4. Provinsi Sumatera Utara

Wilayah cakupan survei di Provinsi Sumatera Utara yaitu Kabupaten Asahan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Batubara, Kabupaten Tanjung Balai, Kota Pematang Siantar, Kota Tebing tinggi, Kota Medan, dan Kota Binjai. Sebanyak 24 sampel pedagang tepung terigu berada di seluruh wilayah cakupan survei.

2.4.1 Peta Distribusi

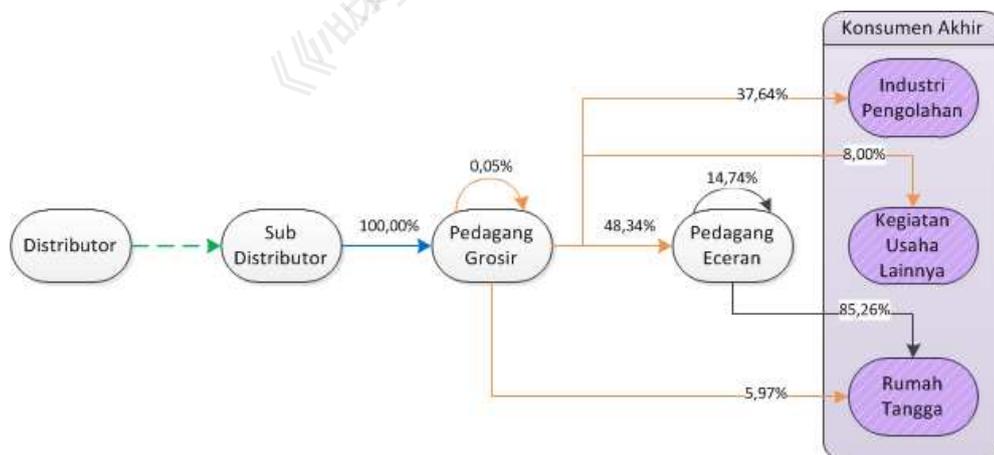
Distribusi perdagangan komoditi tepung terigu di Provinsi Sumatera Utara dapat digambarkan pada peta distribusi perdagangan di bawah. Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa seluruh pasokan tepung terigu berasal dari dalam wilayah Sumatera Utara. Tepung terigu tersebut selanjutnya dijual seluruhnya ke dalam Provinsi Sumatera Utara sendiri. Selengkapnnya peta distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7 Peta Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Sumatera Utara

2.4.2 Pola Distribusi

Pola saluran distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Sumatera Utara disajikan pada gambar berikut:



Gambar 8. Pola Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Sumatera Utara

Jalur distribusi perdagangan komoditas tepung terigu di Provinsi Sumatera Utara dimulai dari pedagang besar sub distributor yang mendapat pasokan dari distributor untuk dijual seluruhnya ke pedagang grosir. Selanjutnya pedagang grosir menjual kembali barang dagangannya sebagian besar ke pedagang eceran sebesar 48,34 persen, sisanya dijual ke kegiatan usaha lainnya, rumah tangga dan sesama grosir. Pengecer menjual kembali ke rumah tangga sebesar 85,26 persen dan 14,74 persen ke sesama pengecer.

2.4.3 Marjin Perdagangan dan Pengangkutan

Pedagang besar dan pedagang eceran tepung terigu di Provinsi Sumatera Utara masing-masing mengambil keuntungan rata-rata sebesar 3,01 persen dan 10,51 persen dengan rata-rata MPP untuk pedagang besar mencapai Rp7,90 juta dan Rp6,69 juta untuk pedagang eceran. Sehingga, rata-rata MPP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp6,00 juta dengan rasio marjin sebesar 3,08 persen. Selengkapnya MPP tepung terigu di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 5.

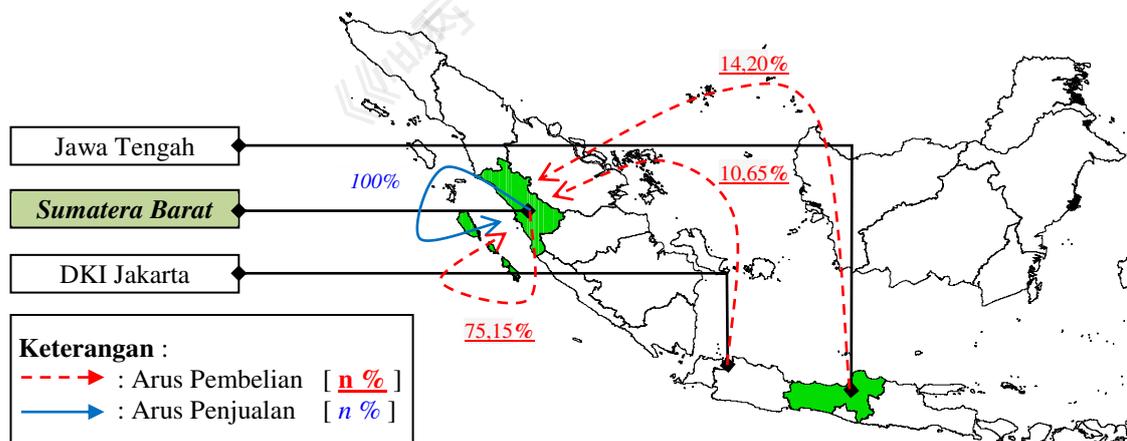
Tabel 5. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Tepung Terigu di Provinsi Sumatera Utara

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	269.923	7.395	200.836
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	262.026	6.692	194.833
Rata-rata MPP (000 Rp)	7.897	703	6.004
Rasio Marjin (%)	3,01	10,51	3,08

2.5 Provinsi Sumatera Barat

Wilayah cakupan survei di Provinsi Sumatera Barat yaitu Kabupaten Solok Selatan, Kota Padang dan Kota Bukit Tinggi. Sebanyak 19 sampel pedagang tepung terigu yang berada di seluruh wilayah cakupan survei.

2.5.1 Peta Distribusi



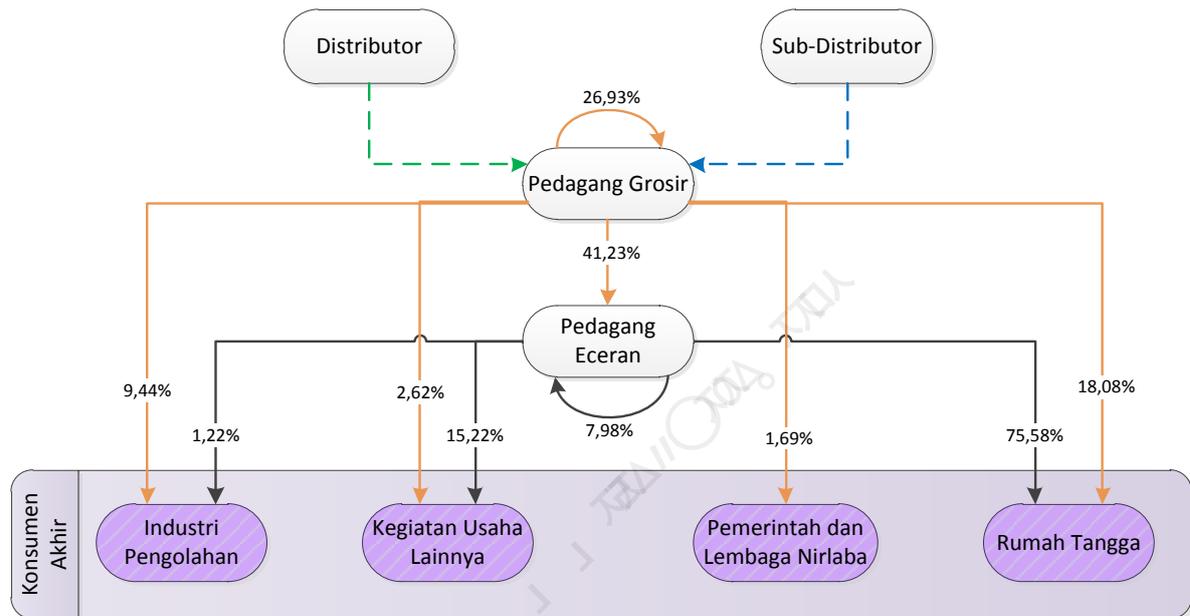
Gambar 9. Peta Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Sumatera Barat

Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa pedagang tepung terigu di Provinsi Sumatera Barat mendapat pasokan sebagian besar berasal dari dalam wilayah sendiri sekitar 75 persen. Sisanya, dari luar Provinsi Sumatera Barat yaitu Jawa Tengah sebesar 14,20 persen dan DKI Jakarta lebih dari 10 persen. Tepung terigu tersebut selanjutnya dijual seluruhnya ke dalam Provinsi Sumatera Barat. Selengkapnya peta distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 9.

2.5.2 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei untuk jalur distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Sumatera Barat dimulai dari pedagang grosir yang mendapat pasokan dari distributor dan sub distributor, untuk dijual kembali ke pedagang eceran (41,23%), sesama grosir, juga industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, rumah tangga, dan pemerintahan lembaga nirlaba. Pedagang eceran menjual ke konsumen akhir.

Pola saluran distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Sumatera Barat disajikan pada Gambar berikut:



Gambar 10. Pola Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Sumatera Barat

2.5.3 Marjin Perdagangan dan Pengangkutan

Selengkapnya MPP tepung terigu di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Tepung Terigu di Provinsi Sumatera Barat

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	407.450	45.342	259.315
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	348.947	36.087	220.959
Rata-rata MPP (000 Rp)	58.503	9.255	38.356
Rasio Marjin (%)	16,77	25,65	17,36

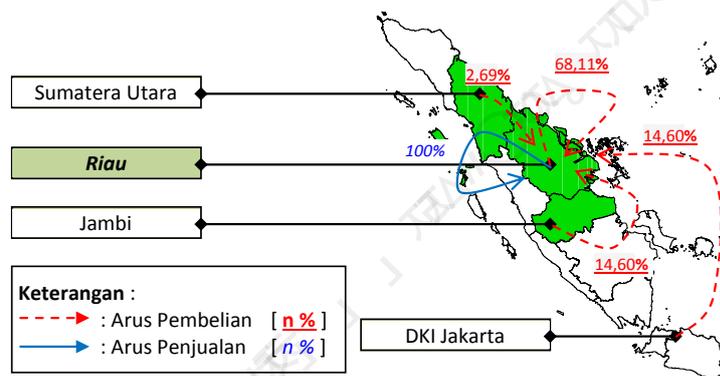
Pedagang besar dan pedagang eceran tepung terigu di Provinsi Sumatera Barat masing-masing mengambil keuntungan rata-rata sebesar 16,77 persen dan 25,65 persen dengan rata-rata MPP untuk pedagang besar mencapai Rp58,50 juta dan Rp9,26 juta untuk pedagang eceran. Sehingga, rata-rata MPP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp38,36 juta dengan rasio marjin sebesar 17,36 persen.

2.6 Provinsi Riau

Wilayah cakupan survei di Provinsi Riau yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai. Sebanyak 14 sampel pedagang tepung terigu yang berada di seluruh wilayah cakupan survei.

2.6.1 Peta Distribusi

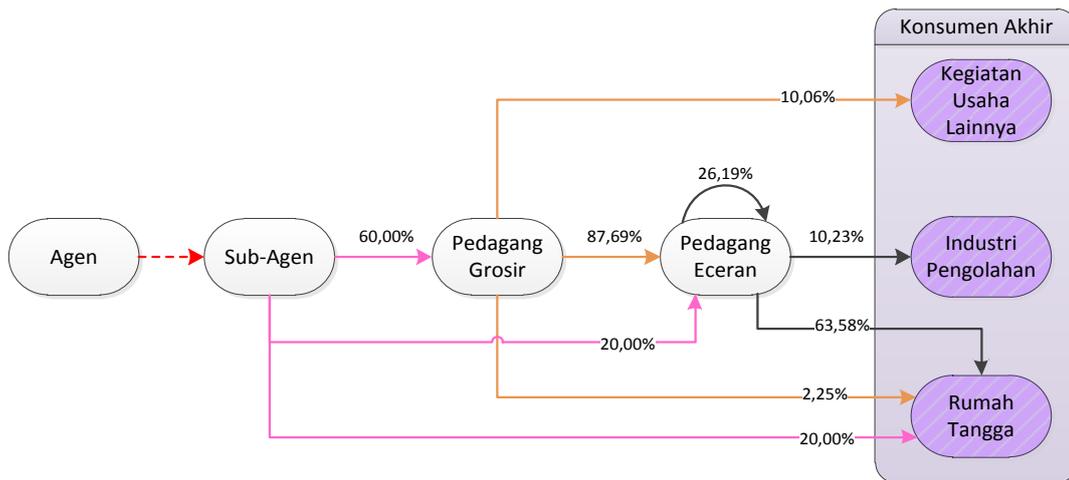
Wilayah pasokan dan penjualan perdagangan komoditi tepung terigu di Provinsi Riau ditunjukkan pada gambar peta distribusi perdagangan di bawah ini. Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa pedagang tepung terigu mendapat pasokan dari beberapa wilayah di luar provinsi Riau, sebagian besar berasal dari dalam wilayah sendiri sekitar 68 persen. Sisanya, dari luar Provinsi Riau seperti Jambi, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara. Tepung terigu tersebut selanjutnya dijual pedagang seluruhnya ke dalam Provinsi Riau. Selengkapnya peta distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Riau dapat dilihat pada Gambar 11.



Gambar 11. Peta Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Riau

2.6.2 Pola Distribusi

Saluran distribusi perdagangan tepung terigu dimulai dari sub agen yang mendapat pasokan dari agen, kemudian dijual ke pedagang grosir (60,00%), pedagang eceran (20,00%) dan rumah tangga (20,00%). Sementara pedagang di tingkat grosir menjual kembali ke pedagang eceran (87,69%), sisanya ke kegiatan usaha lainnya dan rumah tangga. Pedagang eceran menjual kembali selain rumah tangga juga industri pengolahan. Pola saluran distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Riau disajikan pada gambar berikut:



Gambar 12. Pola Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Riau

2.6.3 Marjin Perdagangan dan Pengangkutan

Pedagang besar dan pedagang eceran tepung terigu di Provinsi Riau masing-masing mengambil keuntungan rata-rata sebesar 3,17 persen dan 11,38 persen dengan rata-rata MPP untuk pedagang besar mencapai Rp15,44 juta dan Rp7,00 juta untuk pedagang eceran. Sehingga, rata-rata MPP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp10,97 juta dengan rasio marjin sebesar 4,20 persen. Selengkapnya MPP tepung terigu di Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Tepung Terigu di Provinsi Riau

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	502.005	68.518	272.512
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	486.560	61.517	261.537
Rata-rata MPP (000 Rp)	15.445	7.001	10.974
Rasio Marjin (%)	3,17	11,38	4,20

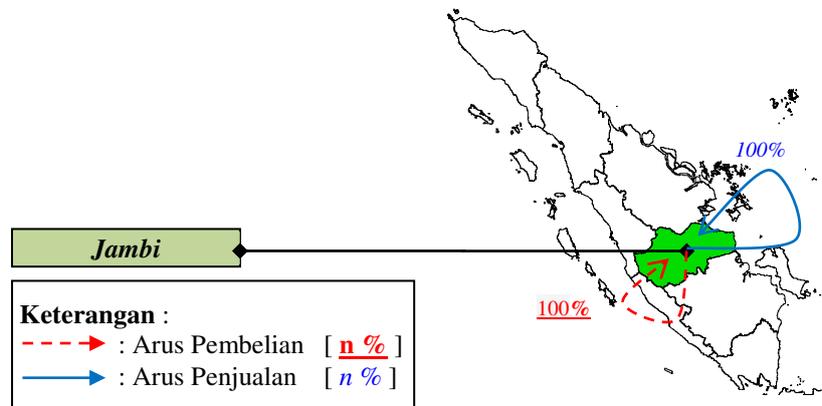
2.7 Provinsi Jambi

Wilayah cakupan survei di Provinsi Jambi yaitu Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi. Sebanyak 14 sampel pedagang tepung terigu yang berada di seluruh wilayah cakupan survei.

2.7.1 Peta Distribusi

Wilayah distribusi perdagangan komoditi tepung terigu di Provinsi Jambi ditunjukkan pada gambar peta distribusi perdagangan di bawah ini. Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa pedagang tepung terigu di tingkat agen mendapat pasokan seluruhnya dari dalam wilayahnya sendiri. Tepung terigu tersebut selanjutnya dijual pedagang seluruhnya ke dalam Provinsi Jambi.

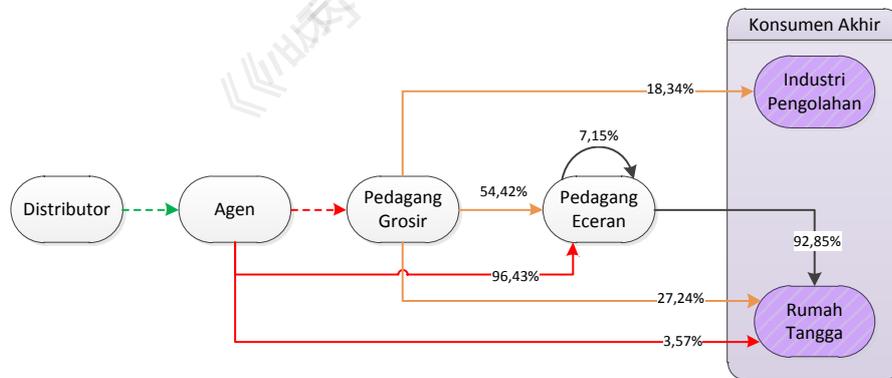
Selengkapnya peta distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Jambi dapat dilihat pada Gambar 13.



Gambar 13. Peta Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Jambi

2.7.2 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, jalur distribusi tepung terigu di Provinsi Jambi dimulai pedagang tepung terigu di tingkat agen yang mendapatkan barang dagangannya dari distributor, yang sebagian besar dijual ke pedagang eceran sekitar 96,43 persen, sisanya ke rumah tangga. Saluran distribusi lainnya seperti pedagang grosir yang mendapat pasokan tepung terigu dari agen kemudian di salurkan sebagian besar ke pedagang eceran sebesar 54,42 persen, sisanya ke industri pengolahan dan rumah tangga. Pola saluran distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Jambi disajikan pada Gambar berikut:



Gambar 14. Pola Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Jambi

2.7.3 Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Pedagang besar dan pedagang eceran tepung terigu di Provinsi Jambi masing-masing mengambil keuntungan rata-rata sebesar 9,48 persen dan 16,65 persen dengan rata-rata MPP untuk pedagang besar mencapai Rp8,29 juta dan Rp5,73 juta untuk pedagang eceran. Sehingga, rata-rata MPP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp7,15 juta dengan rasio marjin sebesar 11,19 persen. Selengkapnya MPP tepung terigu di Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Tepung Terigu di Provinsi Jambi

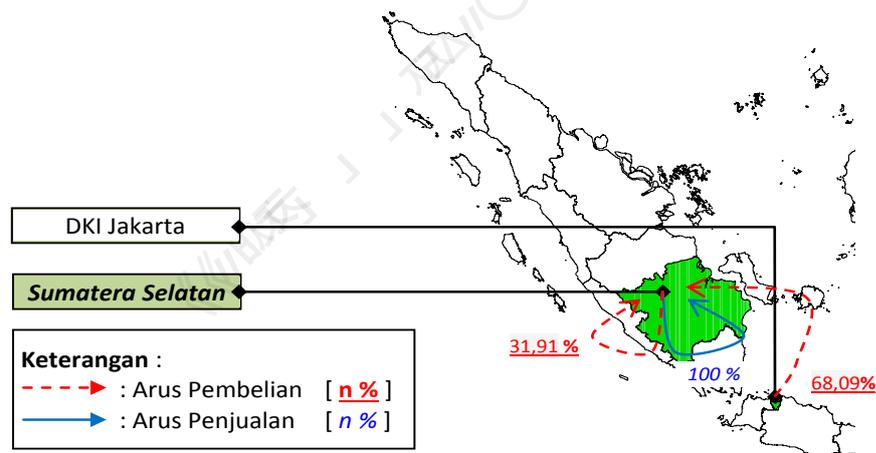
Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	95.770	40.116	71.035
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	87.480	34.389	63.884
Rata-rata MPP (000 Rp)	8.290	5.727	7.151
Rasio Marjin (%)	9,48	16,65	11,19

2.8 Provinsi Sumatera Selatan

Wilayah cakupan survei di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, dan Kota Lubuk Linggau. Sebanyak 17 sampel pedagang tepung terigu berada di seluruh wilayah cakupan survei.

2.8.1 Peta Distribusi

Wilayah pasokan dan penjualan perdagangan komoditi tepung terigu di Provinsi Sumatera Selatan ditunjukkan pada gambar peta distribusi perdagangan di bawah ini.



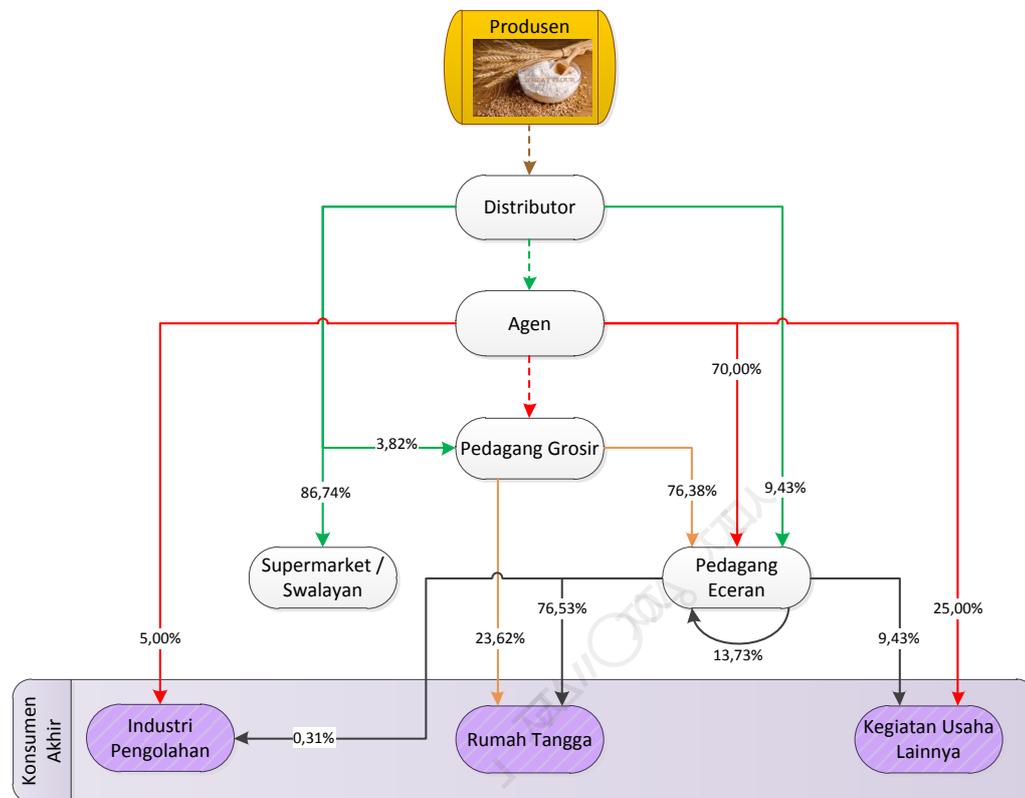
Gambar 15. Peta Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Sumatera Selatan

Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa pedagang tepung terigu mendapat pasokan sebagian besar dari luar provinsi Sumatera Selatan yaitu DKI Jakarta sebesar 68,09 persen. Sisanya, dari dalam Provinsi Sumatera Selatan. Tepung terigu tersebut selanjutnya dijual seluruhnya oleh pedagang, di dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

2.8.2 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, saluran distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Sumatera Selatan dimulai dari pedagang distributor yang mendapat pasokan sebagian besar produsen yang selanjutnya di distribusikan sebagian besar ke supermarket (86,74%), sisanya ke pedagang grosir dan pedagang eceran. Pedagang besar lainnya yaitu agen dan grosir yang mendapat pasokan dari

distributor menjual sebagian besar tepung terigu ke pedagang eceran serta industri pengolahan dan kegiatan usaha lainnya. Pada tingkat eceran dijual ke konsumen akhir. Pola saluran distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Sumatera Selatan disajikan pada Gambar berikut:



Gambar 16. Pola Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Sumatera Selatan

2.8.3 Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Selengkapnya MPP tepung terigu di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9.

Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Tepung Terigu di Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	1.751.779	91.012	619.438
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	1.574.421	72.558	550.424
Rata-rata MPP (000 Rp)	177.358	18.454	69.014
Rasio Marjin (%)	11,26	25,43	12,54

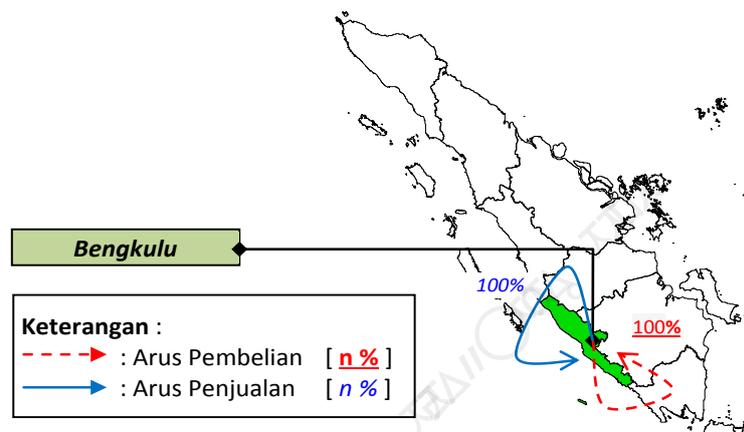
Pedagang besar dan pedagang eceran tepung terigu di Provinsi Sumatera Selatan masing-masing mengambil keuntungan rata-rata sebesar 11,26 persen dan 25,43 persen dengan rata-rata MPP untuk pedagang besar mencapai Rp177,36 juta dan Rp18,45 juta untuk pedagang eceran. Sehingga, rata-rata MPP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp69,01 juta dengan rasio marjin sebesar 12,54 persen.

2.9 Provinsi Bengkulu

Wilayah cakupan survei di Provinsi Bengkulu yaitu Kabupaten Rejang Lebong, dan Kota Bengkulu. Sebanyak 9 sampel pedagang tepung terigu berada di seluruh wilayah cakupan survei.

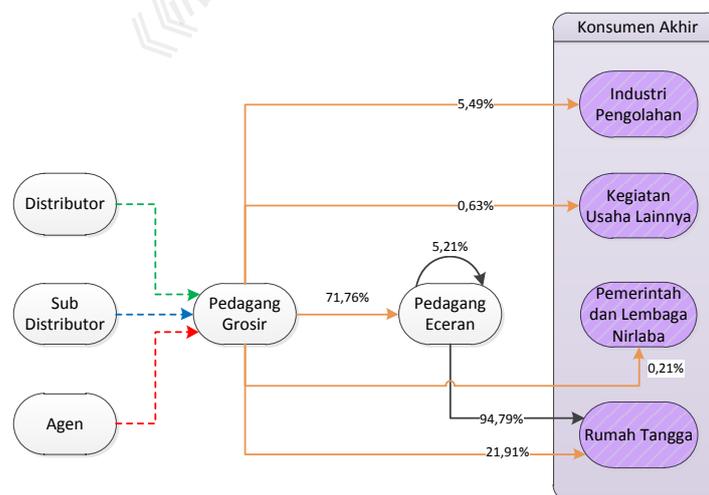
2.9.1 Peta Distribusi

Wilayah pasokan dan penjualan perdagangan komoditi tepung terigu di Provinsi Bengkulu ditunjukkan pada gambar peta distribusi perdagangan di bawah ini. Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa pedagang tepung terigu mendapat pasokan seluruhnya dari dalam Provinsi Bengkulu. Tepung terigu tersebut selanjutnya dijual pedagang seluruhnya ke dalam Provinsi Bengkulu. Selengkapnya peta distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada Gambar 17.



Gambar 17. Peta Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Bengkulu

2.9.2 Pola Distribusi



Gambar 18. Pola Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Bengkulu

Jalur distribusi perdagangan tepung terigu di provinsi Bengkulu dimulai dari pedagang grosir yang mendapat pasokan dari distributor, sub distributor, dan agen. Produk tepung terigu selanjutnya dijual sebagian besar ke pedagang eceran sebesar 71,76 persen, sisanya ke konsumen akhir (industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, pemerintah dan lembaga nirlaba, rumah

tangga). Pada tingkat pengecer penjualan sebagian besar ke rumah tangga sekitar 95 persen. Pola saluran distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Bengkulu disajikan pada Gambar 17 diatas.

2.9.3 Marjin Perdagangan dan Pengangkutan

Pedagang besar dan pedagang eceran tepung terigu di Provinsi Bengkulu masing-masing mengambil keuntungan rata-rata sebesar 11,64 persen dan 11,36 persen dengan rata-rata MPP untuk pedagang besar mencapai Rp32,66 juta dan Rp1,08 juta untuk pedagang eceran. Sehingga, rata-rata MPP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp22,14 juta dengan rasio marjin sebesar 11,63 persen. Selengkapnya MPP tepung terigu di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Tepung terigu di Provinsi Bengkulu

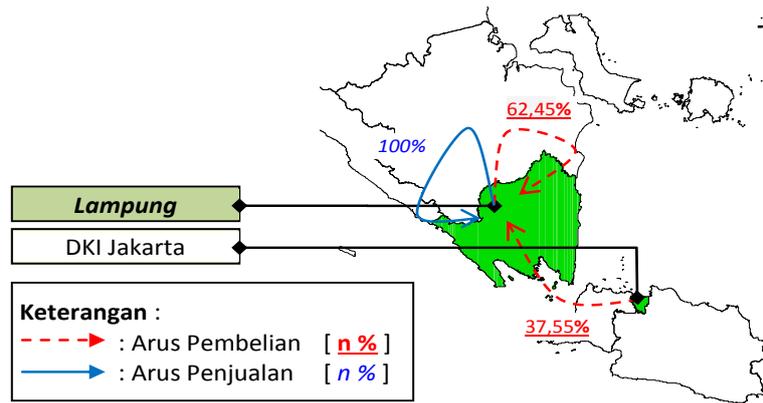
Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	313.313	10.618	212.415
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	280.651	9.535	190.279
Rata-rata MPP (000 Rp)	32.662	1.083	22.136
Rasio Marjin (%)	11,64	11,36	11,63

2.10 Provinsi Lampung

Wilayah cakupan survei di Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro. Sebanyak 14 sampel pedagang tepung terigu berada di seluruh wilayah cakupan survei.

2.10.1 Peta Distribusi

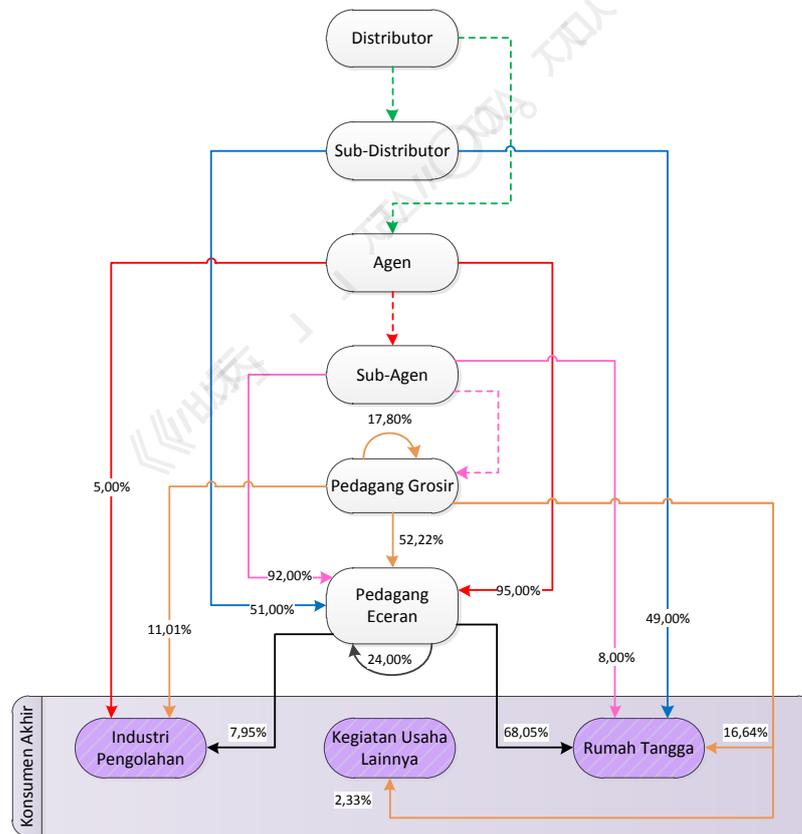
Wilayah pembelian dan penjualan perdagangan komoditi tepung terigu di Provinsi Lampung ditunjukkan pada gambar peta distribusi perdagangan di bawah ini. Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa pedagang tepung terigu selain dari dalam wilayah sendiri (62,45%) juga berasal dari luar provinsi yaitu dari Provinsi DKI Jakarta (37,55%). Tepung terigu tersebut selanjutnya dijual pedagang seluruhnya ke dalam Provinsi Lampung. Selengkapnya peta distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Gambar 18.



Gambar 19. Peta Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Lampung

2.10.2 Pola Distribusi

Pola saluran distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Lampung disajikan pada Gambar berikut:



Gambar 20. Pola Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Lampung

Jalur distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Lampung dimulai dari pedagang besar yaitu sub distributor, agen dan sub agen serta pedagang grosir yang mendapat pasokan dari distributor tepung terigu. Penjualan dari pedagang besar tersebut rata-rata paling banyak ke pedagang eceran, diikuti konsumen akhir seperti industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, dan rumah tangga.

2.10.3 Marjin Perdagangan dan Pengangkutan

Pedagang besar dan pedagang eceran tepung terigu di Provinsi Lampung masing-masing mengambil keuntungan rata-rata sebesar 13,58 persen dan 8,10 persen dengan rata-rata MPP untuk pedagang besar mencapai Rp38,24 juta dan Rp6,80 juta untuk pedagang eceran. Sehingga, rata-rata MPP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp32,34 juta dengan rasio marjin sebesar 13,23 persen. Selengkapnya MPP tepung terigu di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 11.

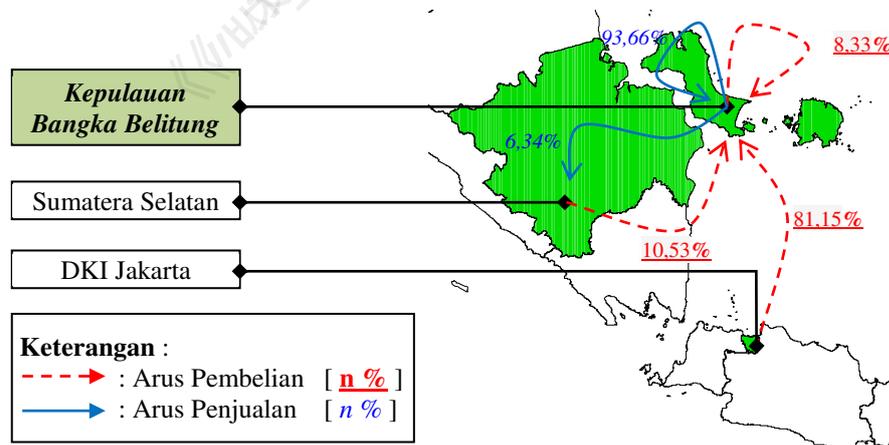
Tabel 11. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Tepung terigu di Provinsi Lampung

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	319.819	90.782	276.875
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	281.580	83.983	244.531
Rata-rata MPP (000 Rp)	38.239	6.799	32.344
Rasio Marjin (%)	13,58	8,10	13,23

2.11 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Wilayah cakupan survei di Provinsi Bangka Belitung yaitu Kabupaten Belitung, dan Kota Pangkal Pinang. Sebanyak 9 sampel pedagang tepung terigu berada di seluruh wilayah cakupan survei.

2.11.1 Peta Distribusi



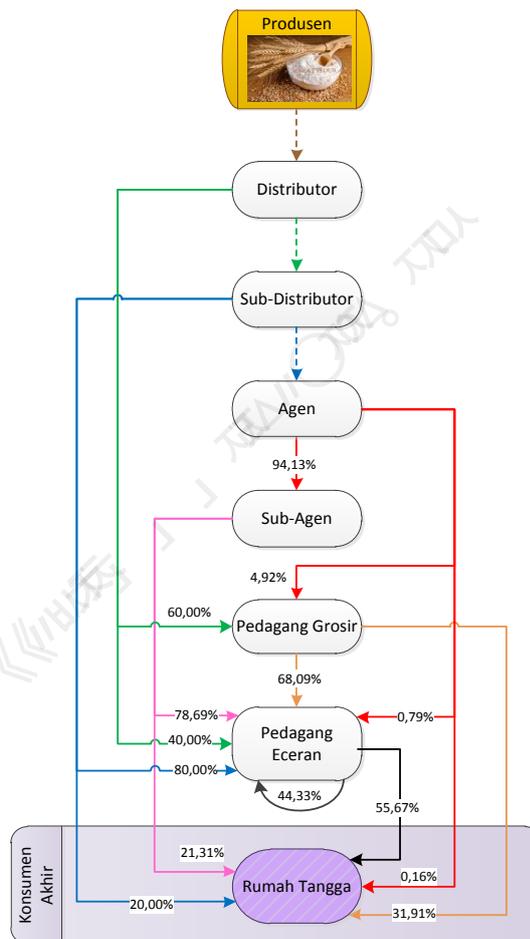
Gambar 21. Peta Distribusi Perdagangan Tepung terigu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Distribusi perdagangan komoditi tepung terigu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditunjukkan pada gambar peta distribusi perdagangan di bawah. Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa pedagang tepung terigu mendapat pasokan sebagian besar berasal dari DKI Jakarta sekitar 81 persen. Sisanya, dari luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Provinsi Sumatera Selatan sebesar 10,53 persen dan dari dalam wilayah sendiri. Tepung terigu tersebut

selanjutnya dijual ke dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 93,66 persen, sisanya ke wilayah sendiri.

2.11.2 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, pola distribusi perdagangan tepung terigu dimulai dari distributor yang mendapat pasokan dari dari produsen, untuk dijual lagi ke pedagang grosir sebesar 60 persen, dan sisanya ke pedagang eceran. Perantara lainnya pada distribusi tepung terigu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melibatkan sub distributor, agen, sub agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Pola saluran distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Bangka Belitung disajikan pada Gambar berikut:



Gambar 22. Pola Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2.11.3 Marjin Perdagangan dan Pengangkutan

Pedagang besar dan pedagang eceran tepung terigu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masing-masing mengambil keuntungan rata-rata sebesar 4,13 persen dan 2,66 persen dengan rata-rata MPP untuk pedagang besar mencapai Rp10,52 juta dan Rp1,06 juta untuk pedagang eceran. Sehingga, rata-rata MPP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp8,49 juta

dengan rasio marjin sebesar 4,07 persen. Selengkapnya MPP tepung terigu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12
Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Tepung terigu di Provinsi Bangka Belitung

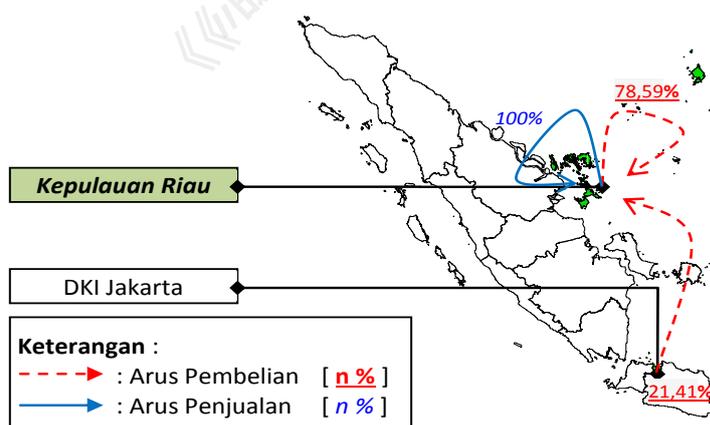
Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	265.073	40.905	217.037
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	254.558	39.845	208.548
Rata-rata MPP (000 Rp)	10.515	1.061	8.489
Rasio Marjin (%)	4,13	2,66	4,07

2.12 Provinsi Kepulauan Riau

Wilayah cakupan survei di Provinsi Kepulauan Riau yaitu kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang dengan alokasi pedagang tepung terigu sebanyak 7 sampel yang berada di seluruh wilayah cakupan survei.

2.12.1 Peta Distribusi

Wilayah pembelian untuk pedagang tepung terigu di Provinsi Kepulauan Riau berasal dari dalam wilayah sendiri sebesar 78,59 persen, sisanya para pedagang mengambil dari luar wilayah yaitu dari DKI Jakarta sekitar 21 persen. Penjualan seluruhnya hanya di dalam wilayah sendiri. Selengkapnya peta distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar 23.

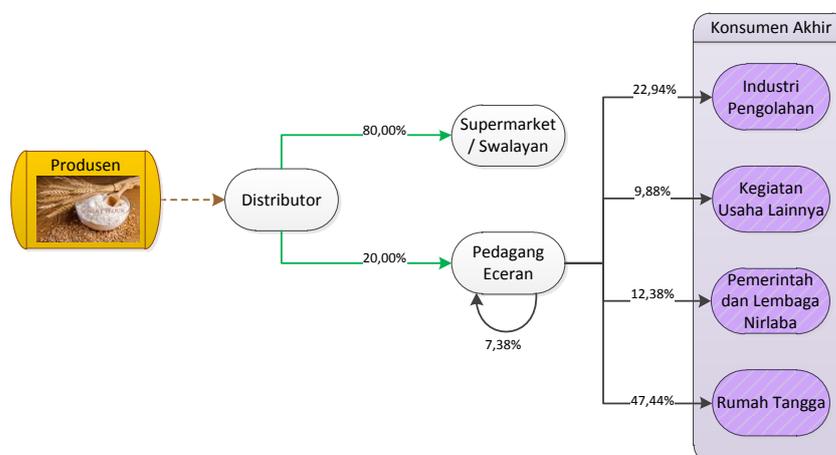


Gambar 23. Peta Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Kepulauan Riau

2.12.2 Pola Distribusi

Jalur distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Kepulauan Riau dimulai dari pedagang pada tingkat distributor yang mendapat pasokan dari produsen, selanjutnya distributor

menjual kembali ke supermarket/swalayan sebesar 80 persen di wilayah Kepulauan Riau juga ke pedagang eceran. Pengecer menjual kembali ke konsumen akhir. Pola saluran distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Kepulauan Riau disajikan pada gambar berikut:



Gambar 24. Pola Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Kepulauan Riau

2.12.3 Marjin Perdagangan dan Pengangkutan

Tabel 13.
Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Tepung Terigu di Provinsi Kepulauan Riau

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	102.366	65.390	72.785
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	94.000	63.553	69.642
Rata-rata MPP (000 Rp)	8.366	1.838	3.143
Rasio Marjin (%)	8,90	2,89	4,51

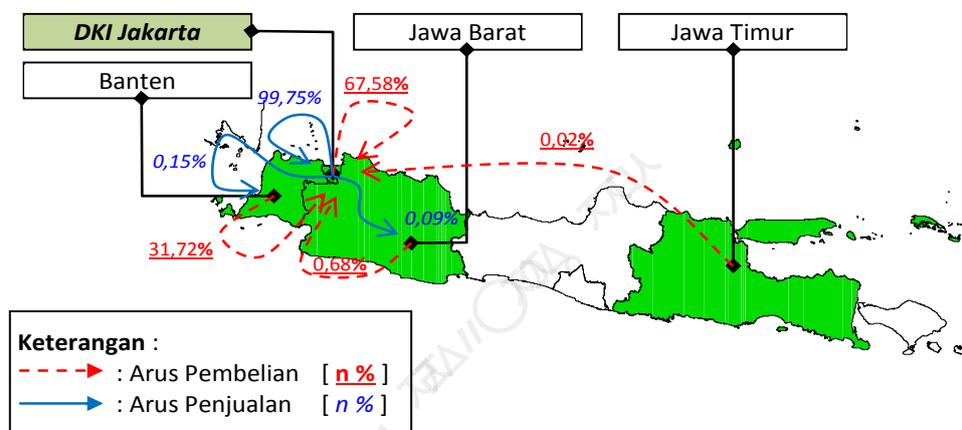
Pedagang besar dan pedagang eceran tepung terigu di Provinsi Kepulauan Riau masing-masing mengambil keuntungan rata-rata sebesar 8,90 persen dan 2,89 persen dengan rata-rata MPP untuk pedagang besar mencapai Rp8,37 juta dan Rp1,84 juta untuk pedagang eceran. Sehingga, rata-rata MPP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp3,14 juta dengan rasio marjin sebesar 4,51 persen. Selengkapnya MPP tepung terigu di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel 13 diatas.

2.13 Provinsi DKI Jakarta

Wilayah cakupan survei di Provinsi DKI Jakarta yaitu Kota Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Sebanyak 99 sampel pedagang tepung terigu berada di seluruh wilayah cakupan survei dan 1 sampel produsen tepung terigu di Kota Jakarta Utara.

2.13.1 Peta Distribusi

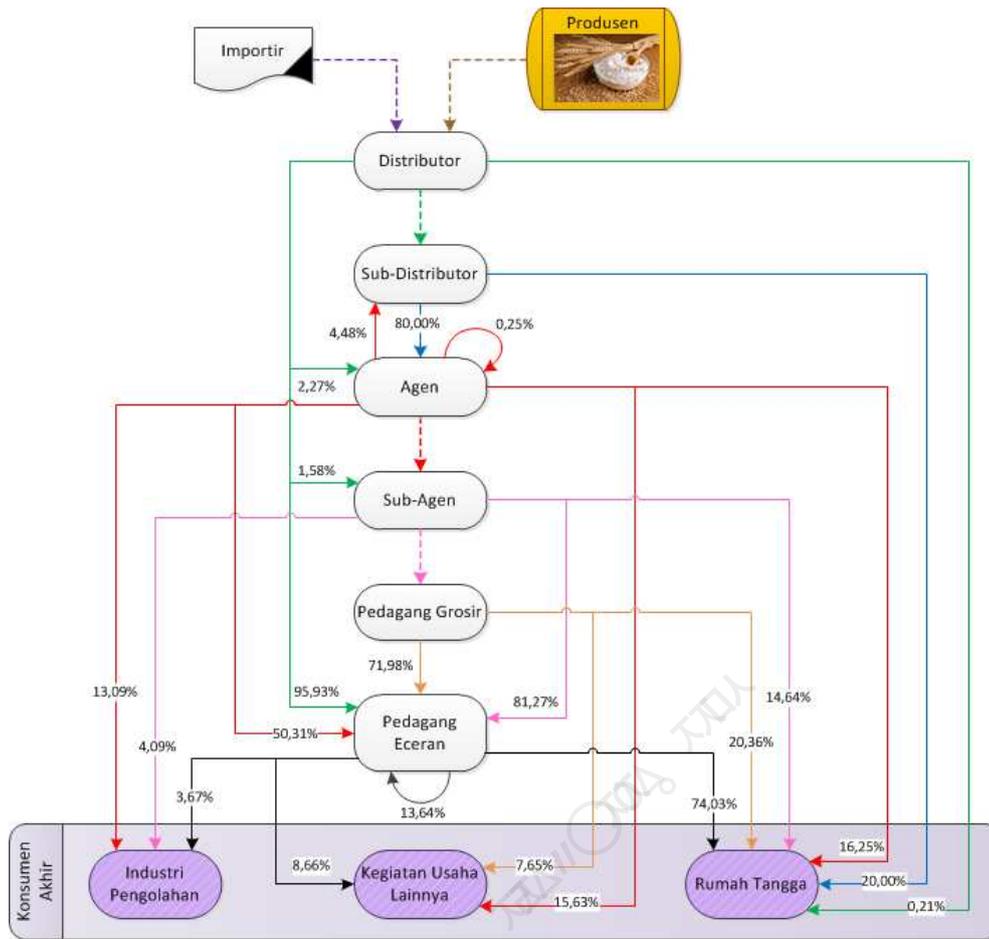
Berdasarkan hasil survei, data yang kita terima hanya dari pedagang, sedangkan produsen yang berada di Kota Jakarta Utara sampai tulisan ini dibuat *non response*. Sebagai daerah yang memiliki industri tepung terigu terbesar di Indonesia, yang produksinya dikirim ke semua wilayah di Indonesia. Pedagang terigu di DKI Jakarta mendapat pasokan dari dalam wilayah DKI Jakarta sebesar 67,58 persen. Pasokan tepung terigu di DKI Jakarta juga berasal dari pedagang di luar DKI Jakarta seperti dari Provinsi Banten sekitar 31 persen juga sebagian kecil dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Tepung terigu tersebut di pasarkan hampir seluruhnya ke wilayah DKI Jakarta sebesar 99,75 persen, sisanya ke Jawa Barat dan Banten. Selengkapnya peta distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar 25.



Gambar 25. Peta Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi DKI Jakarta

2.13.2 Pola Distribusi

Pola saluran distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi DKI Jakarta disajikan pada gambar diatas. Berdasarkan hasil survei jalur distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi DKI Jakarta dimulai dari distributor yang mendapat pasokan terigu sebagian besar dari sesama distributor (56,86%), importir (37,92%) dan sisanya produsen. Komoditi tersebut kemudian disalurkan lagi sebagian besar ke pedagang eceran sebesar 95,93 persen, sisanya ke agen, sub agen, dan rumah tangga. Pola yang sama juga dilakukan untuk pedagang besar lainnya seperti sub distributor, agen, sub agen, dan pedagang grosir sebagian besar dijual kembali ke pedagang eceran, sisanya ke konsumen akhir.



Gambar 26. Pola Distribusi Perdagangan Tepung terigu di Provinsi DKI Jakarta

2.13.3 Marjin Perdagangan dan Pengangkutan

Pedagang besar dan pedagang eceran tepung terigu di Provinsi DKI Jakarta masing-masing mengambil keuntungan rata-rata sebesar 9,51 persen dan 15,17 persen dengan rata-rata MPP untuk pedagang besar mencapai Rp38,15 juta dan Rp4,61 juta untuk pedagang eceran. sehingga, rata-rata MPP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp16,93 juta dengan rasio marjin sebesar 10,17 persen. Selengkapnya MPP tepung terigu di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Tepung terigu di Provinsi DKI Jakarta

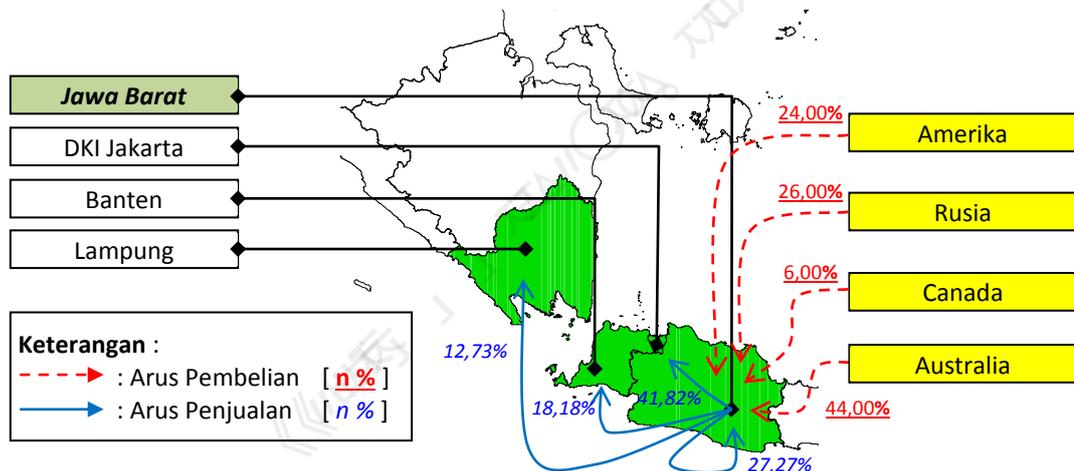
Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	439.151	34.960	183.439
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	401.004	30.354	166.511
Rata-rata Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (000 Rp)	38.146	4.606	16.927
Rasio Marjin (%)	9,51	15,17	10,17

2.14 Provinsi Jawa Barat

Wilayah cakupan survei di Provinsi Jawa Barat yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Tasikmalaya. Sebanyak 87 sampel pedagang tepung terigu berada di seluruh wilayah cakupan survei dan 3 sampel produsen tepung terigu di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

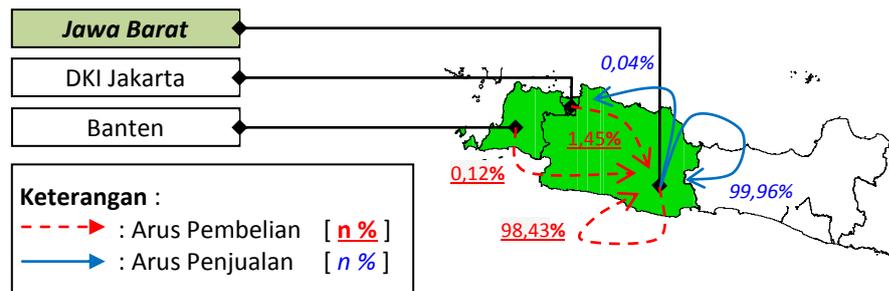
2.14.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, produsen tepung terigu di Provinsi Jawa Barat memperoleh bahan baku gandum sebagai bahan baku utama tepung terigu terbesar dari negara Australia (44,00%), Rusia (26,00%), USA (24,00%), dan sisanya Canada (6,00%). Tepung terigu tersebut di kirim untuk memenuhi kebutuhan di wilayah DKI Jakarta (41,82%), Jawa Barat (27,27%), Banten (18,18%), dan sisanya Lampung (12,73%). Peta wilayah penjualan produksi komoditi tepung terigu di Provinsi Jawa Barat secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 27.



Gambar 27. Peta Penjualan Produksi Tepung Terigu di Provinsi Jawa Barat

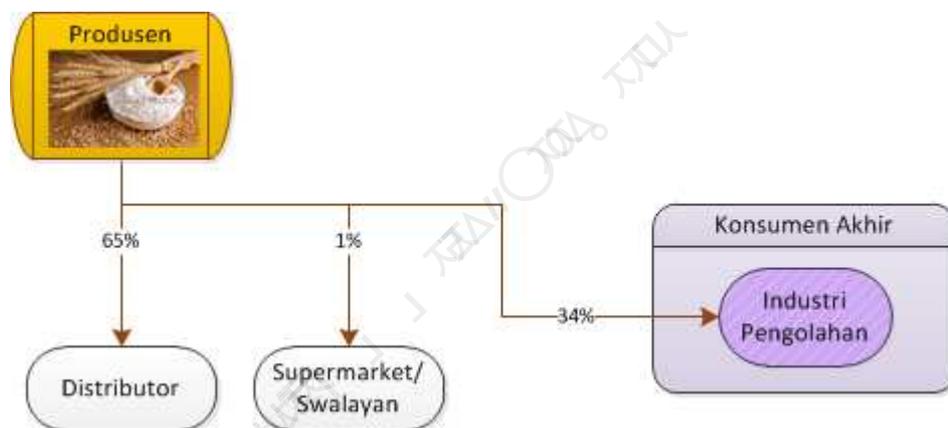
Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa pedagang tepung terigu mendapat pasokan terbesar dari dalam Provinsi Jawa Barat sekitar 98 persen lebih, sisanya dari DKI Jakarta dan Banten. Tepung terigu tersebut selanjutnya dijual pedagang hampir seluruhnya ke dalam Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 99,96 persen, sisanya ke DKI Jakarta. Wilayah pasokan dan penjualan perdagangan komoditi tepung terigu di Provinsi Jawa Barat ditunjukkan pada gambar peta distribusi perdagangan di bawah ini.



Gambar 28. Peta Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Jawa Barat

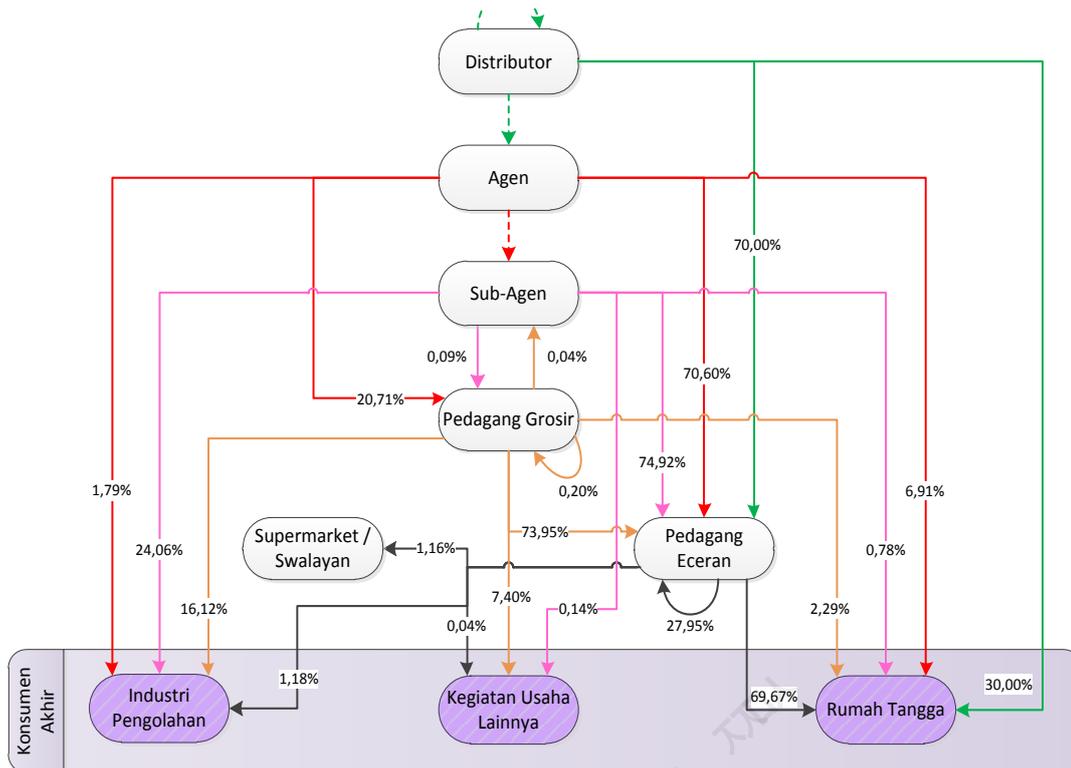
2.14.2 Pola Distribusi

Pola penjualan produksi untuk produsen tepung terigu di Provinsi Jawa Barat, sebagian besar ke distributor sebesar 65,00 persen, industri pengolahan 34,00 persen, sisanya ke supermarket/swalayan 1,00 persen. Selengkapnya pola penjualan produksi tepung terigu di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 29.



Gambar 29. Pola Penjualan Produksi Tepung Terigu di Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil survei untuk jalur distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Jawa Barat dimulai dari pedagang pada tingkat distributor yang mendapatkan pasokan tepung terigu dari sesama distributor. Penjualannya menggunakan jalur yang pendek melalui pengecer (70%) dan sisanya ke rumah tangga. Selain distributor jalur distribusinya masih melalui pedagang ditingkat agen, sub agen, dan pedagang grosir. Sebagian besar pedagang besar tersebut menjual ke pengecer dan sisanya ke industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, konsumen rumah tangga. Pola saluran distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Jawa Barat disajikan pada gambar berikut:



Gambar 30. Pola Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Jawa Barat

2.14.3 Marjin Perdagangan dan Pengangkutan

Tabel 15. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Tepung Terigu di Provinsi Jawa Barat

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	1.621.851	73.500	1.141.328
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	1.591.006	67.477	1.118.187
Rata-rata MPP (000 Rp)	30.845	6.022	23.141
Rasio Marjin (%)	1,94	8,92	2,07

Pedagang besar dan pedagang eceran tepung terigu di Provinsi Jawa Barat masing-masing mengambil keuntungan rata-rata sebesar 1,94 persen dan 8,92 persen dengan rata-rata MPP untuk pedagang besar mencapai Rp30,84 juta dan Rp6,02 juta untuk pedagang eceran. Sehingga, rata-rata MPP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp23,14 juta dengan rasio marjin sebesar 2,07 persen. Selengkapnya MPP tepung terigu di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 15.

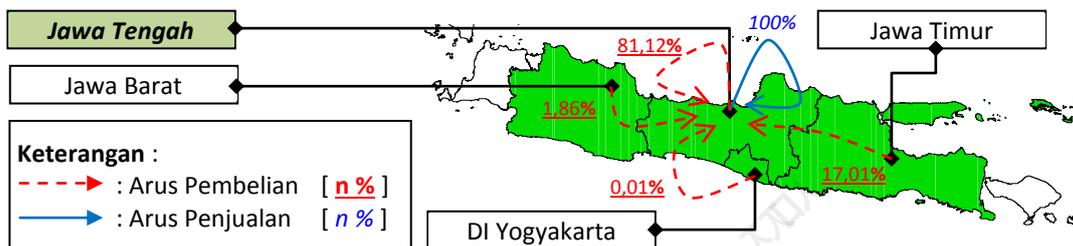
2.15 Provinsi Jawa Tengah

Wilayah cakupan survei di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Rembang, Kabupaten Jepara,

abupaten Demak, Kabupaten Brebes, Kota Surakarta, dan Kota Semarang. Sebanyak 48 sampel pedagang tepung terigu berada di seluruh wilayah cakupan survei.

2.15.1 Peta Distribusi

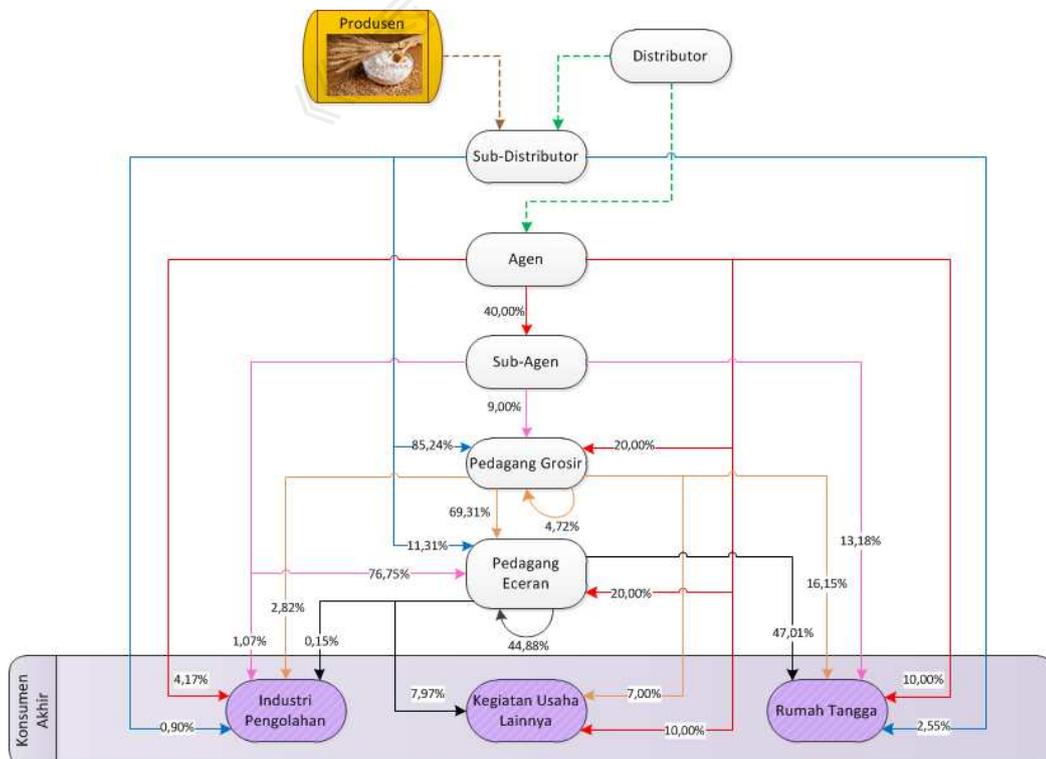
Hasil survei terhadap beberapa responden pedagang tepung terigu di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa tepung terigu yang beredar di pasaran berasal dari dalam wilayah sekitar 81,12 persen dan luar wilayah Provinsi Jawa Tengah seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta. Sedangkan penjualannya hanya untuk wilayah di dalam Provinsi Jawa Tengah. Hal ini tercermin dari peta distribusi perdagangan komoditi tepung terigu di Provinsi Jawa Tengah pada gambar berikut ini.



Gambar 31. Peta Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Jawa Tengah

2.15.2 Pola Distribusi

Pola saluran distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Jawa Tengah disajikan pada gambar 32.



Gambar 32. Pola Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil survei jalur distribusi tepung terigu juga menggunakan jalur pedagang besar dimulai dari sub distributor yang mendapat pasokan dari produsen dan distributor. Penjualannya paling besar ke pedagang grosir sekitar 85 persen lebih. Sisanya ke konsumen akhir. Selain itu pedagang besar lainnya seperti agen, sub agen, dan pedagang grosir penjualan tepung terigu sebagian besar ke pedagang eceran sisanya ke industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya dan rumah tangga.

2.15.3 Marjin Perdagangan dan Pengangkutan

Pedagang besar dan pedagang eceran tepung terigu di Provinsi Jawa Tengah masing-masing mengambil keuntungan rata-rata sebesar 5,20 persen dan 14,91 persen dengan rata-rata MPP untuk pedagang besar mencapai Rp92,31 juta dan Rp17,57 juta untuk pedagang eceran. Sehingga, rata-rata MPP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp55,85 juta dengan rasio marjin sebesar 5,78 persen. Selengkapnya MPP tepung terigu di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Tepung Terigu di Provinsi Jawa Tengah

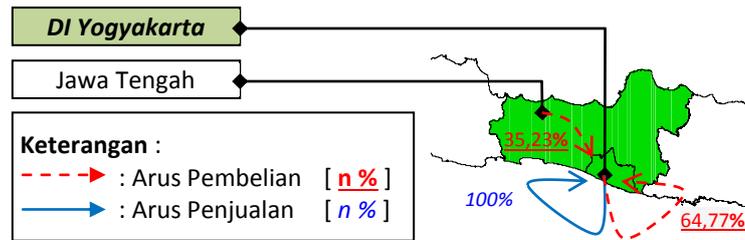
Uraian (1)	Pedagang Besar (PB) (2)	Pedagang Eceran (PE) (3)	PB+PE (4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	1.868.263	135.418	1.022.973
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	1.775.951	117.847	967.120
Rata-rata MPP (000 Rp)	92.312	17.572	55.853
Rasio Marjin (%)	5,20	14,91	5,78

2.16 Provinsi D I Yogyakarta

Wilayah cakupan survei di Provinsi DI Yogyakarta yaitu Kabupaten Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta. Sebanyak 10 sampel pedagang tepung terigu berada di seluruh wilayah cakupan survei.

2.16.1 Peta Distribusi

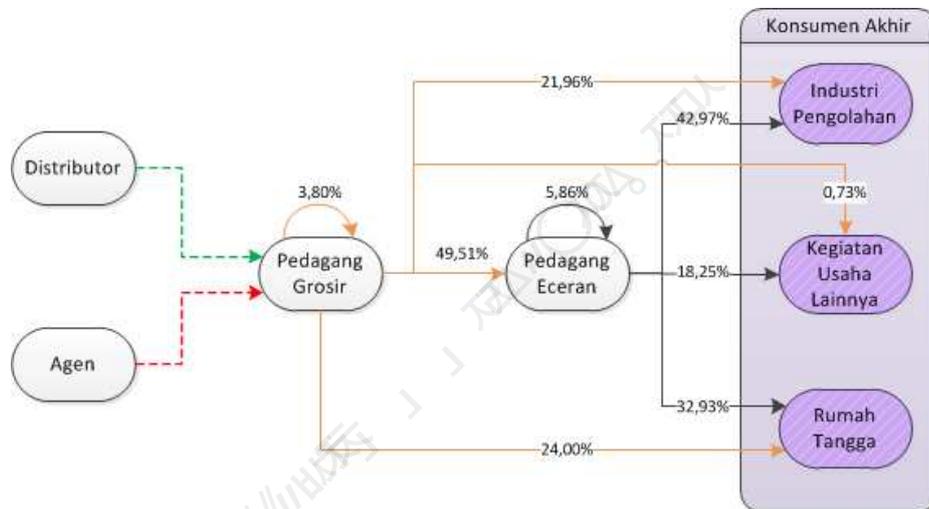
Berdasarkan hasil survei wilayah pasokan komoditi tepung terigu yang dijual pedagang di Provinsi DI Yogyakarta sebagian besar dari dalam wilayah sendiri yaitu sebesar 64,77 persen, sisanya dari wilayah yang terdekat yaitu Jawa Tengah sebesar 35,23 persen. Pasokan tepung terigu ini dijual seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan di dalam wilayah DI Yogyakarta. Hal ini tercermin dari peta distribusi perdagangan komoditi tepung terigu di Provinsi DI Yogyakarta pada gambar berikut ini.



Gambar 33. Peta Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi DI Yogyakarta

2.16.2 Pola Distribusi

Pola saluran distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi DI Yogyakarta disajikan pada Gambar berikut:



Gambar 34. Pola Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi DI Yogyakarta

Dari hasil survei terhadap distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi DI Yogyakarta diketahui dimulai dari pedagang grosir yang mendapat pasokan dari distributor dan agen, selanjutnya tepung terigu dijual kembali melalui pedagang eceran sebesar 49,51 persen, sisanya ke sesama grosir, dan konsumen akhir. Pada tingkat pengecer penjualan terbesar ke industri pengolahan sebesar 42,97 persen, sisa lainnya ke rumah tangga, kegiatan usaha lainnya dan sesama pengecer.

2.16.3 Marjin Perdagangan dan Pengangkutan

Pedagang besar dan pedagang eceran tepung terigu di Provinsi DI Yogyakarta masing-masing mengambil keuntungan rata-rata sebesar 5,08 persen dan 8,05 persen dengan rata-rata MPP untuk pedagang besar mencapai Rp9,28 juta dan Rp4,53 juta untuk pedagang eceran. Sehingga, rata-rata MPP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp6,43 juta dengan rasio marjin sebesar 6,01 persen. Selengkapnya MPP tepung terigu di Provinsi DI Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 17.

Tabel 17.
Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Tepung Terigu di Provinsi DI Yogyakarta

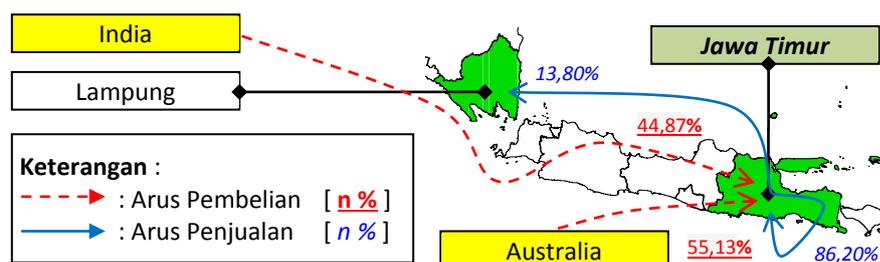
Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	192.133	60.794	113.330
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	182.853	56.267	106.901
Rata-rata MPP (000 Rp)	9.280	4.527	6.428
Rasio Marjin (%)	5,08	8,05	6,01

2.17 Provinsi Jawa Timur

Wilayah cakupan survei di Provinsi Jawa Timur yaitu Kabupaten Kediri,, Kabupaten Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jombang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya. Sebanyak 81 sampel pedagang tepung terigu berada di seluruh wilayah cakupan survei dan 10 sampel produsen tepung terigu di Kabupaten Sidoarjo, dan Gresik.

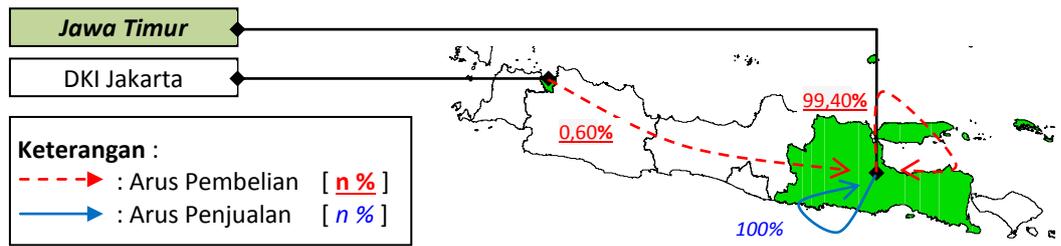
2.17.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, produsen tepung terigu di Provinsi Jawa Timur memperoleh bahan baku gandum sebagai bahan baku utama tepung terigu terbesar dari negara Australia sebesar 55,13 persen, dan sisanya dari India sebesar 44,87 persen. Tepung terigu tersebut di jual untuk memenuhi kebutuhan di wilayah sendiri sebesar 86,20 persen, dan sisanya di kirim untuk pedagang di Provinsi Lampung. Peta wilayah penjualan produksi komoditi tepung terigu di Provinsi Jawa Timur secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 35. Peta Penjualan Produksi Tepung Terigu di Provinsi Jawa Timur

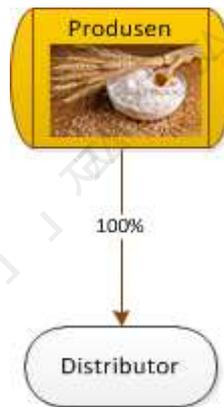
Berdasarkan hasil survei, wilayah pembelian komoditi tepung terigu yang dilakukan pedagang di Provinsi Jawa Timur sebagian besar masih dari dalam wilayah sendiri yaitu sebesar 99,40 persen sisanya dari DKI Jakarta. Pasokan tepung terigu tersebut seluruhnya hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumen di wilayah Provinsi Jawa Timur.



Gambar 36. Peta Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Jawa Timur

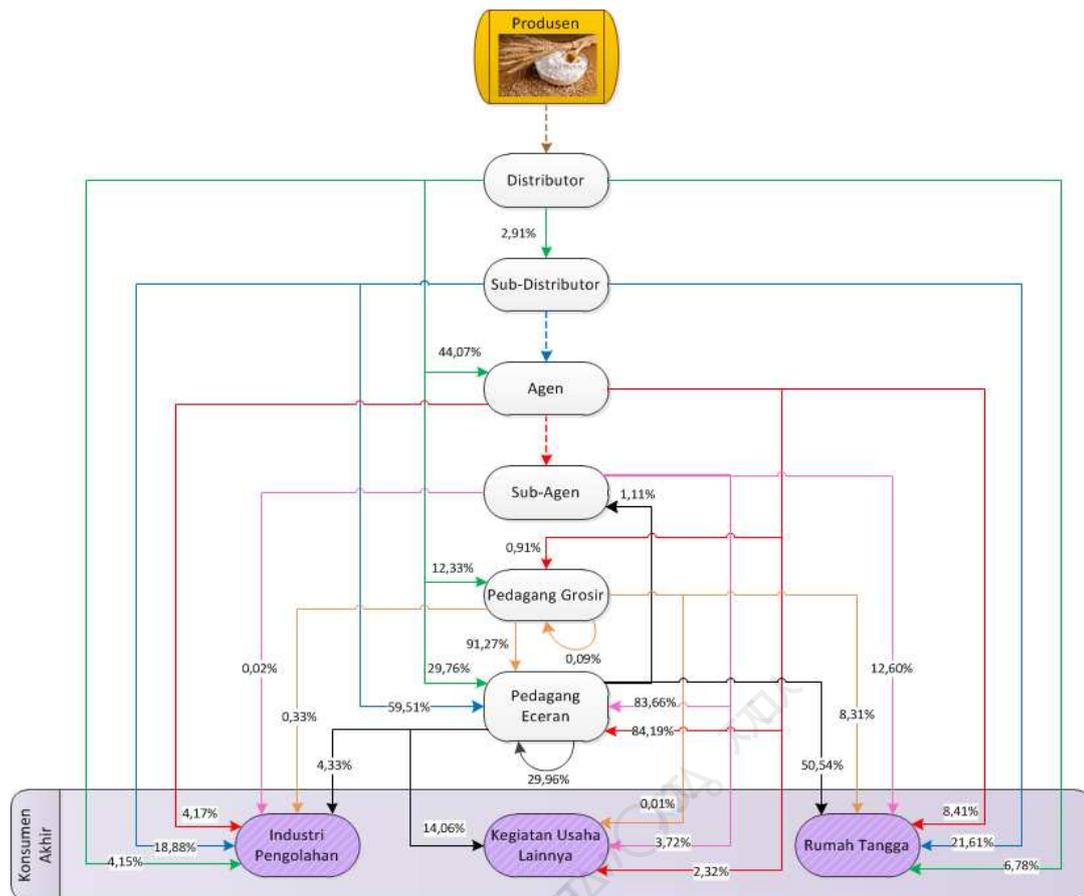
2.17.2 Pola Distribusi

Pola penjualan produksi untuk produsen tepung terigu di Provinsi Jawa Timur, seluruhnya dijual melalui distributor. Selengkapnya pola penjualan produksi tepung terigu di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Gambar 37.



Gambar 37. Pola Penjualan Produksi Tepung Terigu di Provinsi Jawa Timur

Jalur distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Jawa Timur dimulai dari distributor yang mendapatkan pasokan langsung dari produsen dan sesama distributor, komoditi tersebut akan dijual kembali melalui agen (44,07%), pedagang eceran (29,76%), sisanya ke sub distributor, pedagang grosir, industri pengolahan, dan rumah tangga. Pedagang besar lainnya yaitu sub distributor menjual lagi sebagian besar ke pedagang eceran sebesar 59,51 persen, sisanya ke industri pengolahan dan rumah tangga. Agen, sub agen, dan pedagang grosir juga berperan dalam distribusi tepung terigu, dimana penjualan terbesar juga ke pedagang eceran, dan sisanya ke konsumen akhir. Pola saluran distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Jawa Timur disajikan pada Gambar berikut:



Gambar 38. Pola Distribusi Perdagangan Tepung terigu di Provinsi Jawa Timur

2.17.3 Marjin Perdagangan dan Pengangkutan

Pedagang besar dan pedagang eceran tepung terigu di Provinsi Jawa Timur masing-masing mengambil keuntungan rata-rata sebesar 3,73 persen dan 4,36 persen dengan rata-rata MPP untuk pedagang besar mencapai Rp33,73 juta dan Rp8,36 juta untuk pedagang eceran. Sehingga, rata-rata MPP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp23,27 juta dengan rasio marjin sebesar 3,81 persen. Selengkapnya MPP tepung terigu di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Tepung Terigu di Provinsi Jawa Timur

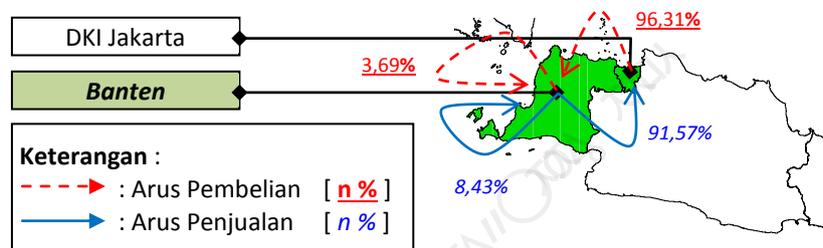
Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	936.293	200.114	633.642
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	902.622	191.750	610.375
Rata-rata MPP (000 Rp)	33.672	8.363	23.267
Rasio Marjin (%)	3,73	4,36	3,81

2.18 Provinsi Banten

Wilayah cakupan survei di Provinsi Banten yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, dan Kota Serang. Sebanyak 21 sampel pedagang tepung terigu berada di seluruh wilayah cakupan survei dan 5 sampel produsen tepung terigu di Kota Tangerang dan Kota Cilegon.

2.18.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei pedagang besar tepung terigu di wilayah Provinsi Banten melakukan pembelian tepung terigu terbesar berasal dari produsen di DKI Jakarta sebesar 96,31 persen, dan sisanya dari wilayahnya sendiri sekitar 3 persen lebih. Penjualannya banyak untuk memenuhi konsumen di DKI Jakarta sekitar 92 persen, dan sisanya untuk memenuhi kebutuhan di dalam wilayahnya sendiri.

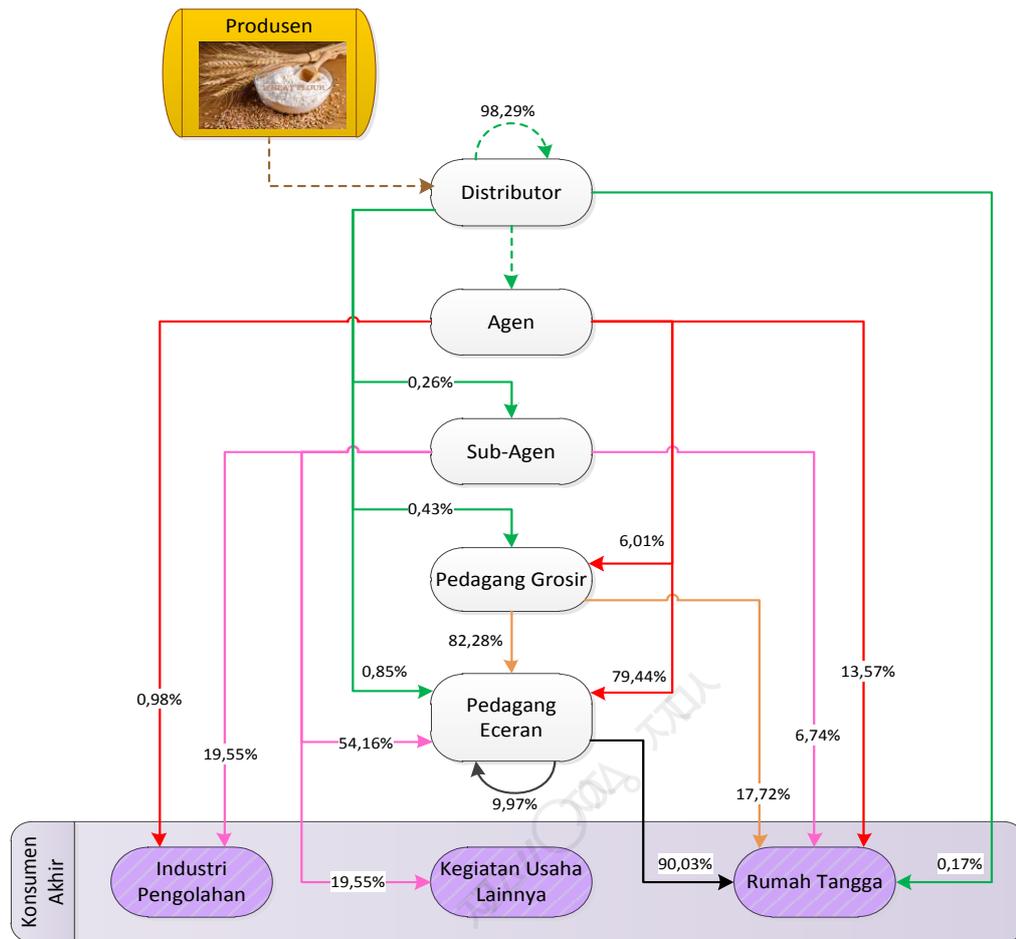


Gambar 39. Peta Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Banten

2.18.2 Pola Distribusi

Jalur distribusi dimulai dari pedagang distributor yang mendapat pasokan dari produsen, selain itu sub agen dan pedagang grosir juga mendapat pasokan dari produsen. Berdasarkan hasil survei distributor menjual sebagian besar barang dagangannya ke sesama distributor (98,29%), sisanya ke sub agen, grosir, pengecer dan rumah tangga. Pedagang besar seperti agen, sub agen, dan pedagang grosir menjual tepung terigu paling banyak ke pedagang eceran, supaya bisa di salurkan sampai ke konsumen akhir.

Pola saluran distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Banten disajikan pada Gambar berikut:



Gambar 40. Pola Distribusi Perdagangan Tepung terigu di Provinsi Banten

2.18.3 Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Tabel 19. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Tepung Terigu di Provinsi Banten

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	9.391.018	57.541	7.955.099
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	7.440.400	47.841	6.303.083
Rata-rata MPP (000 Rp)	1.950.618	9.700	1.652.016
Rasio Marjin (%)	26,22	20,28	26,21

Pedagang besar dan pedagang eceran tepung terigu di Provinsi Banten masing-masing mengambil keuntungan rata-rata sebesar 26,22 persen dan 20,28 persen dengan rata-rata MPP untuk pedagang besar mencapai Rp1,95 milyar dan Rp9,70 juta untuk pedagang eceran. Sehingga, rata-rata MPP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp1,65 milyar dengan rasio marjin sebesar 26,21 persen. Selengkapnya MPP tepung terigu di Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 19.

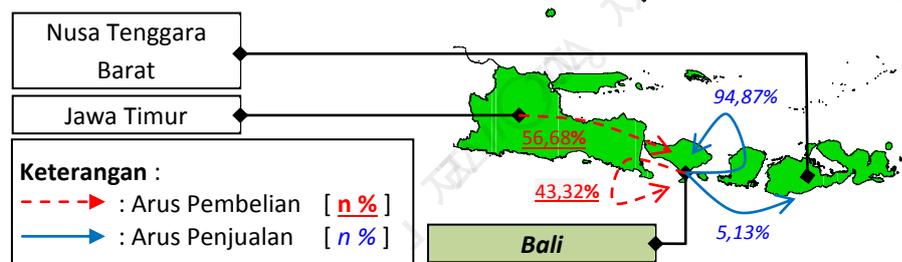
2.19 Provinsi Bali

Wilayah cakupan survei di Provinsi Bali yaitu Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, dan Kota Denpasar. Sebanyak 20 sampel pedagang tepung terigu berada di seluruh wilayah cakupan survei .

2.19.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei pedagang besar tepung terigu di wilayah Provinsi Bali melakukan pembelian tepung terigu terbesar berasal dari distributor di Jawa Timur sebesar 56,68 persen, dan sisanya dari wilayahnya sendiri sekitar 43,32 persen lebih. Penjualannya sebagian besar untuk memenuhi konsumen di wilayah Bali sendiri sebesar 94,87 persen, dan sisanya dijual ke Nusa Tenggara Barat.

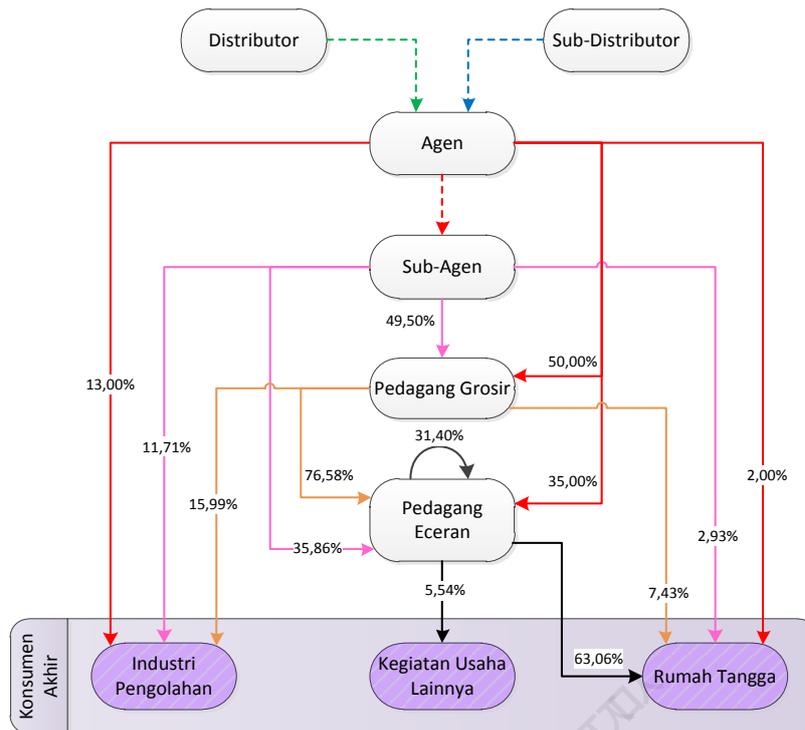
Peta saluran distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Bali disajikan pada Gambar berikut:



Gambar 41. Peta Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Bali

2.19.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei terhadap distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Bali dimulai dari agen yang mendapat pasokan dari distributor, selanjutnya tepung terigu dijual kembali melalui pedagang grosir sebesar 50,00 persen, sisanya ke pedagang eceran, industri pengolahan dan rumah tangga. Di temui juga sub agen yang mendapat pasokan dari distributor yang menjual kembali barang dagangannya sebagian besar ke pedagang grosir sebesar 49,50 persen , sisanya ke konsumen akhir. Sementara itu pedagang grosir menjual sebagian besar ke pedagang eceran, dan sisanya ke konsumen akhir. Pola saluran distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Bali disajikan pada gambar berikut:



Gambar 42. Pola Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Bali

2.19.3 Marjin Perdagangan dan Pengangkutan

Tabel 20. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Tepung Terigu di Provinsi Bali

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	450.939	17.605	277.606
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	430.822	16.180	264.965
Rata-rata MPP (000 Rp)	20.117	1.426	12.641
Rasio Marjin (%)	4,67	8,81	4,77

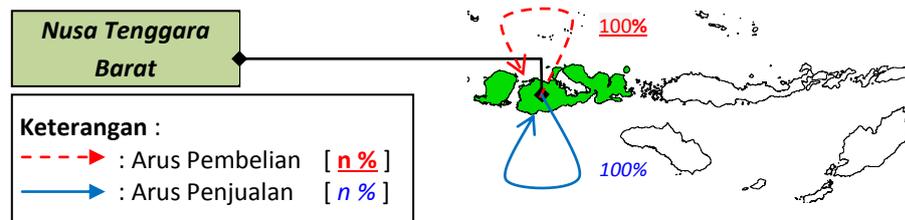
Pedagang besar dan pedagang eceran tepung terigu di Provinsi Bali masing-masing mengambil keuntungan rata-rata sebesar 4,67 persen dan 8,81 persen dengan rata-rata MPP untuk pedagang besar mencapai Rp20,12 juta dan Rp1,43 juta untuk pedagang eceran. Sehingga, rata-rata MPP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp12,64 juta dengan rasio marjin sebesar 4,77 persen. Selengkapnya MPP tepung terigu di Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel 20.

2.20 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Wilayah cakupan survei di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Bima, dan Kota Mataram. Sebanyak 12 sampel pedagang tepung terigu berada di seluruh wilayah cakupan survei.

2.20.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei pedagang besar tepung terigu di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan pembelian tepung terigu terbesar berasal dari sub agen dari wilayah sendiri. Penjualannya seluruhnya untuk memenuhi konsumen di wilayah Nusa Tenggara Barat sendiri. Peta saluran distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi NTB disajikan pada gambar berikut:



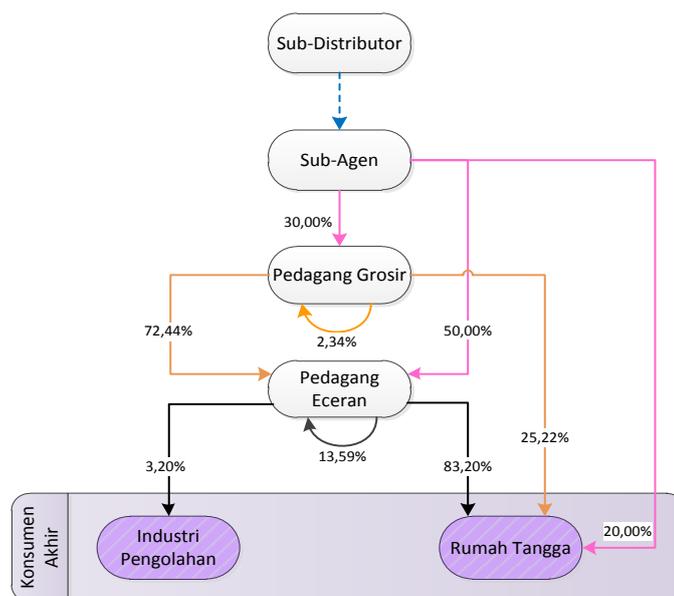
Gambar 43. Peta Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Nusa Tenggara Barat

2.20.2 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei di Nusa Tenggara Barat jalur distribusi perdagangan tepung terigu di tingkat sub agen yang mendapat pasokan dari sub distributor untuk dijual lagi ke pedagang eceran (50,00%), grosir (30,00%), dan rumah tangga (20,00%).

Sementara pedagang grosir mendapat pasokan tepung terigu dari distributor, untuk dijual ke pedagang eceran (72,44%), sisanya ke sesama pedagang grosir dan rumah tangga. Pengecer menjual kembali ke konsumen akhir seperti industri pengolahan, dan rumah tangga.

Pola saluran distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Nusa Tenggara Barat disajikan pada gambar berikut:



Gambar 44. Pola Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Nusa Tenggara Barat

2.20.3 Marjin Perdagangan dan Pengangkutan

Pedagang besar dan pedagang eceran tepung terigu di Provinsi NTB masing-masing mengambil keuntungan rata-rata sebesar 4,57 persen dan 4,40 persen dengan rata-rata MPP untuk pedagang besar mencapai Rp15,12 juta dan Rp0,68 juta untuk pedagang eceran. Sehingga, rata-rata MPP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp12,71 juta dengan rasio marjin sebesar 4,57 persen. Selengkapnya MPP tepung terigu di Provinsi NTB dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Tepung Terigu di Provinsi NTB

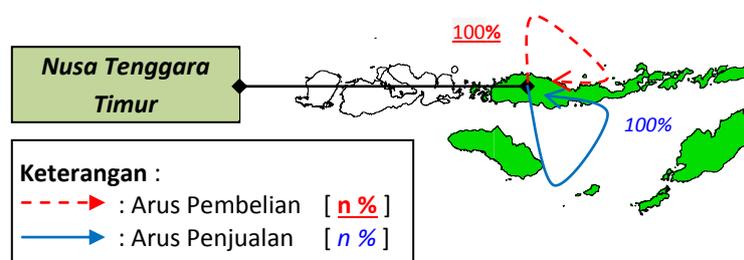
Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	345.669	16.130	290.746
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	330.551	15.450	278.035
Rata-rata MPP (000 Rp)	15.118	680	12.711
Rasio Marjin (%)	4,57	4,40	4,57

2.21 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Wilayah cakupan survei di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yaitu Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, dan Kota Kupang, dengan alokasi sampel pedagang tepung terigu sebanyak 12 sampel yang berada di seluruh wilayah cakupan survei .

2.21.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, pedagang tepung terigu di Provinsi NTT mendapat pasokan dari wilayah sendiri, kemudian di jual seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan di wilayah sendiri. Selengkapnya peta saluran distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi NTT disajikan pada Gambar berikut:

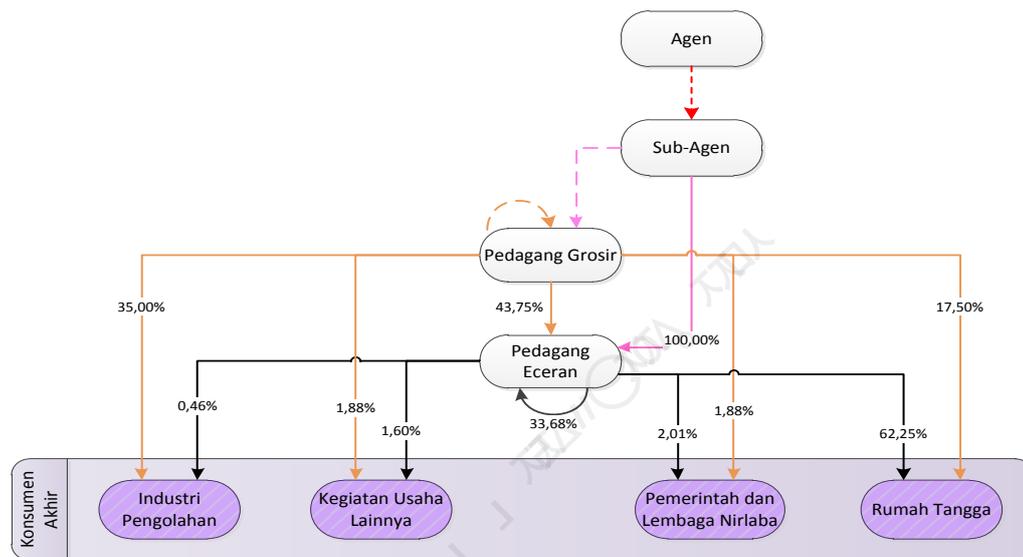


Gambar 45. Peta Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Nusa Tenggara Timur

2.21.2 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei jalur distribusi tepung terigu di Provinsi NTT di mulai pada tingkat sub agen yang mendapat pasokan dari agen, untuk dijual seluruhnya ke pedagang eceran (100,00%), selain itu pedagang grosir yang mendapat pasokan sub agen dan sesama pedagang grosir menjual terbesar ke pedagang eceran (43,75%), sisanya industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, pemerintah dan lembaga nirlaba, serta rumah tangga. Pedagang eceran menjual tepung terigu terbesar ke rumah tangga (62,25%), sesama pedagang eceran, dan konsumen akhir.

Pola saluran distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Nusa Tenggara Timur disajikan pada Gambar berikut:



Gambar 46. Pola Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Nusa Tenggara Timur

2.21.3 Marjin Perdagangan dan Pengangkutan

Berdasarkan tabel di bawah ini, diperoleh informasi pedagang besar dan pedagang eceran tepung terigu di Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing mengambil keuntungan rata-rata sebesar 6,74persen dan 3,77 persen dengan rata-rata MPP untuk pedagang besar mencapai Rp5,02 juta dan Rp2,11 juta untuk pedagang eceran. Sehingga, rata-rata MPP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp3,20 juta dengan rasio marjin sebesar 5,09 persen. Selengkapnya MPP tepung terigu di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Tepung terigu di Provinsi NTT

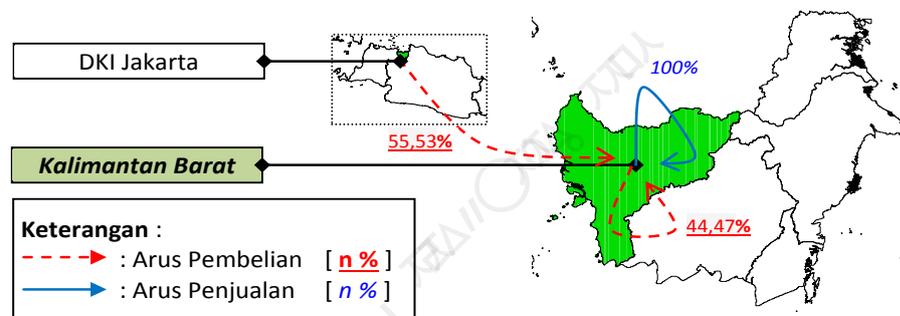
Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	79.417	58.037	66.054
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	74.400	55.928	62.855
Rata-rata MPP (000 Rp)	5.017	2.109	3.199
Rasio Marjin (%)	6,74	3,77	5,09

2.22 Provinsi Kalimantan Barat

Wilayah cakupan survei di Provinsi Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang, dengan alokasi pedagang tepung terigu sebanyak 14 sampel yang berada di seluruh wilayah cakupan survei.

2.22.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei pedagang besar tepung terigu di wilayah Provinsi Kalimantan Barat melakukan pembelian tepung terigu terbesar berasal dari luar wilayah Kalimantan Barat yaitu dari DKI Jakarta sebesar 55,53 persen, dan sisanya dari pedagang di wilayah sendiri sekitar 44 persen. Penjualannya seluruhnya untuk memenuhi konsumen di wilayah Kalimantan Barat sendiri. Peta saluran distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Kalimantan Barat disajikan pada Gambar berikut:

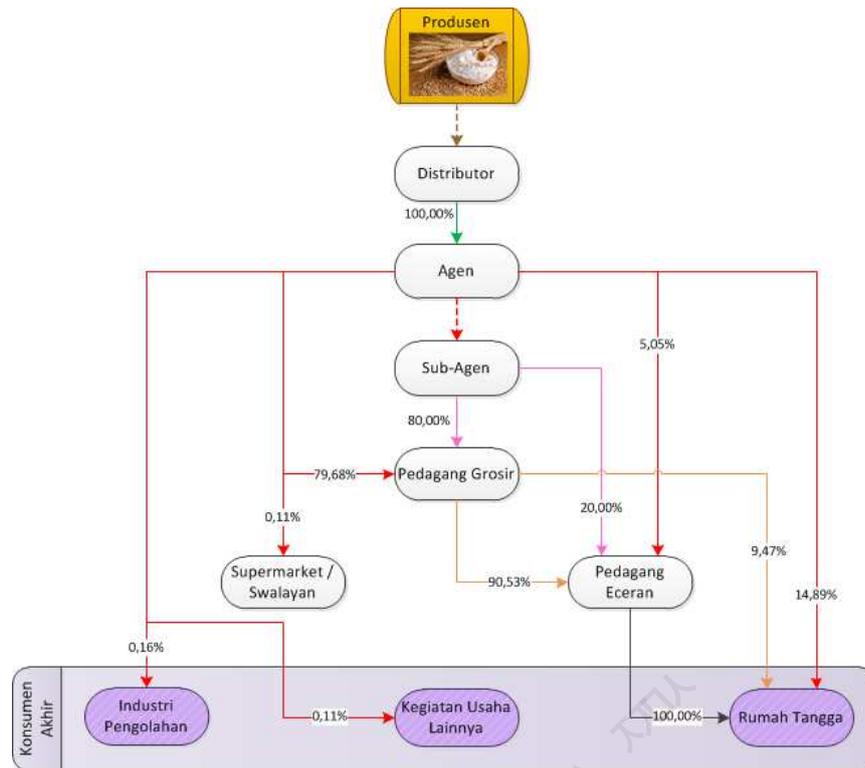


Gambar 47. Peta Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Kalimantan Barat

2.22.2 Pola Distribusi

Jalur distribusi perdagangan tepung terigu dimulai dari distributor yang mendapat pasokan dari produsen, kemudian dijual seluruhnya melalui agen, jalur berikutnya agen menjual ke pedagang grosir (79,68%), sisanya pedagang eceran, dan konsumen akhir.

Pada tingkat sub agen pedagang tepung terigu menjual pasokannya ke pedagang grosir sebesar 80,00 persen, sisanya ke pedagang eceran. Pedagang grosir menjual barang dagangannya sebagian besar ke pedagang eceran sekitar 90 persen lebih dan rumah tangga. Pola saluran distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Kalimantan Barat disajikan pada Gambar berikut:



Gambar 48. Pola Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Kalimantan Barat

2.22.3 Marjin Perdagangan dan Pengangkutan

Berdasarkan tabel di bawah ini, diperoleh informasi pedagang besar dan pedagang eceran tepung terigu di Provinsi Kalimantan Barat masing-masing mengambil keuntungan rata-rata sebesar 1,95 persen dan 14,00 persen dengan rata-rata MPP untuk pedagang besar mencapai Rp891,01 juta dan Rp1,70 juta untuk pedagang eceran. Sehingga, rata-rata MPP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp653,86 juta dengan rasio marjin sebesar 1,95 persen. Selengkapnya MPP tepung terigu di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel 23.

Tabel 23.
Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Tepung Terigu di Provinsi Kalimantan Barat

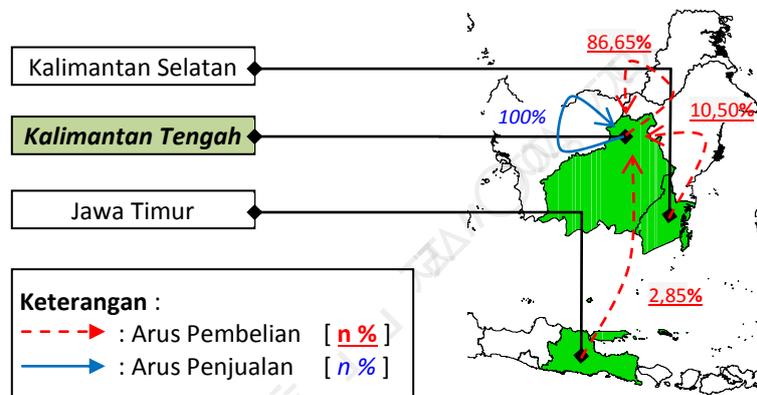
Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	46.654.254	13.816	34.216.804
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	45.763.245	12.120	33.562.945
Rata-rata MPP (000 Rp)	891.009	1.696	653.859
Rasio Marjin (%)	1,95	14,00	1,95

2.23 Provinsi Kalimantan Tengah

Wilayah cakupan survei di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Kota Waringin Timur dan Kota Palangkaraya. Sebanyak 12 sampel pedagang tepung terigu yang berada di seluruh wilayah cakupan survei.

2.23.1 Peta Distribusi

Pedagang tepung terigu di Kalimantan Tengah mendapat pasokan barang dagangannya sebagian dari pedagang di dalam wilayah sendiri yaitu sekitar 86 persen lebih, selain itu wilayah luar seperti Kalimantan Selatan dan Jawa Timur juga memasok masing-masing sebesar 10,50 persen dan 2,85 persen. Sementara itu pasokan tepung terigu tersebut di jual kembali seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan tepung terigu di dalam wilayah Kalimantan Tengah. Peta saluran distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada Gambar berikut:

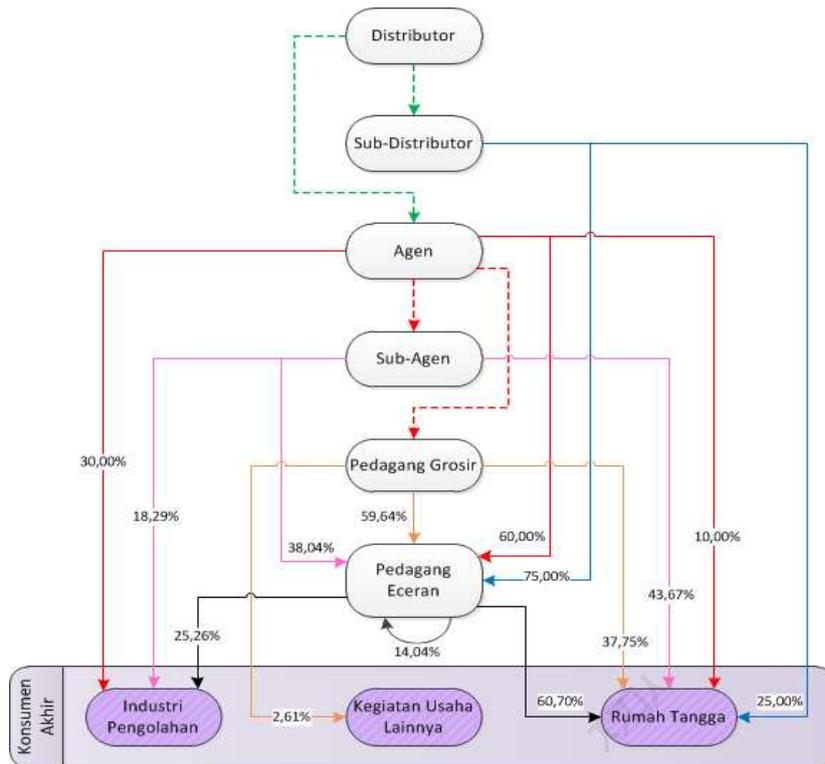


Gambar 49. Peta Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Kalimantan Tengah

2.23.2 Pola Distribusi

Jalur distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Kalimantan Tengah dimulai pedagang besar di tingkat sub distributor dan agen yang mendapat pasokan dari distributor, dari kedua kelembagaan tersebut sebagian besar untuk dijual kembali ke pedagang eceran masing-masing sebesar 75,00 persen dan 60,00 persen, sisanya ke konsumen akhir. Selain itu terdapat pula sub agen yang mendapat pasokan dari sub distributor untuk memenuhi kebutuhan para pedagang eceran dan konsumen akhir. Pada tingkat pedagang grosir penjualannya sebagian besar juga ke pedagang eceran sebesar 59,64 persen, kegiatan usaha lainnya seperti pedagang kue, pedagang gorengan serta rumah tangga.

Pola saluran distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada gambar berikut:



Gambar 50. Pola Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Kalimantan Tengah

2.23.3 Margin Perdagangan dan Pengangkutan

Berdasarkan tabel di bawah ini, diperoleh informasi pedagang besar dan pedagang eceran tepung terigu di Provinsi Kalimantan Tengah masing-masing mengambil keuntungan rata-rata sebesar 5,46 persen dan 24,67 persen dengan rata-rata MPP untuk pedagang besar mencapai Rp6,47 juta dan Rp7,28 juta untuk pedagang eceran. Sehingga, rata-rata MPP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp6,74 juta dengan rasio margin sebesar 7,58 persen. Selengkapannya MPP tepung terigu di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Tabel 24.

Tabel 24.

Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Tepung Terigu di Provinsi Kalimantan Tengah

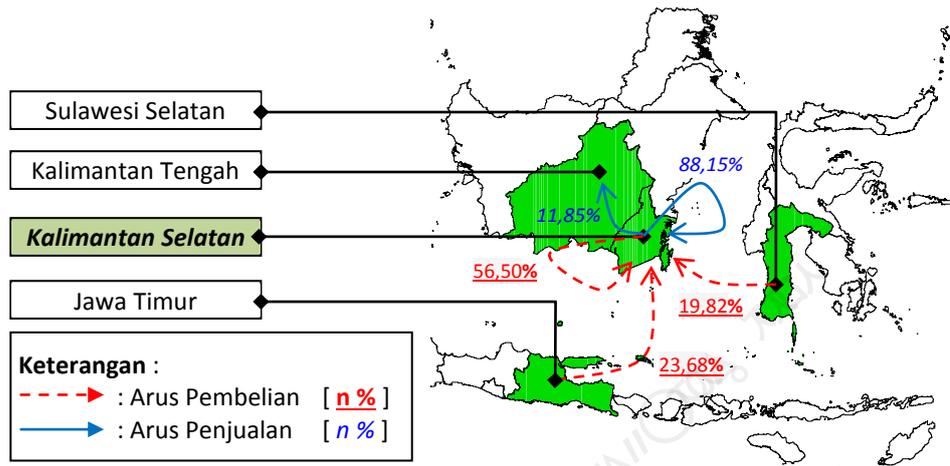
Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	125.020	36.764	95.601
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	118.552	29.489	88.865
Rata-rata Margin Perdagangan dan Pengangkutan (000 Rp)	6.467	7.275	6.736
Rasio Margin (%)	5,46	24,67	7,58

2.24 Provinsi Kalimantan Selatan

Wilayah cakupan survei di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Tabalong, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru. Sebanyak 12 sampel pedagang tepung terigu yang berada di seluruh wilayah cakupan survei.

2.24.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, para pedagang tepung terigu di wilayah Kalimantan Selatan mendapat pasokan barang dagangannya dari pedagang di wilayah sendiri sebesar 56,50 persen, sisanya di datangkan dari Jawa Timur 23,68 persen dan Sulawesi Selatan 19,82 persen. Pasokan tersebut sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan di dalam wilayah sendiri sebesar 88,15 persen, sisanya di kirim ke Kalimantan Tengah sebanyak 11,85 persen. Peta saluran distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Kalimantan Selatan disajikan pada Gambar berikut:

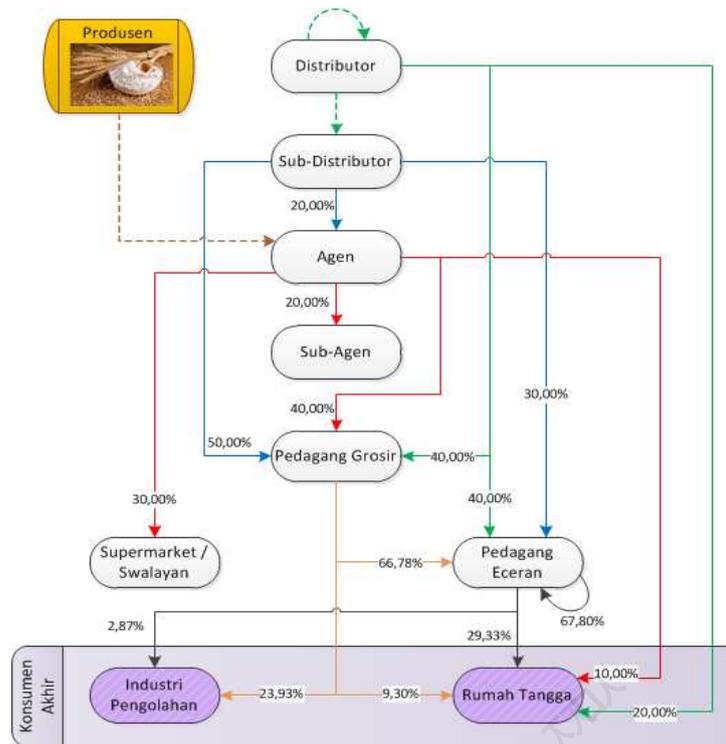


Gambar 51. Peta Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Kalimantan Selatan

2.24.2 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, jalur distribusi pedagang tepung terigu di mulai pada tingkat distributor yang mendapat barang dagangannya dari sesama distributor, penjualannya ke pedagang grosir dan pedagang eceran sama besar yaitu 40,00 persen, dan sisanya rumah tangga. Sub distributor juga memasok ke pedagang grosir sebesar 50,00 persen, sisanya pedagang eceran, dan agen. Selanjutnya agen juga menjual kembali barang dagangannya melalui pedagang grosir 40,00 persen, supermarket/swalayan 30,00 persen, sisanya melalui sub agen, dan rumah tangga.

Sedangkan pedagang di tingkat grosir mendapat pasokan langsung dari distributor dan agen untuk dijual sebagian besar ke pedagang eceran sebesar 66,78 persen, sisanya ke industri pengolahan, dan rumah tangga. Pedagang eceran menjual ke konsumen akhir. Pola saluran distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Kalimantan Selatan disajikan pada gambar berikut:



Gambar 52. Pola Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Kalimantan Selatan

2.24.3 Marjin Perdagangan dan Pengangkutan

Berdasarkan tabel di bawah ini, diperoleh informasi pedagang besar dan pedagang eceran tepung terigu di Provinsi Kalimantan Selatan masing-masing mengambil keuntungan rata-rata sebesar 1,60 persen dan 3,06 persen dengan rata-rata MPP untuk pedagang besar mencapai Rp33,27 juta dan Rp61,17 juta untuk pedagang eceran. Sehingga, rata-rata MPP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp40,25 juta dengan rasio marjin sebesar 1,96 persen. Selengkapnya MPP tepung terigu di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 25.

Tabel 25.
Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Tepung Terigu di Provinsi Kalimantan Selatan

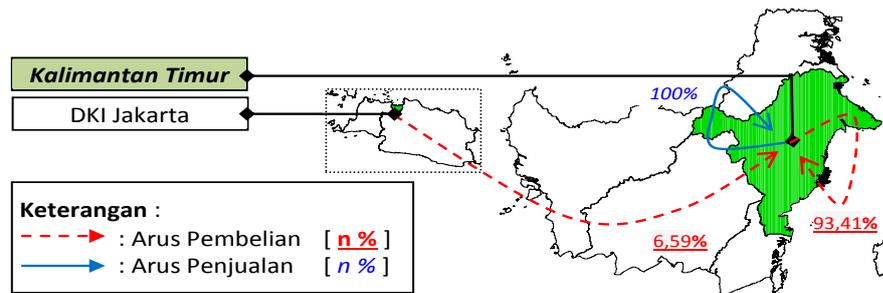
Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	2.111.628	2.059.931	2.098.704
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	2.078.355	1.998.758	2.058.456
Rata-rata MPP (000 Rp)	33.273	61.173	40.248
Rasio Marjin (%)	1,60	3,06	1,96

2.25 Provinsi Kalimantan Timur

Wilayah cakupan survei di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda. Sebanyak 8 sampel berada di seluruh wilayah cakupan survei.

2.25.1 Peta Distribusi

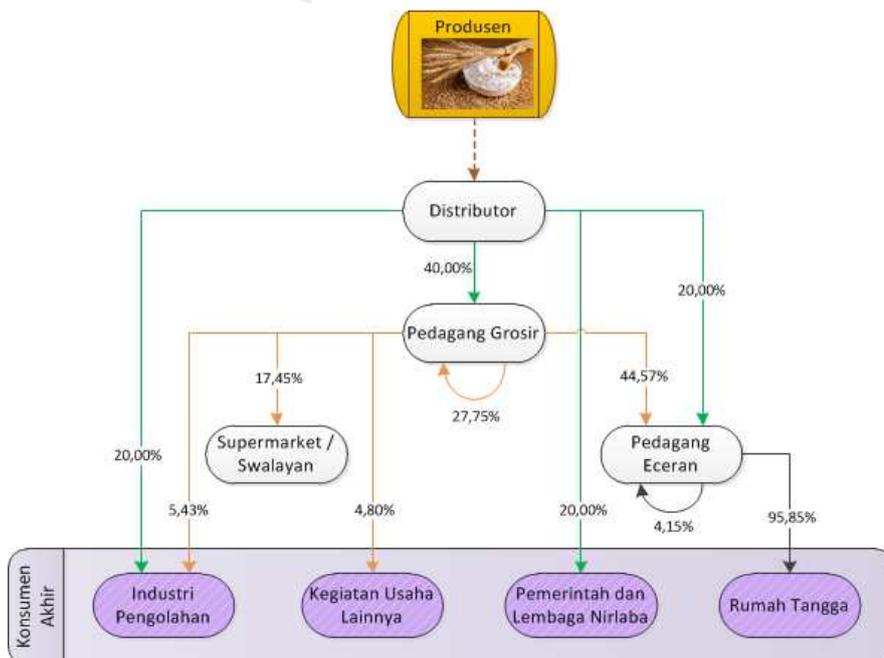
Berdasarkan hasil survei, para pedagang tepung terigu di wilayah Kalimantan Timur mendapat pasokan barang dagangannya dari pedagang di wilayah sendiri sebesar 93,41 persen, sisanya di datangkan dari DKI Jakarta sebesar 6,59 persen. Pasokan tersebut seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan di dalam wilayah sendiri. Peta saluran distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Kalimantan Timur disajikan pada Gambar berikut:



Gambar 53. Peta Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Kalimantan Timur

2.25.2 Pola Distribusi

Pola saluran distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Kalimantan Timur bermula dari pedagang distributor yang mendapat pasokan dari produsen untuk dijual kembali ke pedagang grosir sebesar 40,00 persen, sisanya ke pedagang eceran, industri pengolahan, dan pemerintah serta lembaga nirlaba. Selanjutnya pedagang grosir menjual sebagian besar ke pedagang eceran sekitar 44 persen, supermarket 17,75 persen, sesama pedagang grosir, dan konsumen akhir. Pola distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Kalimantan Timur disajikan pada gambar berikut:



Gambar 54. Pola Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Kalimantan Timur

2.25.3 Marjin Perdagangan dan Pengangkutan

Berdasarkan tabel di bawah ini, diperoleh informasi pedagang besar dan pedagang eceran tepung terigu di Provinsi Kalimantan Timur masing-masing mengambil keuntungan rata-rata sebesar 2,73 persen dan 6,75 persen dengan rata-rata MPP untuk pedagang besar mencapai Rp26,54 juta dan Rp0,79 juta untuk pedagang eceran. Sehingga, rata-rata MPP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp15,50 juta dengan rasio marjin sebesar 2,77 persen. Selengkapnya MPP tepung terigu di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada Tabel 26.

Tabel 26.
Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Tepung terigu di Provinsi Kalimantan Timur

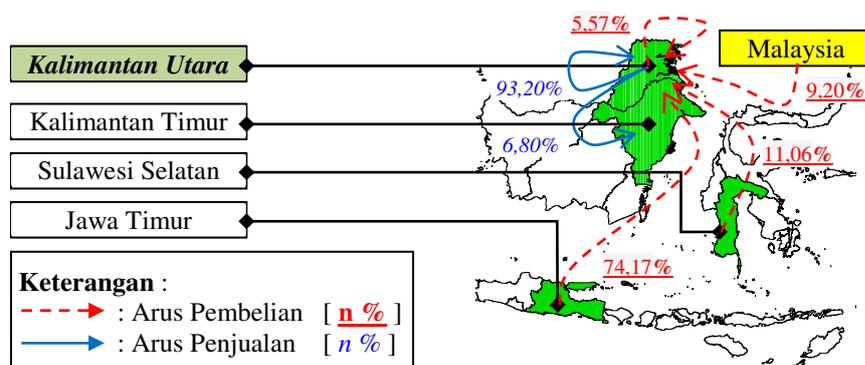
Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	997.054	12.486	575.096
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	970.516	11.696	559.593
Rata-rata MPP (000 Rp)	26.538	790	15.503
Rasio Marjin (%)	2,73	6,75	2,77

2.26 Provinsi Kalimantan Utara

Wilayah cakupan survei di Provinsi Kalimantan Utara yaitu Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Sebanyak 12 sampel pedagang tepung terigu yang berada di seluruh wilayah cakupan survei.

2.26.1 Peta Distribusi

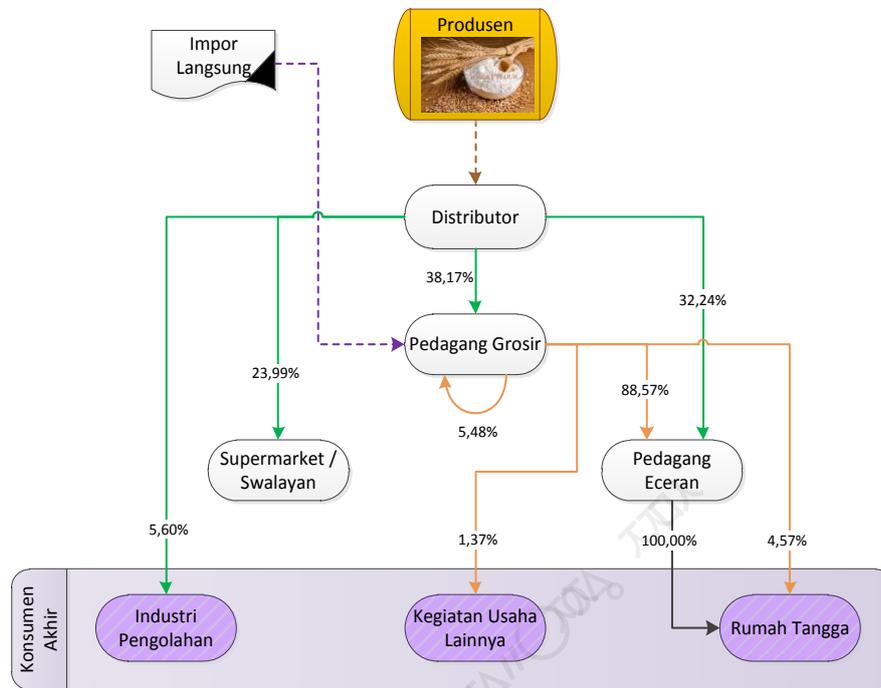
Berdasarkan hasil survei, para pedagang tepung terigu di wilayah Kalimantan Utara mendapat pasokan sebagian besar dari Provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar 74,17 persen. Sisanya selain didapat dari dalam wilayahnya sendiri (5,57%), pasokan juga didapat dari Sulawesi Selatan (11,06%) dan Malaysia (9,20%). Pasokan tersebut selanjutnya dipasarkan sebagian besar ke dalam wilayahnya sendiri, yaitu sebesar 93,20 persen. Sedang sisanya dipasarkan ke provinsi sekitar, yaitu Kalimantan Timur (6,80%). Secara lebih detil, distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada gambar 55 berikut:



Gambar 55. Peta Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Kalimantan Utara

2.26.2 Pola Distribusi

Pola saluran distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Kalimantan Timur disajikan pada Gambar berikut:



Gambar 56. Pola Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Kalimantan Utara

Pola distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Kalimantan Utara bermula dari pedagang distributor yang mendapat pasokan dari produsen. Pasokan ini selanjutnya dijual kembali ke pedagang grosir sebesar 38,17 persen, pedagang eceran sebesar 32,24 persen, supermarket dan swalayan sebesar 23,99 persen dan sisanya dijual langsung ke industri pengolahan. Selanjutnya pedagang grosir mendapat pasokan dari impor langsung kemudian menjual sebagian besar ke pedagang eceran, yaitu sebesar 88,57 persen. Sedangkan sisanya dijual ke kegiatan usaha lainnya, rumah tangga dan sebagian lain ke sesama pedagang grosir.

2.26.3 Margin Perdagangan dan Pengangkutan

Berdasarkan tabel di bawah ini, diperoleh informasi pedagang besar dan pedagang eceran tepung terigu di Provinsi Kalimantan Utara masing-masing mengambil keuntungan rata-rata sebesar 7,03 persen dan 13,03 persen dengan rata-rata MPP untuk pedagang besar mencapai Rp86,71 milyar dan Rp0,99 juta untuk pedagang eceran. Sehingga, rata-rata MPP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp58,13 milyar dengan rasio margin sebesar 7,05 persen. Selengkapnya MPP tepung terigu di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel 27.

Tabel 27.
Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Tepung terigu di Provinsi Kalimantan Utara

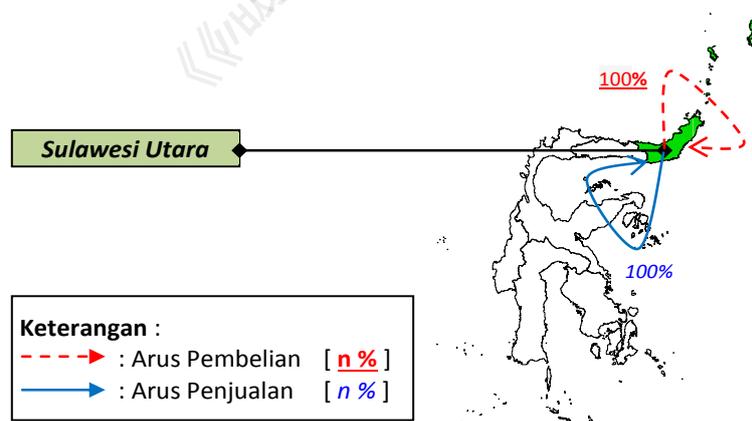
Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	1,319,949	8,586	882,828
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	1,233,240	7,596	824,692
Rata-rata MPP(000 Rp)	86,709	990	58,136
Rasio Marjin (%)	7,03	13,03	7,05

2.27. Provinsi Sulawesi Utara

Wilayah cakupan survei di Provinsi Sulawesi Utara yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Kota Manado, dan Kota Bitung. Alokasi pedagang sebanyak 13 sampel yang berada diseluruh wilayah cakupan survei.

2.27.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, pedagang tepung terigu di wilayah Sulawesi Utara mendapat pasokan barang dagangan seluruhnya dari dalam wilayah sendiri. Pasokan tersebut seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan di dalam wilayah sendiri. Peta saluran distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Sulawesi Utara disajikan pada Gambar berikut:

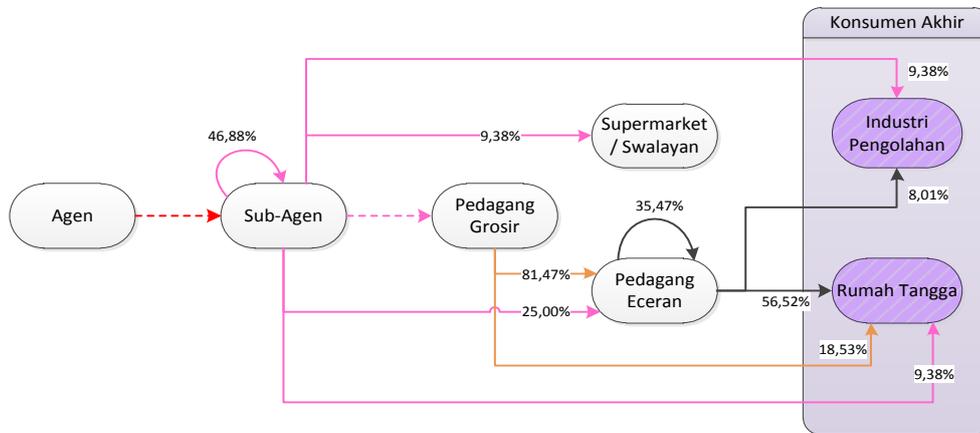


Gambar 57. Peta Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Sulawesi Utara

2.27.2 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, jalur distribusi tepung terigu di Provinsi Sulawesi Utara dimulai dari sub agen yang mendapat pasokan dari agen, dijual kembali ke sesama agen sebesar 46,88 persen, pedagang eceran, supermarket/swalayan, dan konsumen akhir lainnya. Pedagang grosir mendapat pasokan dari sub agen yang dijual kembali sebagian besar ke pedagang eceran sebesar

81,47 persen, sisanya ke rumah tangga. Dari pengecer dijual lagi ke konsumen akhir dan sesama pengecer. Pola saluran distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Sulawesi Utara disajikan pada Gambar berikut:



Gambar 58. Pola Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Sulawesi Utara

2.27.3 Marjin Perdagangan dan Pengangkutan

Berdasarkan tabel di bawah ini, diperoleh informasi pedagang besar dan pedagang eceran tepung terigu di Provinsi Sulawesi Utara masing-masing mengambil keuntungan rata-rata sebesar 3,12 persen dan 9,04 persen dengan rata-rata MPP untuk pedagang besar mencapai Rp20,99 juta dan Rp4,31 juta untuk pedagang eceran. Sehingga, rata-rata MPP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp9,87 juta dengan rasio marjin sebesar 3,86 persen. Selengkapnya MPP tepung terigu di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada Tabel 28.

Tabel 28. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Tepung terigu di Provinsi Sulawesi Utara

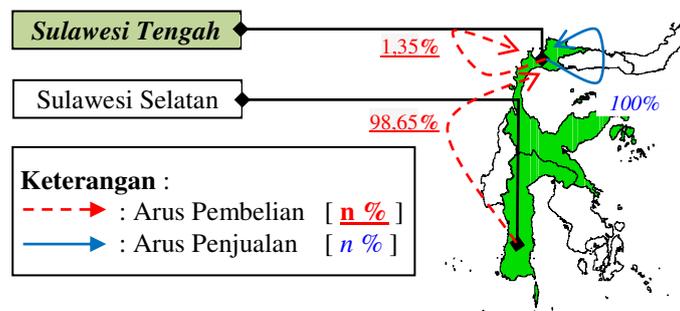
Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	693.269	51.977	265.741
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	672.281	47.669	255.873
Rata-rata MPP (000 Rp)	20.988	4.308	9.868
Rasio Marjin (%)	3,12	9,04	3,86

2.28 Provinsi Sulawesi Tengah

Wilayah cakupan survei di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten Parigi Moutong, dan Kota Palu. Sebanyak 10 sampel pedagang tepung terigu yang berada di seluruh wilayah cakupan survei.

2.28.1 Peta Distribusi

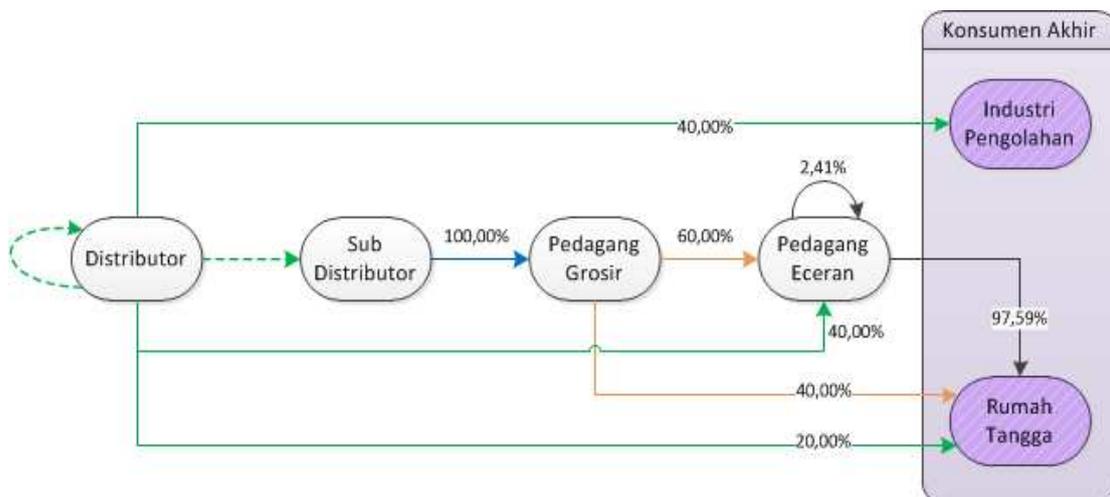
Berdasarkan hasil survei pasokan tepung terigu oleh pedagang di Provinsi Sulawesi Tengah paling besar dari luar wilayah yaitu dari Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 98,65 persen, sisanya dari dalam wilayah sendiri. Penjualan seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan di dalam Provinsi Sulawesi Tengah. Peta saluran distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada Gambar berikut:



Gambar 59. Peta Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Sulawesi Tengah

2.28.2 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, saluran distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Sulawesi Tengah dimulai dari pedagang distributor yang mendapat pasokan dari sesama distributor, penjualannya melalui pedagang eceran sebesar 40,00 persen, sisanya ke industri pengolahan dan rumah tangga. Kelembagaan lainnya seperti sub distributor menjual seluruhnya ke pedagang grosir. Selanjutnya pedagang grosir menjual barang dagangannya ke pengecer sebesar 60,00 persen dan rumah tangga sebesar 40,00 persen. Pola saluran distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada Gambar berikut:



Gambar 60. Pola Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Sulawesi Tengah

2.28.3 Marjin Perdagangan dan Pengangkutan

Berdasarkan tabel di bawah ini, diperoleh informasi pedagang besar dan pedagang eceran tepung terigu di Provinsi Sulawesi Tengah masing-masing mengambil keuntungan rata-rata sebesar 2,33 persen dan 13,13 persen dengan rata-rata MPP untuk pedagang besar mencapai Rp65,07 juta dan Rp3,21 juta untuk pedagang eceran. Sehingga, rata-rata MPP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp34,14 juta dengan rasio marjin sebesar 2,42 persen. Selengkapnya MPP tepung terigu di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Tabel 29.

Tabel 29.
Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Tepung Terigu di Provinsi Sulawesi Tengah

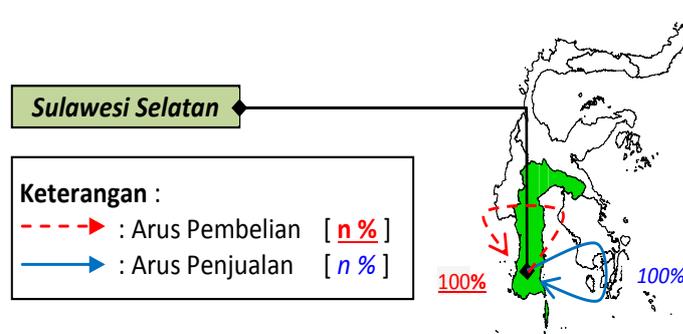
Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	2.860.408	27.658	1.444.033
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	2.795.333	24.449	1.409.891
Rata-rata MPP (000 Rp)	65.075	3.209	34.142
Rasio Marjin (%)	2,33	13,13	2,42

2.29 Provinsi Sulawesi Selatan

Wilayah cakupan survei di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Gowa, Kabupaten Luwu Timur, Kota Makassar, dan Kota Palopo. Alokasi sampel untuk pedagang terigu sebanyak 22 sampel yang berada di seluruh wilayah cakupan survei.

2.29.1 Peta Distribusi

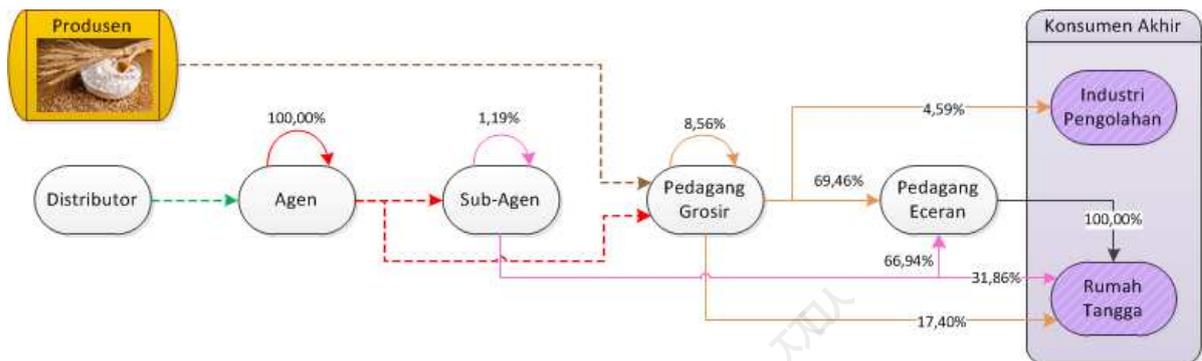
Hasil survei terhadap beberapa responden pedagang tepung terigu di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa tepung terigu yang beredar di pasaran berasal dari dalam wilayah sendiri. Penjualannya hanya untuk wilayah di dalam Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini tercermin dari peta distribusi perdagangan komoditi tepung terigu di Provinsi Sulawesi Selatan pada gambar berikut ini.



Gambar 61. Peta Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Sulawesi Selatan

2.28.2 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei jalur distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Sulawesi Selatan dimulai dari agen yang mendapat pasokan dari distributor, untuk dijual kembali ke sesama agen. Perantara lain yaitu sub agen juga mendapat pasokan dari distributor untuk di kirim ke pengecer sebesar 66,94 persen, rumah tangga 31,86 persen, dan sisanya 1,19 persen. Pedagang grosir selain mendapat pasokan dari distributor, sebagian lainnya dari produsen, agen, dan sub agen, penjualannya sebagian besar ke pengecer sebesar 69,46 persen. Sedangkan Pengecer menjual seluruh barang dagangannya ke rumah tangga.



Gambar 62. Pola Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Sulawesi Selatan

2.29.3 Marjin Perdagangan dan Pengangkutan

Berdasarkan tabel di bawah ini, diperoleh informasi pedagang besar dan pedagang eceran tepung terigu di Provinsi Sulawesi Selatan masing-masing mengambil keuntungan rata-rata sebesar 8,43 persen dan 49,27 persen dengan rata-rata MPP untuk pedagang besar mencapai Rp16,34 juta dan Rp39,90 juta untuk pedagang eceran. Sehingga, rata-rata MPP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp21,24 juta dengan rasio marjin sebesar 12,48 persen. Selengkapnya MPP tepung terigu di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 30.

Tabel 30.
Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Tepung Terigu di Provinsi Sulawesi Selatan

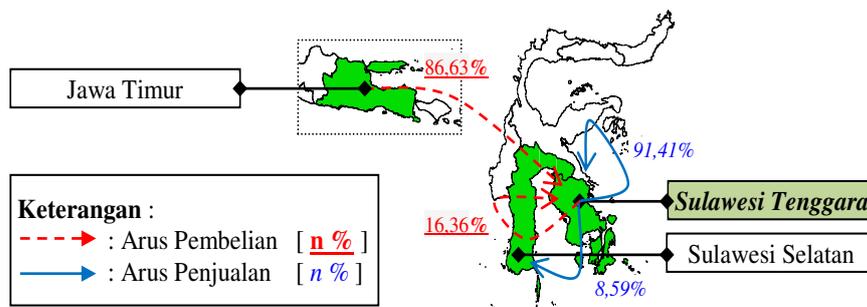
Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	210.102	120.879	191.514
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	193.767	80.982	170.27
Rata-rata MPP (000 Rp)	16.335	39.897	21.244
Rasio Marjin (%)	8,43	49,27	12,48

2.30 Provinsi Sulawesi Tenggara

Wilayah cakupan survei di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Kota Kendari dan Kota Bau-Bau. Sebanyak 10 sampel pedagang tepung terigu yang berada di seluruh wilayah cakupan survei.

2.30.1 Peta Distribusi

Wilayah pembelian pedagang tepung terigu di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagian besar berasal dari Jawa Timur (89,22%). Sedang sebagian kecil lainnya berasal dari wilayah sendiri (9,98%), dan Sulawesi Utara (0,79%). Penjualan seluruhnya masih di wilayah sendiri (100,00%). Seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:

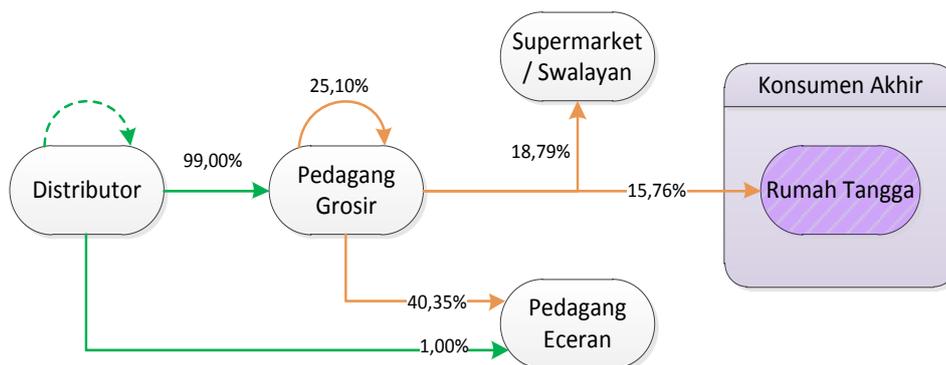


Gambar 63. Peta Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Sulawesi Tenggara

2.30.2 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil pengamatan di Provinsi Sulawesi Tenggara dimulai dari distributor yang mendapatkan pasokan tepung terigu dari sesama distributor. Selanjutnya pasokan tersebut sebagian besar dijual ke pedagang grosir (99,00%) dan sebagian kecil lainnya dijual ke pedagang eceran (1,00%). Pasokan di pedagang grosir kemudian dipasarkan ke pedagang eceran (40,35%), supermarket/swalayan (18,79%), rumah tangga (15,76%) dan sesama pedagang grosir (25,10%).

Pola saluran distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan pada gambar berikut:



Gambar 64. Pola Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Sulawesi Tenggara

2.30.3 Marjin Perdagangan dan Pengangkutan

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi pedagang besar dan pedagang eceran tepung terigu di Provinsi Sulawesi Tenggara masing-masing mengambil keuntungan rata-rata sebesar 9,06

persen dan 11,74 persen dengan rata-rata MPP untuk pedagang besar mencapai Rp208,81 juta dan Rp6,54 juta untuk pedagang eceran. Sehingga, rata-rata MPP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp172,04 juta dengan rasio margin sebesar 9,08 persen. Selengkapnya MPP tepung terigu di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada Tabel 31 di bawah ini:

Tabel 31.
Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Tepung Terigu di Provinsi Sulawesi Tenggara

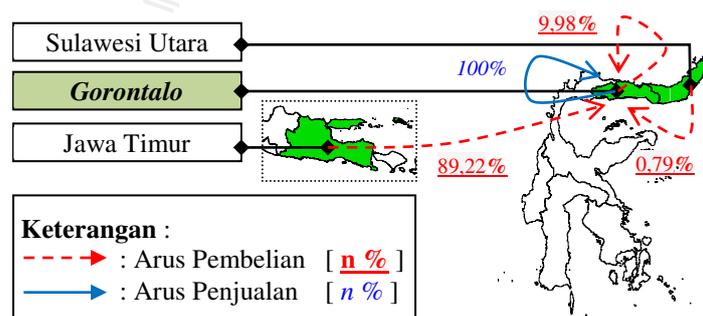
Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	2.513.413	62.281	2.067.753
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	2.304.600	55.740	1.895.716
Rata-rata MPP (000 Rp)	208.813	6.541	172.037
Rasio Margin (%)	9,06	11,74	9,08

2.31 Provinsi Gorontalo

Wilayah cakupan survei di Provinsi Gorontalo yaitu Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo. Sebanyak 8 sampel pedagang tepung terigu berada di seluruh wilayah cakupan survei.

2.31.1 Peta Distribusi

Wilayah pembelian pedagang tepung terigu di Provinsi Gorontalo paling banyak dari Jawa Timur (89,22%). Sedang sisanya diperoleh dari Sulawesi Utara (0,79%) dan dari wilayahnya sendiri sebesar 9,98 persen. Penjualannya pasokan tepung terigu seluruhnya ke dalam wilayahnya sendiri. Hal ini dapat terlihat pada Gambar 65 berikut:

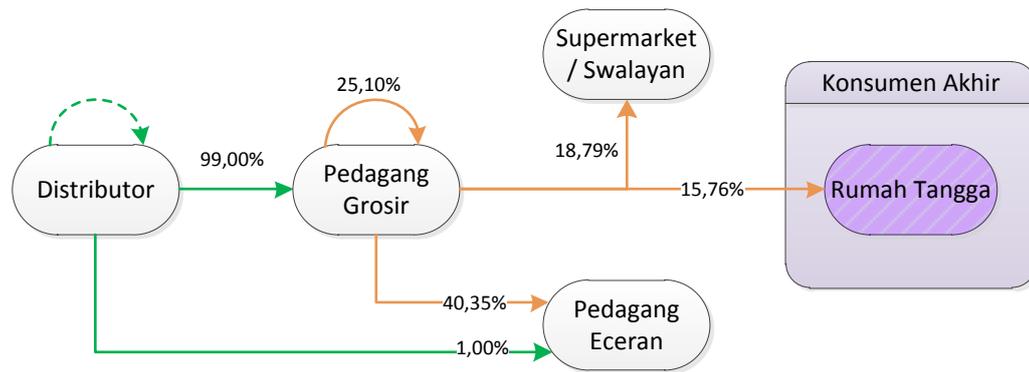


Gambar 65. Peta Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Gorontalo

2.31.2 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil pengamatan di Provinsi Gorontalo dimulai dari Distributor yang mendapatkan pasokan tepung terigu dari sesama distributor. Selanjutnya pasokan tersebut sebagian besar dijual ke pedagang grosir (99,00%) dan sebagian kecil lainnya dijual ke pedagang eceran (1,00%). Pasokan di pedagang grosir kemudian dipasarkan ke pedagang eceran (40,35%), supermarket/swalayan (18,79%), rumah tangga (15,76%) dan sesama pedagang grosir (25,10%).

Pola distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Gorontalo disajikan pada Gambar berikut:



Gambar 66. Pola Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Gorontalo

2.31.3 Marjin Perdagangan dan Pengangkutan

Selengkapnya MPP tepung terigu di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 32 di bawah ini:

Tabel 32.
Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Tepung terigu di Provinsi Gorontalo

Uraian	Pedagog Besar (PB)	Pedagog Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	3.662.384	0	3.662.384
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	3.529.623	0	3.529.623
Rata-rata MPP(000 Rp)	132.762	0	132.762
Rasio Marjin (%)	3,76	0	3,76

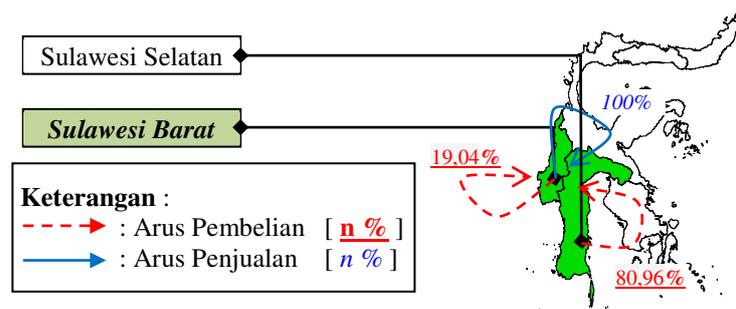
Pedagog besar tepung terigu di Provinsi Gorontalo mengambil keuntungan rata-rata sebesar 3,76 persen dengan rata-rata MPP mencapai Rp132,76 juta. Sedang untuk pedagog eceran tidak didapatkan data dari hasil lapangan, sehingga tidak diulas informasi MPP-nya.

2.32 Provinsi Sulawesi Barat

Wilayah cakupan survei di Provinsi Sulawesi Barat yaitu Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju. Alokasi sampel pedagang tepung terigu sebanyak 10 pedagang yang berada di seluruh wilayah cakupan survei.

2.32.1 Peta Distribusi

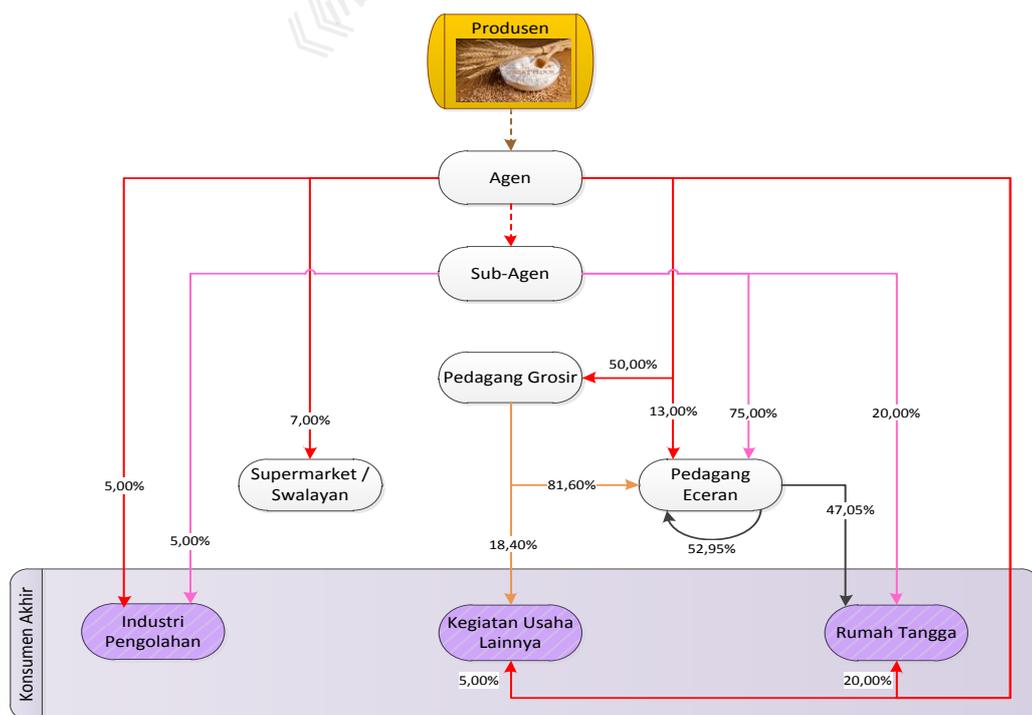
Pasokan tepung terigu di Provinsi Sulawesi Barat berasal dari Sulawesi Selatan sebesar 80,96 persen dan dari dalam wilayahnya sendiri sebesar 19,04 persen. Penjualannya pasokan tepung terigu seluruhnya ke dalam wilayahnya sendiri. Hal ini dapat terlihat pada Gambar 66 berikut:



Gambar 67. Peta Distribusi Perdagangan Tepung terigu di Provinsi Sulawesi Barat

2.32.2 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei jalur distribusi perdagangan tepung terigu, dimulai dari agen yang mendapatkan barang dagangan dari produsen. Selanjutnya pasokan tersebut dijual kembali ke pedagang grosir (50,00%), pedagang eceran (13,00%), supermarket/swalayan (7,00%), industri pengolahan (5,00%), kegiatan usaha lainnya (5,00%) dan rumah tangga (20,00%). Dari hasil pengamatan didapatkan informasi, sub agen mendapatkan pasokan dari agen. Pasokan ini kemudian sebagian besar dijual ke pedagang eceran (75,00%) dan sebagian lainnya ke konsumen akhir yang terdiri dari industri pengolahan (5,00%) dan rumah tangga (20,00%). Hal serupa juga terjadi di pedagang grosir yang menjual sebagian besar tepung terigu ke pedagang eceran (81,60%) dan sisanya dijual langsung ke kegiatan usaha lainnya (18,40). Selanjutnya pedagang eceran menjual sebagian pasokan ke sesama pedagang eceran dan sisanya dipasarkan langsung ke rumah tangga (47,05%).



Gambar 68. Pola Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Sulawesi Barat

2.32.3 Marjin Perdagangan dan Pengangkutan

Pedagang besar dan pedagang eceran tepung terigu di Provinsi Sulawesi Barat masing-masing mengambil keuntungan rata-rata sebesar 10,27 persen dan 7,55 persen dengan rata-rata MPP untuk pedagang besar mencapai Rp21,75 juta dan Rp11,72 juta untuk pedagang eceran. Sehingga, rata-rata MPP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp16,35 juta dengan rasio marjin sebesar 9,02 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 33 berikut:

Tabel 33. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Tepung Terigu di Provinsi Sulawesi Barat

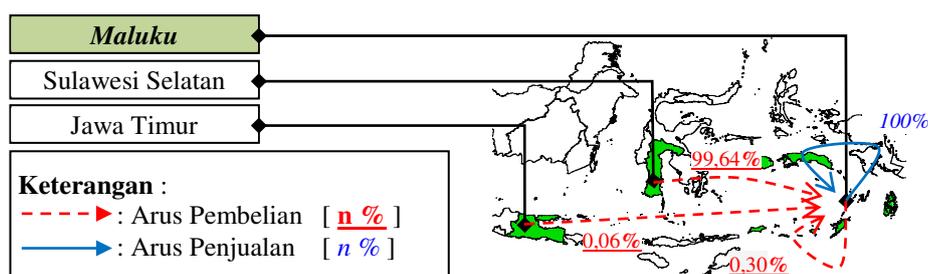
Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	233.637	166.839	197.668
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	211.884	155.120	181.319
Rata-rata MPP (000 Rp)	21.753	11.719	16.350
Rasio Marjin (%)	10,27	7,55	9,02

2.33 Provinsi Maluku

Wilayah cakupan survei di Provinsi Maluku yaitu Kota Ambon dan Kota Tual. Sebanyak 7 sampel pedagang tepung terigu yang berada di semua wilayah cakupan survei.

2.33.1 Peta Distribusi

Wilayah pembelian tepung terigu di Provinsi Maluku terbesar didatangkan dari Sulawesi Selatan (99,64%) dan sisanya didatangkan dari Jawa Timur serta dari wilayahnya sendiri. Sedangkan penjualan, seluruhnya untuk wilayah sendiri (100,00%).

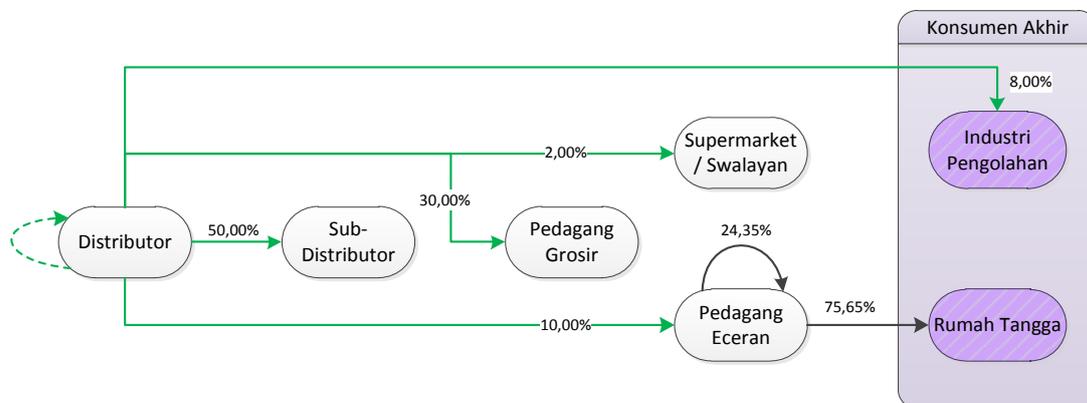


Gambar 69. Peta Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Maluku

2.33.2 Pola Distribusi

Jalur distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Maluku dimulai dari distributor yang juga mendapat pasokan tepung terigu dari distributor. Selanjutnya barang dagangannya dijual kembali sebagian besar ke sub distributor (50,00%) dan pedagang grosir (30,00%). Selebihnya pasokan dijual ke pedagang eceran, supermarket/swalayan dan juga industri pengolahan.

Sementara itu pedagang eceran yang mendapat pasokan dari distributor menjual pasokan tepung terigu langsung ke rumah tangga (75,65%) dan sisanya dijual ke sesama pengecer (24,35%). Pola saluran distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Maluku disajikan pada gambar berikut:



Gambar 70. Pola Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Maluku

2.33.3 Marjin Perdagangan dan Pengangkutan

Pedagang besar dan pedagang eceran tepung terigu di Provinsi Maluku masing-masing mengambil keuntungan rata-rata sebesar 10,00 persen dan 25,76 persen dengan rata-rata MPP untuk pedagang besar mencapai Rp9,84 milyar dan Rp20,46 juta untuk pedagang eceran. Sehingga, rata-rata MPP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp1,66 milyar dengan rasio marjin sebesar 10,06 persen. Selengkapnya MPP tepung terigu di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Tabel 34 berikut:

Tabel 34. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Tepung Terigu di Provinsi Maluku

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	108.220.734	99.865	18.120.010
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	98.382.400	79.410	16.463.242
Rata-rata MPP (000 Rp)	9.838.334	20.455	1.656.768
Rasio Marjin (%)	10,00	25,76	10,06

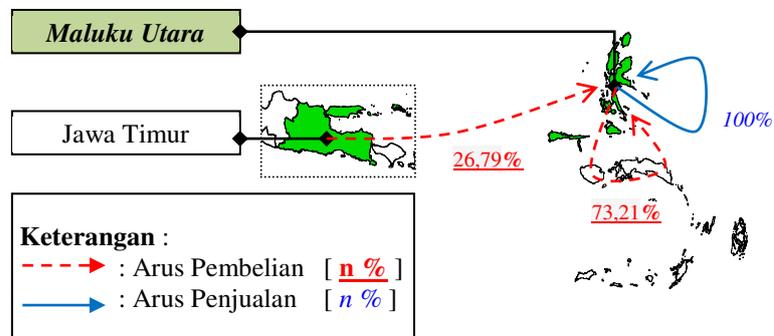
2.34 Provinsi Maluku Utara

Wilayah cakupan survei di Provinsi Maluku Utara yaitu Kota Ternate dan Kota Tidore. Sebanyak 9 alokasi sampel pedagang yang berada di seluruh wilayah cakupan survei.

2.34.1 Peta Distribusi

Hasil survei terhadap beberapa responden pedagang tepung terigu di Provinsi Maluku Utara menunjukkan bahwa tepung terigu yang beredar di pasaran sebagian besar berasal dari

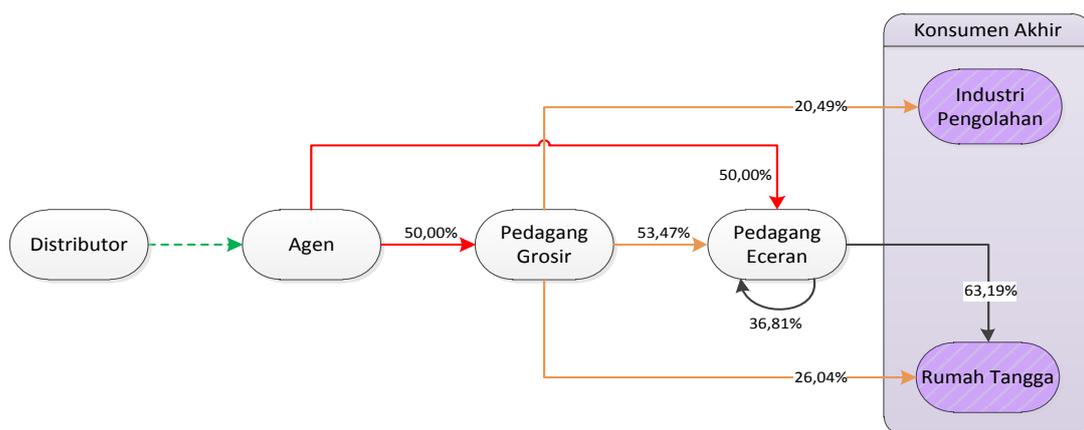
dalam wilayah sendiri, yaitu sekitar 73,21 persen. Selebihnya sebesar 26,79 persen berasal dari Jawa Timur. Sedang untuk penjualan sepenuhnya dipasarkan ke dalam wilayahnya sendiri. Hal ini tercermin dari peta distribusi perdagangan komoditi tepung terigu di Provinsi Maluku Utara pada gambar berikut ini:



Gambar 71. Peta Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Maluku Utara

2.34.2 Pola Distribusi

Jalur distribusi perdagangan di Provinsi Maluku Utara dimulai dari agen yang mendapat pasokan dari distributor. Pasokan ini kemudian dijual lagi ke pedagang grosir (50,00%) dan pengecer (50,00%). Selanjutnya pedagang grosir sebagian besar menjual kembali barang dagangannya ke pengecer (53,47%) dan selebihnya dijual ke konsumen akhir yang terdiri dari industri pengolahan (20,49%) dan rumah tangga (26,04%). Terakhir pengecer menjual sebagian besar barang dagangannya ke rumah tangga (63,19%) dan sisanya dijual ke sesama pedagang eceran. Pola saluran distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Maluku Utara disajikan pada gambar berikut:



Gambar 72. Pola Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Maluku Utara

2.34.3 Marjin Perdagangan dan Pengangkutan

Pedagang besar dan pedagang eceran tepung terigu di Provinsi Maluku Utara masing-masing mengambil keuntungan rata-rata sebesar 4,59 persen dan 4,06 persen dengan rata-rata

MPP untuk pedagang besar mencapai Rp11,68 juta dan Rp6,95 juta untuk pedagang eceran. Sehingga, rata-rata MPP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp9,79 juta dengan rasio margin sebesar 4,43 persen. Selengkapnya MPP tepung terigu di Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada Tabel 35 di bawah ini.

Tabel 35.
Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Tepung Terigu di Provinsi Maluku Utara

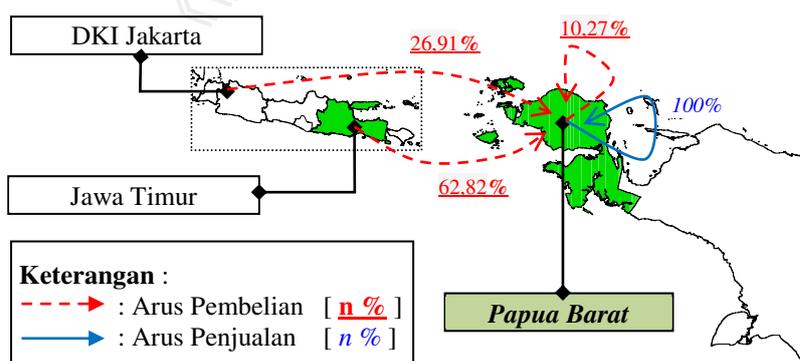
Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	266.178	178.025	230.917
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	254.493	171.073	221.125
Rata-rata MPP (000 Rp)	11.685	6.953	9.792
Rasio Margin (%)	4,59	4,06	4,43

2.35 Provinsi Papua Barat

Wilayah cakupan survei di Provinsi Papua Barat yaitu Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong dengan alokasi pedagang tepung terigu sebanyak 8 sampel yang berada di seluruh wilayah cakupan survei.

2.35.1 Peta Distribusi

Wilayah pembelian tepung terigu di Provinsi Papua Barat, berasal dari Jawa Timur (62,82%), DKI Jakarta (26,91%) dan dari dalam wilayahnya sendiri sebesar 10,27 persen. Sedangkan untuk penjualan seluruhnya dipasarkan ke wilayah Papua Barat (100,00%).

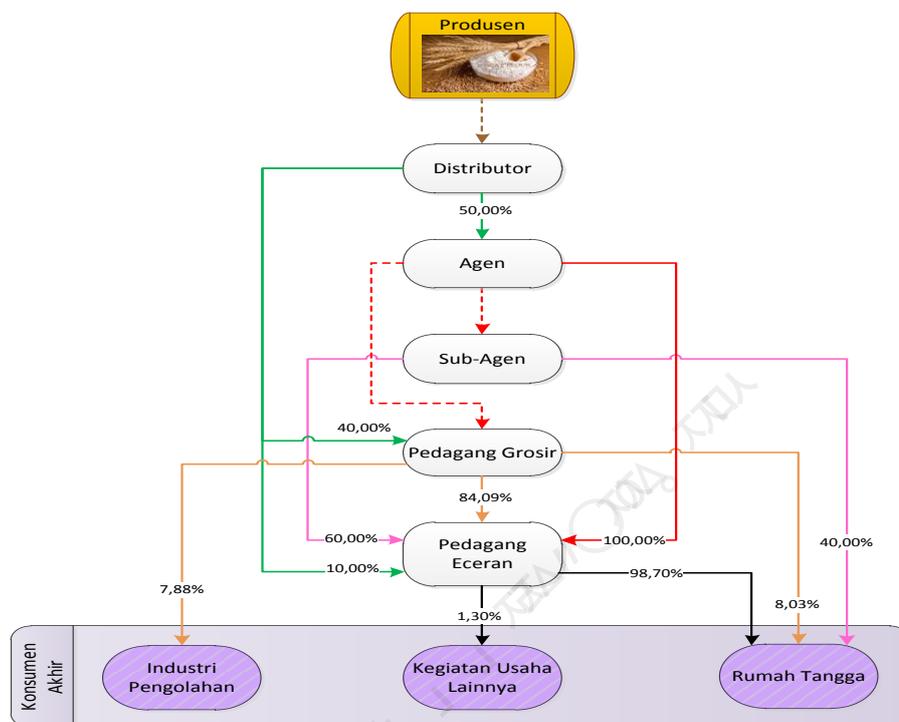


Gambar 73. Peta Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Papua Barat

2.35.2 Pola Distribusi

Pola distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Papua Barat dimulai dari distributor, dimana pasokan didapat dari produsen. Pasokan tepung terigu ini kemudian dijual sebagian besar ke agen (50,00%) dan pedagang grosir (40,00%). Sisanya sebesar 10 persen dijual ke pedagang eceran. Selanjutnya agen menjual seluruh pasokannya ke pedagang eceran. Selain itu didapatkan

informasi bahwa sub agen mendapat pasokan dari agen, dimana pasokan ini kemudian dipasarkan ke pedagang eceran (60,00%) dan rumah tangga (40,00%). Pedagang grosir menjual sebagian besar pasokan tepung terigu ke pedagang eceran (84,09%) dan selebihnya dijual langsung ke konsumen akhir yang terdiri dari industri pengolahan dan rumah tangga. Terakhir pengecer menjual barang dagangannya ke rumah tangga (98,70%) dan sebagian kecil ke kegiatan usaha lainnya sebesar 1,30 persen.



Gambar 74. Pola Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Papua Barat

2.35.3 Marjin Perdagangan dan Pengangkutan

Pedagang besar dan pedagang eceran tepung terigu di Provinsi Papua Barat masing-masing mengambil keuntungan rata-rata sebesar 34,00 persen dan 14,32 persen dengan rata-rata MPP untuk pedagang besar mencapai Rp224,76 juta dan Rp17,85 juta untuk pedagang eceran. Sehingga, rata-rata MPP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp173,03 juta dengan rasio marjin sebesar 32,84 persen. Selengkapnya MPP tepung terigu di Provinsi Papua Barat dapat dilihat pada Tabel 36 berikut:

Tabel 36. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Tepung terigu di Provinsi Papua Barat

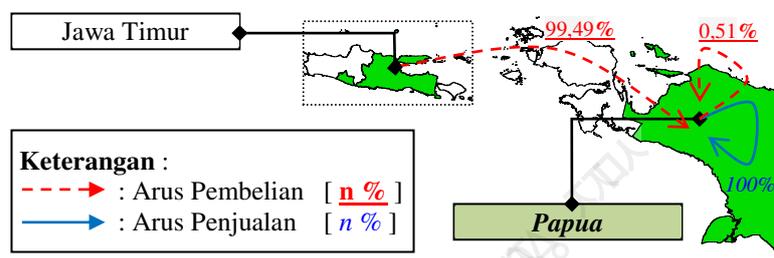
Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	885.743	142.500	699.933
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	660.983	124.650	526.900
Rata-rata MPP (000 Rp)	224.760	17.850	173.033
Rasio Marjin (%)	34,00	14,32	32,84

2.36 Provinsi Papua

Wilayah cakupan survei di Provinsi Papua berada di Kabupaten Merauke dan Kota Jayapura. dengan alokasi pedagang tepung terigu sebanyak 8 sampel yang berada di seluruh wilayah cakupan survei.

2.36.1 Peta Distribusi

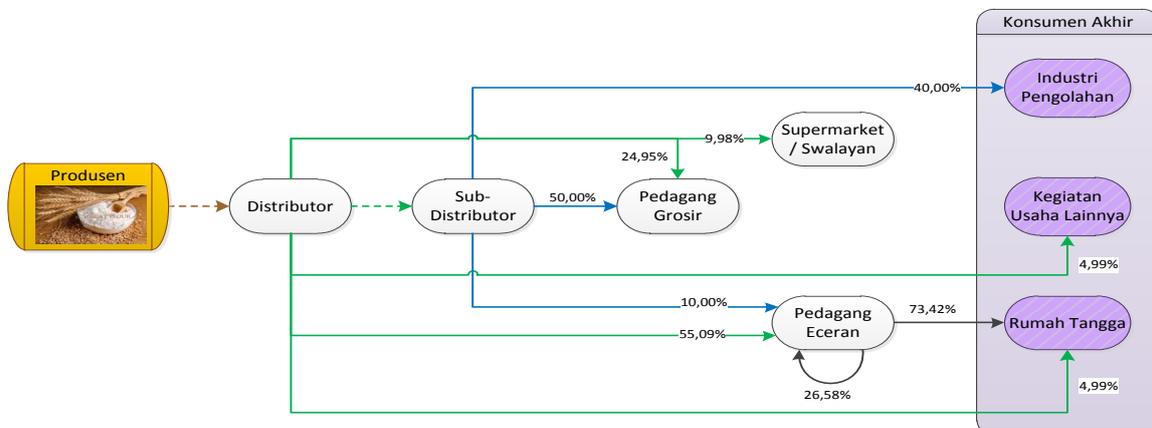
Wilayah pembelian pasokan tepung terigu di Provinsi Papua sebagian besar berasal dari Jawa Timur (99,49%) dan sebagian kecil lainnya dari dalam wilayahnya sendiri (0,51%). Sedang untuk penjualan sebagian seluruhnya dijual ke wilayah Papua sendiri sebesar 100 persen. Selengkapnya peta distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Papua dapat dilihat dari Gambar 75 berikut:



Gambar 75. Peta Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Papua

2.36.2 Pola Distribusi

Pola distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Papua dimulai dari distributor yang mendapat pasokan tepung terigu dari produsen. Pasokan ini kemudian oleh distributor dijual sebagian besar ke pedagang eceran sebesar 55,09 persen. Selebihnya pasokan dijual ke pedagang grosir, supermarket/swalayan dan langsung ke konsumen akhir. Dari pengamatan lapangan didapatkan informasi bahwa sub distributor mendapat pasokan dari distributor dimana pasokan yang didapat selanjutnya dipasarkan ke pedagang grosir (50,00%), industri pengolahan (40,00%) dan pedagang eceran (10,00%). Terakhir pengecer menjual barang dagangannya ke rumah tangga (73,42%) dan ke sesama pedagang eceran sebesar 26,58 persen. Pola saluran distribusi perdagangan tepung terigu di Provinsi Papua disajikan pada gambar berikut:



Gambar 76. Pola Distribusi Perdagangan Tepung Terigu di Provinsi Papua

2.36.3 Marjin Perdagangan dan Pengangkutan

Pedagang besar dan pedagang eceran tepung terigu di Provinsi Papua masing-masing mengambil keuntungan rata-rata sebesar 16,76 persen dan 9,60 persen dengan rata-rata MPP untuk pedagang besar mencapai Rp1,09 milyar dan Rp2,79 juta untuk pedagang eceran. Sehingga, rata-rata MPP untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp468,09 juta dengan rasio marjin sebesar 16,72 persen. Selengkapnya MPP tepung terigu di Provinsi Papua Barat dapat dilihat pada Tabel 37 di bawah ini.

Tabel 37. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Tepung terigu di Provinsi Papua

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	7.583.285	31.820	3.268.163
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	6.494.788	29.033	2.800.071
Rata-rata MPP(000 Rp)	1.088.498	2.787	468.092
Rasio Marjin (%)	16,76	9,60	16,72

BAB III KESIMPULAN

Sebagai barang konsumsi, pasokan tepung terigu harus tersedia bagi kebutuhan konsumen akhir. Maka distribusi pasokan harus melibatkan saluran distribusi seperti pedagang besar (distributor, agen, grosir) dan pengecer. Berdasarkan hasil survei pedagang tepung terigu pada tingkat pedagang besar mendapat pasokan langsung dari produsen, importir, juga sesama distributor. Pada umumnya provinsi-provinsi di Indonesia mendapatkan pasokan tepung terigu sebagian besar dari sentra/produsen tepung terigu di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur yang merupakan provinsi utama pemasok ketersediaan tepung terigu. Selain itu ditemukan juga di Provinsi Kalimantan Utara pedagang mendapat pasokan terigu impor dari negara Malaysia yang memang terdekat dengan provinsi tersebut.

Distribusi komoditi tepung terigu di setiap provinsi melibatkan pedagang besar dan pedagang eceran. Pedagang besar tidak hanya mendistribusikan komoditi tepung terigu ini ke fungsi usaha perdagangan lainnya, tetapi juga mendistribusikan langsung ke konsumen akhir seperti industri pengolahan (industri mie, kue, biskuit) dan kegiatan usaha lainnya pedagang martabak, gorengan, kerupuk, dll). Keuntungan yang diperoleh pedagang besar di seluruh provinsi berkisar antara 1,94 persen – 34,00 persen. Marjin minimum diperoleh di Provinsi Jawa Barat, sedangkan marjin maksimum diperoleh di Provinsi Papua. Sementara itu keuntungan yang diperoleh pedagang eceran di seluruh provinsi berkisar antara 2,66 persen – 49,27 persen. Marjin minimum diperoleh di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan marjin maksimum diperoleh di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun perolehan marjin pedagang besar dan pedagang eceran secara nasional adalah 5,84 persen dan 9,06 persen.

Survei Pola Distribusi 2014



LAMPIRAN

Survei Pola Distribusi 2014



REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK

**SURVEI POLA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN BEBERAPA KOMODITI**

**VPDP-14
PEDAGANG**

Kode KBLI

--	--	--	--

(disalin dari DSP)

BLOK I: PENGENALAN TEMPAT	
(1)	(2)
1. Provinsi :	<input type="text"/>
2. Kabupaten/Kota*) :	<input type="text"/>
3. Kecamatan :	<input type="text"/>
4. Kelurahan/Desa*) :	<input type="text"/>
5. Nomor Urut Perusahaan/Usaha :	<input type="text"/>
6. Nama lengkap Perusahaan/Usaha :	
7. Alamat Perusahaan/Usaha :	
Kode pos : <input type="text"/>	
Nomor Telepon : (.....)	Ext: Nomor Fax. : (.....)
E-mail:	Website:

*) coret yang tidak sesuai

Tujuan Survei : a. Mendapatkan pola dan peta penjualan produksi
 b. Mendapatkan pola dan peta distribusi perdagangan.
 c. Memperoleh margin perdagangan dan pengangkutan mulai tingkat pedagang besar sampai dengan pedagang eceran.

Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

Kerahasiaan : Data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya berdasarkan Undang-undang (pasal 21 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)

Kewajiban : Responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Undang-undang (pasal 27 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)

Informasi lebih lanjut hubungi:
Sub Direktorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri
 Jl. Dr Sulomo No. 6-8, Jakarta 10710
 Telepon: (021) 3810291-4, 3841195, 3842508 pes: 6130, 6131, 6132 & 6133 Fax: (021) 386 3815. Email : statpdh@bps.go.id
 atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota: Telepon:

BLOK III: DISTRIBUSI PERDAGANGAN (LANJUTAN)

3. Penjualan barang dagangan selama tahun 2013:

No.	Tujuan penjualan barang dagangan	Persentase
(1)	(2)	(3)
a.	Ekspor langsung	a. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
b.	Eksportir	b. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
c.	Distributor	c. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
d.	Sub distributor	d. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
e.	Agen	e. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
f.	Sub agen	f. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
g.	Pedagang grosir	g. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
h.	Pedagang pengumpul	h. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
i.	<i>Department Store</i>	i. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
j.	Supermarket/swalayan	j. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
k.	Pedagang eceran	k. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
l.	Industri pengolahan	l. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
m.	Kegiatan usaha lainnya	m. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
n.	Pemerintah dan lembaga nirlaba	n. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
o.	Rumah tangga	o. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Jumlah		1 0 0 %

4. Wilayah penjualan barang dagangan selama tahun 2013:

No.	Kabupaten/Kota/Negara	Kode *)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
b.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
c.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
d.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
e.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
f.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
g.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
h.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
i.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
j.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
k.	<i>Lainnya (diisi pada lampiran)</i>		
Jumlah			1 0 0 %

*) Kode Kabupaten/Kota/Negara diisi oleh pemeriksa/koordinator lapangan

BLOK IV: KENDALA PENGADAAN DAN PEMASARAN BARANG DAGANGAN				
(1)			(2)	
1. a. Apakah ada kendala dalam pengadaan barang dagangan selama tahun 2013?			<input type="checkbox"/>	
Ya	1	Tidak	2	→ ke rincian 2
b. Jika "Ya", jenis kendala:			<input type="checkbox"/>	
Kelangkaan barang	1	Modal	16	
Fluktuasi Harga	2	Lainnya	32	
Transportasi	4	(tuliskan		
Sarana dan prasarana	8			
c. Kendala utama			<input type="checkbox"/>	
2. a. Apakah ada kendala dalam pemasaran barang dagangan selama tahun 2013?			<input type="checkbox"/>	
Ya	1	Tidak	2	→ ke Blok V
b. Jika "Ya", jenis kendala:			<input type="checkbox"/>	
Persaingan pasar	1	Bencana alam	16	
Rantai distribusi	2	Lainnya	32	
Transportasi	4	(tuliskan		
Sarana dan prasarana	8			
c. Kendala utama			<input type="checkbox"/>	

BLOK V: PEMBELIAN DAN PENJUALAN				
1. Pembelian dan penjualan barang dagangan selama tahun 2013:				
Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp) kolom (2) x kolom (4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a. Stok Awal (sisa 2012)
b. Pembelian
c. Dikonsumsi sendiri termasuk yang diberikan ke pihak lain		
d. Hilang/rusak
e. Penjualan
f. Stok Akhir (sisa 2013)
*)Satuan yang digunakan: kilogram, kwintal, ton				
2. a. Apakah ada biaya transportasi dalam pembelian dan/atau penjualan barang dagangan selama tahun 2013?				<input type="checkbox"/>
Ya	1	Tidak	2	
b. Jika "Ya", berapa nilainya?				Rp.

BLOK VI: CATATAN

BLOK VII: KETERANGAN CONTACT PERSON	
1. Nama	:
2. Jabatan	:
3. Telepon	:
4. Tanggal pengisian	:
5. Tanda tangan	:

BLOK VIII: KETERANGAN PETUGAS		
URAIAN	PENCACAH	PEMERIKSA
(1)	(2)	(3)
1. Nama
2. Tanggal s.d. s.d.
3. Tanda tangan



REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK

**SURVEI POLA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN BEBERAPA KOMODITI**

**VPDP-14
PRODUSEN**

Kode KBLI

--	--	--	--	--

(disalin dari DSP)

BLOK I: PENGENALAN TEMPAT	
(1)	(2)
1. Provinsi :	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>
2. Kabupaten/Kota*) :	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>
3. Kecamatan :	<input style="width: 60px; height: 20px;" type="text"/>
4. Kelurahan/Desa*) :	<input style="width: 60px; height: 20px;" type="text"/>
5. Nomor Urut Perusahaan/Usaha :	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>
6. Nama lengkap Perusahaan/Usaha :	
7. Alamat Perusahaan/Usaha :	
Kode pos :	<input style="width: 60px; height: 20px;" type="text"/>
Nomor Telepon : (.....)	Ext: Nomor Fax. : (.....)
E-mail:	Website:

*) coret yang tidak sesuai

Tujuan Survei	: a. Mendapatkan pola dan peta penjualan produksi. b. Mendapatkan pola dan peta distribusi perdagangan. c. Memperoleh margin perdagangan dan pengangkutan mulai tingkat pedagang besar sampai dengan pedagang eceran.
Dasar Hukum	: Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
Kerahasiaan	: Data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya berdasarkan Undang-undang (pasal 21 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)
Kewajiban	: Responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Undang-undang (pasal 27 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)

<p>Informasi lebih lanjut hubungi: Sub Direktorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri Jl. Dr Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710 Telepon: (021) 3810291-4, 3841195, 3842508 pes: 6130, 6131, 6132 & 6133 Fax: (021) 386 3815. Email : statpdn@bps.go.id atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota: Telepon:</p>
--

BLOK IV: PENJUALAN PRODUKSI

1. Penjualan barang produksi selama tahun 2013:

No.	Tujuan penjualan barang produksi	Persentase
(1)	(2)	(3)
a.	Ekspor langsung	a. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
b.	Eksportir	b. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
c.	Distributor	c. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
d.	Agan	d. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
e.	Pedagang grosir	e. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
f.	Pedagang pengumpul	f. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
g.	Department Store	g. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
h.	Supermarket/swalayan	h. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
i.	Pedagang eceran	i. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
j.	Industri pengolahan	j. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
k.	Kegiatan usaha lainnya	k. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
l.	Pemerintah dan lembaga nirlaba	l. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
m.	Rumah tangga	m. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Jumlah		1 0 0 %

2. Wilayah penjualan barang produksi selama tahun 2013:

No	Kabupaten/Kota/Negara	Kode *)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
b.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
c.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
d.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
e.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
f.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
g.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
h.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
i.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
j.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
k.	Lainnya (diisi pada lampiran)		
Jumlah			1 0 0 %

*) Kode Kabupaten/Kota/Negara diisi oleh Pemeriksa/Koordinator Lapangan

	BADAN PUSAT STATISTIK	UNTUK PERUSAHAAN
	KABUPATEN/KOTA :	
SURAT TANDA TERIMA		
<p>Sudah terima dari petugas SURVEI POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BEBERAPA KOMODITI 2014 (VPDP14-PEDAGANG), 1 (satu) kuesioner VPDP14-PEDAGANG yang ditujukan kepada :</p>		
1. Nama Perusahaan	: _____	
2. Alamat	: _____	
Telepon :	_____	Pesawat : _____
HP :	_____	
3. Kegiatan Usaha	: _____	
4. Perkiraan Waktu Selesai *) : 2014	
Identitas Petugas VPDP14		Yang Menerima,
Nama :	Nama :
NIP :	Jabatan :
*) Jika selesai sebelum waktu yang diperkirakan, mohon telepon ke :		
BPS Kabupaten/Kota :, Telepon :		
atau No. HP Petugas VPDP14 :		

	BADAN PUSAT STATISTIK	UNTUK PETUGAS
	KABUPATEN/KOTA :	
SURAT TANDA TERIMA		
<p>Sudah terima dari petugas SURVEI POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BEBERAPA KOMODITI 2014 (VPDP14-PEDAGANG), 1 (satu) kuesioner VPDP14-PEDAGANG yang ditujukan kepada :</p>		
1. Nama Perusahaan	: _____	
2. Alamat	: _____	
Telepon :	_____	Pesawat : _____
HP :	_____	
3. Kegiatan Usaha	: _____	
4. Perkiraan Waktu Selesai *) : 2014	
Identitas Petugas VPDP14		Yang Menerima,
Nama :	Nama :
NIP :	Jabatan :
*) Jika selesai sebelum waktu yang diperkirakan, mohon telepon ke :		
BPS Kabupaten/Kota :, Telepon :		
atau No. HP Petugas VPDP14 :		

Survei Pola Distribusi 2014

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik

Jl. Dr. Sutomo No. 6 – 8 Jakarta 10710 Kotak Pos 1003, Jakarta 10010

Telp. 021-3841195, 3842508, 3810291 – 4 Fax: 021-3857048

E-mail: bpsHQ@bps.go.id Homepage: <http://www.bps.go.id>